

**ELEKTABILITAS PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PADA  
PEMILU LEGISLATIF KOTA PALEMBANG TAHUN 2014**



**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ANGGI DWI SAPUTRI**  
**NIM. 1544300004**

**Diajukan**

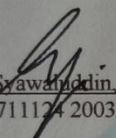
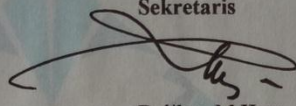
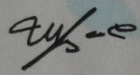
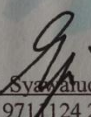
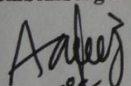
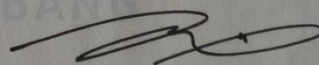
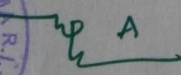
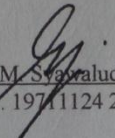
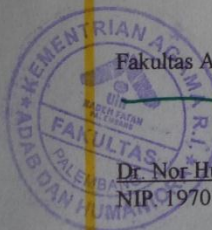
**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)  
Pada Program Studi Politik Islam**

**JURUSAN POLITIK ISLAM  
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2017**

NOMOR : B-1927/Un.09/PP.15/11/ 2017

**SKRIPSI****ELEKTABILITAS PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
PADA PEMILU LEGISLATIF KOTA PALEMBANG TAHUN 2014**

yang telah disusun dan dipersiapkan oleh

**ANGGI DWI SAPUTRI**  
NIM. 1544300004telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 15 November 2017**Susunan Dewan Pembimbing dan Penguji****Ketua Dewan Penguji**  
Dr. M. Syawaluddin, M.Ag  
NIP. 19711124 200312 1 001**Sekretaris**  
Dalilan, M.Hum  
NIP. 19680829 2005011 003**Pembimbing I**  
Dr. Nyimas Umi Kalsum, M.Hum  
NIP. 19750715 200710 2 003**Penguji I**  
Dr. M. Syawaluddin  
NIP. 19711124 200312 1 001**Pembimbing II**  
Amaliatulwalidain, M.A**Penguji II**  
Ryllian Chandra, M.ASkripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)  
Tanggal, 15 November 2017Dekan  
Fakultas Adab Dan Humaniora  
Dr. Nor Huda, M.A  
NIP. 19701114 200003 1 002Ketua Program Studi  
Politik Islam  
Dr. M. Syawaluddin  
NIP. 19711124 200312 1 001

### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Palembang,

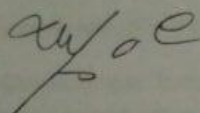
2017

  
METERAI  
TAMPEL  
NO. 17 AEF819451701  
6000  
RUPIAH  
Anggi Dwi Saputri

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

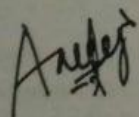
Skripsi yang dibuat oleh Anggi Dwi Saputri Nim 1544300004  
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Palembang, 20 Juni 2017  
Pembimbing I



Dr. Nyimas Umi Kalsum, M.Hum  
NIP. 19750715 200710 2 003

Palembang, 20 Juni 2017  
Pembimbing II



Amaliatulwalidain, M.A  
NIP. -

## NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudari  
Anggi Dwi Saputri

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora  
UIN Raden Fatah Palembang  
Di-  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul :

**"ELEKTABILITAS PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PADA PEMILU LEGISLATIF KOTA PALEMBANG TAHUN 2014"**

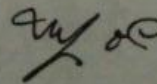
Yang ditulis oleh :

Nama : Anggi Dwi Saputri  
Nim : 1544300004  
Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dilanjutkan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Politik Islam.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Palembang, 20 Juni 2017  
Dosen Pembimbing I



Dr. Nyimas Umi Kalsum, M.Hum  
NIP. 19750715 200710 2 003

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Intelligence is not the determinant of success, but hard work is the real determinant of your success. So ? believe, a result will never betray the process”*

*Kecerdasan bukanlah penentu kesuksesan, tetapi kerja keras adalah penentu nyata dari kesuksesanmu. Jadi ? percayalah, sebuah hasil tidak akan pernah mengkhianati usahanya.*

### **Kupersembahkan Kepada :**

- ★ Papaku dan Mamaku tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil selama perkuliahanku sampai sekarang.
- ★ Ayundaku tersayang Engga Oktarina Pratama, S.Pd dan keluarga besarku “Samani Fams” yang telah mendo’akan dan memberikan motivasi serta semangat kuliah untuk membahagiakan kedua orang tua dan untuk keberhasilanku.
- ★ Sahabat-sahabat seperjuanganku jurusan Politik Islam 2012, grup rempong drum band BSM 2012, KKN posko 107, dan teman-teman semuanya yang telah berjuang bersama dan memberikan semangat, bantuan serta do’a untukku.
- ★ Agamaku dan Almamaterku

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan Ridho-Nya lah, akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir dari perjalanan kuliah saya. Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Politik Islam pada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam penyusunan skripsi ini, saya banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam tulisan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

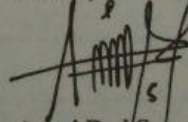
1. Kedua orang tuaku dan keluarga besarku yang telah banyak memberikan dukungan moril dan materi serta doa di dalam perjalanan kuliahku.
2. Bapak Dr. Nor Huda, M.A, selaku Dekan Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, yang telah memberikan perubahan-perubahan positif dalam lingkung Fakultas Adab dan Humaniora.
3. Bapak Dr. M. Syawaluddin, selaku Kajur Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, yang telah memberikan ilmu dan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi.
4. Ibu Dr. Nyimas Umi Kalsum, M.Hum selaku pembimbing I dan Ibu Amaliatulwalidain, M.A selaku pembimbing II, yang telah menyempatkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengoreksi dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini serta sesantiasa sabar dalam membimbing.
5. Bapak Prof. Dr. H. J. Suyuthi Pulungan., M.A, Ahmad Syukri, S. IP., M. Si, Rylian Chandra, M.A, Kiki Mikail, M.A, Sirajuddin Fikry, SS.M.Hum selaku dosen Politik Islam yang telah memberikan ilmu-ilmunya pada masa perkulihan sampai menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh bapak/ibu dosen dan staf karyawan Fakultas Adab dan Humaniora yang tidak bisa disebutkan satu-persatu namanya, terima kasih telah memberikan banyak pelajaran dan membimbing serta membantu selama di kampus.

7. Staf KPU Kota Palembang dan Pengurus DPD PKS Kota Palembang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat meneliti ditempat tersebut.
8. Sahabat seperjuanganku (Hikma Darma, Aman Syaputra, Mei Wisnu, Jumiati) yang selalu memberikan motivasi dan menemani selama penelitian saya berlangsung.
9. Seluruh sahabat-sahabatku jurusan Politik Islam 2012, grup Drum Band BSM 2012 (Desi Antiamurni, S.Tr.Keb, Putri Aritama, S.E, Marliya Ulva, S.Psi, Riri Fitriani, S.Kep, Jannah Vella Arita, S.Pd) dan semua teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu-persatu dan tidak muatnya lembar kata pengantar ini, terima kasih telah memberikan motivasi dan contoh yang baik demi masa depan.

Akhir kata, penulis berharap kepada Allah SWT yang dapat membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu. Saya selaku penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan kata dan tata bahasa, karena semua yang benar hanyalah milik Allah SWT dan semua kesalahan terdapat pada hambanya. Semoga kita semua diberi taufik dan hidayah-Nya. Aamiin.

Palembang, 2017

Penulis,



Anggi Dwi Saputri  
NIM. 1544300004



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>xiv</b>
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	01
B. Rumusan Masalah .....	06
C. Batasan Masalah .....	07
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	07
E. Definisi Konseptual .....	08
F. Tinjauan Pustaka .....	12
G. Kerangka Teoritis.....	14
H. Metode Penelitian .....	20
I. Sistematika Penulisan .....	25

**BAB II : GAMBARAN UMUM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA  
PALEMBANG**

- A. Profil Kota Palembang ..... 27
- B. Profil Partai Keadilan Sejahtera ..... 29

**BAB III : ELEKTABILITAS PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PADA PEMILU  
LEGISLATIF KOTA PALEMBANG TAHUN 2014**

- A. Pemilu Legislatif Kota Palembang Tahun 2014 ..... 52
- B. Penyebab Menurunnya Perolehan Suara PKS Pada Pemilu Legislatif  
Kota Palembang Tahun 2014 ..... 61

**BAB IV : PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 85
- B. Saran ..... 86

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Majelis Pertimbangan Daerah PKS Kota Palembang .....	47
Tabel 2 : Dewan Syariah Daerah PKS Kota Palembang .....	47
Tabel 3 : Dewan Pengurus Daerah PKS Kota Palembang .....	47
Tabel 4 : Daftar Pemilih Tetap Pemilu Anggota Legislatif Kota Palembang .....	54
Tabel 5 : Perolehan Suara Partai Politik Pemilu Legislatif Kota Palembang .....	56
Tabel 6 : Perolehan Kursi Partai Politik Pemilu Legislatif Kota Palembang .....	59
Tabel 7 : Nama Anggota PKS yang terpilih di DPRD Kota Palembang 2014 .....	60

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Daftar Konsultasi Skripsi Pembimbing I dan II
- Lampiran 2 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Transkrip Wawancara dan Daftar Informan Wawancara
- Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Keterangan LULUS BTA & Tahfidz
- Lampiran 6 : Fotocopy Nilai Komprehensif
- Lampiran 7 : Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat PKS
- Lampiran 8 : Rekapitulasi Suara Partai Politik Pada Pemilu DPRD Kota Palembang  
Tahun 2014
- Lampiran 9 : Daftar Nama dan Jumlah Suara Sah Caleg Partai Keadilan Sejahtera  
Pada Pemilu DPRD Kota Palembang 2014
- Lampiran 10 : Dokumentasi

## INTISARI

Nama : Anggi Dwi Saputri

Program Studi : Politik Islam

Judul : **Elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu Legislatif Kota Palembang Tahun 2014**

Melihat hasil perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di Kota Palembang tahun 2014 mengalami penurunan, maka dalam penelitian ini penulis akan mengkaji masalah mengenai Bagaimana menurunnya perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014. Penelitian ini menggunakan teori strategi politik yang dikembangkan oleh Peter Schroder. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus serta berupaya mengungkapkan fenomena melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa penyebab menurunnya perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014 dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal partai. Faktor internal partai yaitu *pertama*, citra partai yang negatif. *Kedua*, keterlambatan partai dalam merumuskan strategi, *Ketiga*, adanya kelemahan-kelemahan partai/caleg PKS. *Keempat*, persaingan internal partai dan *Kelima*, faktor pendanaan. Sedangkan faktor eksternal partai yaitu *pertama*, masih banyak perilaku masyarakat kota Palembang yang bersifat pragmatis. *Kedua*, semakin luasnya praktek politik uang yang terjadi di masyarakat. *Ketiga*, besarnya pengaruh media massa sehingga berdampak kepada persepsi masyarakat pemilih. Partai Keadilan Sejahtera hendaknya lebih memantapkan strategi dalam pemilu, meningkatkan kualitas dan kinerja para kader maupun caleg dengan memberikan pelatihan tambahan di segala bidang terlebih dalam bidang politik dan motivasi untuk peningkatan elektabilitas caleg yang masih rendah serta melakukan konsolidasi partai secara terus menerus sehingga mesin partai tetap bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya.

Kata Kunci : **Elektabilitas, Partai Politik Islam, Pemilu**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara demokrasi; negara yang mengutamakan suara rakyat dalam mengambil keputusan.<sup>1</sup> Perbincangan mengenai demokrasi tidak dapat lepas dari partai politik. Karena kehadiran partai politik inilah yang akan mengisi kerangka kontestasi politik untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan. Salah satu bentuk kontestasi politik yang penting bagi setiap negara demokrasi adalah pemilihan umum. Sebab secara teoritis pemilihan umum untuk memilih badan legislatif merupakan penghubung yang sah antara rakyat dan pemerintah dalam suatu struktur masyarakat yang modern. Sebagaimana paham demokrasi yang dianut negara Indonesia bahwa kekuasaan ada ditangan rakyat. Hal ini mengindikasikan semua warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan sebuah negara dengan tujuan memajukan dan mensejahterakan warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>2</sup>

Sebagai upaya untuk mengaktualisasikan hak politik warga negara, perlu adanya partai politik. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan negara dan memiliki kekuatan politik yang besar dalam penentu terlaksananya sistem demokrasi di suatu negara serta perantara yang menghubungkan kekuatan-kekuatan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintah yang resmi. Selain itu, partai politik juga merupakan pilar yang sangat

---

<sup>1</sup>Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, & Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), h. 110

<sup>2</sup>Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, & Masyarakat Madani*, h. 111

penting untuk diperkuat pelembagaannya dalam setiap sistem politik yang demokratis. Bekerjanya fungsi kelembagaan negara sangat menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan suatu negara.<sup>3</sup> Akan tetapi, jika lembaga negara tidak berfungsi dengan baik dan kinerjanya tidak efektif, maka partai-partai politik yang rakus akan merajalela dan mengendalikan semua proses penyelenggaraan pemerintahan.

Kekuatan politik Indonesia merupakan suatu daya yang dimiliki oleh lembaga-lembaga di Indonesia dalam bidang politik. Kekuatan politik itu sendiri adalah aktor-aktor politik maupun lembaga-lembaga/partai politik yang memainkan peranan dalam kehidupan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan sebagai tongga perjuangan bagi pembangunan politik di Indonesia.<sup>4</sup>

Hadirnya partai politik ditengah-tengan masyarakat juga merupakan tujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang telah disusun sesuai ideologi tertentu. Untuk mewujudkan hal tersebut, partai politik harus mempunyai strategi politik. Strategi politik merupakan cara atau taktik yang dikelola oleh politisi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber kekuasaan, serta merumuskan dan melaksanakan keputusan politik sesuai yang diinginkan sehingga terwujudnya cita-cita politik.<sup>5</sup>

Berbicara partai politik, keberadaan dan elektabilitas partai Islam di Indonesia selalu menarik untuk ditelaah. Elektabilitas partai politik merupakan suatu tingkat keterpilihan partai politik di publik. Ketika pasca runtuhnya Orde Baru tahun 1998

---

<sup>3</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet.10 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2008), hlm. 397

<sup>4</sup>Ina Kencana Syafie dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 80

<sup>5</sup>Peter Schroder, *Strategi Politik*, (Jakarta: Friedich Naumann Stiftung Fuer Die Freiheit , 2008), h. 5

dengan beralihnya kepemimpinan Soeharto ke Presiden Habibie, membuka peluang kebebasan bagi kehidupan politik Indonesia dengan keluarnya keputusan Habibie untuk tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dan memperbolehkan mempergunakan asas Islam sebagai dasar partai. Kehidupan politik pun memasuki babak baru yang penuh gairah. Akibat dari kebijakan ini, bermunculanlah partai politik yang mengusung Islam sebagai asas politik, salah satunya adalah Partai Keadilan (PK).<sup>6</sup>

Partai Keadilan (PK) yang didirikan pada 20 Juli 1998 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Partai ini mengikuti pemilu pertama kali tahun 1999 dengan mendapatkan suara sekitar (1,36%). Sebagai partai baru, Partai Keadilan cukup mendapatkan dukungan yang baik dari masyarakat di tengah ketatnya persaingan politik dan banyaknya peserta pemilu yang ikut berkompetisi saat itu. Namun karena tersandung aturan *electoral threshold*, dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1999 pasal 39 tentang batas minimum keikutsertaan partai politik pada pemilu selanjutnya yang mensyaratkan bahwa bagi partai politik yang tidak mampu mendapatkan suara minimal 2% dari jumlah kursi DPR atau memiliki sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi DPRD pada pemilu 1999 maka kedepannya partai tersebut tidak boleh ikut berkompetisi dalam pemilu selanjutnya kecuali membentuk partai baru dengan cara meleburkan diri dengan partai lainnya ataupun mengubah lambang dan nama partai tersebut.<sup>7</sup> Dengan berlakunya Undang-

---

<sup>6</sup>Tim Penulis, *The Indonesian Institute Center For Public Policy Research*, (Jakarta: The Indonesian Institute, 2009), h.73

<sup>7</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Pasal 39 Tentang Syarat Keikutsertaan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum



Undang tersebut, segenap jajaran petinggi Partai Keadilan memilih alternatif dan melakukan berbagai proses dan tahapan yang cukup panjang, pada akhirnya partai ini bermetamorfosis menjadi “Partai Keadilan Sejahtera”.<sup>8</sup>

Pada 20 April 2002 (9 Jumadil ‘Ula 1423 H) di Jakarta, Partai Keadilan Sejahtera dideklarasikan dihadapan puluhan ribu kader dan simpatisan yang sebagian besar adalah kader-kader Partai Keadilan dan munculnya partai ini memberikan warna bagi pergerakan Islam politik di Indonesia.<sup>9</sup> Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai politik yang berasaskan Islam dan satu-satunya partai yang menyatakan dirinya sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai ummat dan bangsa.

Sebagai partai dakwah (*khuthuth ‘adridhah*), Partai Keadilan Sejahtera memiliki strategi tersendiri yang dinamai dengan *Grand Strategy* Dakwah, yang terdiri dari gerakan kultural (strategi mobilisasi horizontal/*ta’biah al afaqiyah*) yang dilakukan melalui penyebaran kader ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat baik melalui kader secara individu maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan, yayasan/ormas, dan berbagai lembaga/organisasi lainnya.<sup>10</sup> Dan gerakan struktural (strategi mobilitas vertikal/ *ta’biah al amudiyah*) yang merupakan penyebaran kader ke dalam lembaga pemerintahan dan lain-lain dalam kerangka melayani, membangun dan memimpin

---

<sup>8</sup>Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam : Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 222

<sup>9</sup>Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam : Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, h. 221

<sup>10</sup>Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Partai Keadilan Sejahtera, 2008), h. 37

bangsa, melalui mekanisme konstitusional sebagai partai politik yang ikut pemilu dan pembinaan profesionalisme kader.<sup>11</sup>

Dengan didukung oleh kader-kader yang memiliki jiwa solidaritas yang tinggi dan dukungan dari publik, Partai Keadilan Sejahtera termasuk salah satu partai Islam yang cukup diperhitungkan pada pemilu era reformasi dan mampu bersaing di dunia perpolitikan di Indonesia. Khususnya di kota Palembang sendiri, keberadaan dan elektabilitas suara Partai Keadilan Sejahtera juga cukup diperhitungkan. Terlihat pada pemilu Legislatif Kota Palembang tahun 2009, elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 45,980 (7.40%) suara dengan meraih 5 kursi dan menduduki posisi ke 4 dari 38 partai pesaing dan hanya 12 partai yang lolos untuk duduk di DPRD kota Palembang.<sup>12</sup>

Namun, pada pemilu legislatif 2014 menunjukkan bahwa elektabilitas suara partai berbasis Islam khususnya Partai Keadilan Sejahtera di DPRD kota Palembang dapat dikatakan lebih rendah atau menurun. PKS hanya memperoleh 42,965 (5,96%) suara dengan meraih 3 kursi dan menduduki posisi ke 10 dari 12 partai pesaing di DPRD kota Palembang. Dalam hal ini, Partai Keadilan Sejahtera tidak mendapatkan dukungan yang signifikan dan mengalami kemerosotan yang cukup drastis.<sup>13</sup>

Melihat fenomena demikian, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana menurunnya perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014. Dengan persaingan yang semakin ketat dan

---

<sup>11</sup>Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Partai Keadilan Sejahtera, 2008), h. 39

<sup>12</sup>Data diperoleh dari kantor KPU Kota Palembang, pada 23 Februari 2017, pukul : 10.00 WIB

<sup>13</sup>Data diperoleh dari kantor KPU Kota Palembang, pada 23 Februari 2017

mengingat partai tersebut juga memiliki basis massa yang cukup besar, tidak kalah dengan partai-partai besar lainnya yang lebih dulu berdiri serta daerah tersebut mayoritas penduduknya beragama Islam tetapi keberadaan dan elektabilitas partai politik Islam khususnya Partai Keadilan Sejahtera belum menjadi prioritas dalam menentukan keterwakilannya melalui pemilu.

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), alasannya karena dilihat dari anggaran dasar (AD BAB I pasal 2) partai PKS bahwa partai ini menggunakan asas atau ideologi partai yaitu asas Islam, karena Islam adalah *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Selain itu, partai ini memiliki keunikan tersendiri di mana partai yang dikenal sebagai partai dakwah/partai kader yang bermula dari gerakan dakwah kampus berbasis tarbiyah dengan kader-kader kelompok anak muda intelektual dan terdidik yang memiliki semangat tinggi dalam mempelajari, mengkaji, dan mengamalkan ajaran Islam.

Partai Keadilan Sejahtera juga merupakan partai Islam yang usianya masih terbilang baru dari partai-partai Islam lainnya tetapi partai ini sangat cepat menarik simpati masyarakat dan partai ini pun mampu bersaing dengan partai-partai Islam lainnya pada pemilu-pemilu yang diadakan khususnya di Kota Palembang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Menurunnya Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu Legislatif Kota Palembang Tahun 2014 ?

### **C. Batasan Masalah**

Suatu penelitian membutuhkan batasan masalah dengan tujuan untuk dapat menghasilkan uraian yang sistematis dan tidak melebar. Maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah strategi dan penyebab menurunnya elektabilitas suara Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu Legislatif kota Palembang tahun 2014.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penulis menguraikan tujuan dan beberapa kegunaan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Tujuan Penelitian

Mengetahui penyebab menurunnya perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu Legislatif kota Palembang tahun 2014.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Akademis, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Partai Keadilan Sejahtera.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi partai-partai politik Islam yang terkait dengan penyebab menurunnya perolehan suara partai dan sejauh mana keberadaan partai Islam khususnya Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu Legislatif 2014 ditengah mayoritas masyarakat muslim di kota Palembang.
- c. Penulis, suatu penelitian yang dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya, dapat menambah wawasan dan pengalaman baru yang nantinya dapat dijadikan modal dalam meningkatkan

proses belajar sesuai dengan disiplin ilmu penulis, terutama setelah terjun ke dunia politik.

### **E. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah penjelasan atas batasan-batasan antara konsep satu dengan konsep lain yang dipergunakan dalam sebuah penelitian agar dalam penelitian tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pengertian atau batasan-batasan istilah yang ada dalam pokok masalah penelitian. Definisi konsep dipergunakan untuk menjelaskan makna kata-kata yang tertera dalam judul, adapun batasan-batasan dari penelitian ini, antara lain:

**Pertama**, Elektabilitas. Secara umum, elektabilitas dikenal dengan keterpilihan. Dalam bahasa Inggris elektabilitas berasal dari kata “*electability* atau *elect*” yang berarti memilih. Bentuk-bentuk turunan dari kata *elect* antara lain *election*, *electable*, *elected*, *electiveness*, *electability*, dan sebagainya.<sup>14</sup> Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa maupun orang, badan atau lembaga. Dalam konteks politik, elektabilitas adalah tingkat keterpilihan suatu partai atau kandidat yang terkait dengan proses pemilihan umum. Jadi, dari pemilu inilah kita dapat melihat seberapa besar tingkat keterpilihan partai politik atau kandidat di publik.

**Kedua**, Partai Politik. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, partai adalah perkumpulan segolongan orang yang seasas, sehaluan, dan setujuan terutama di bidang politik atau perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu. Sedangkan politik, dapat diartikan sebagai pengetahuan mengenai

---

<sup>14</sup>Aditya Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Indonesia*, (Surabaya : Prima Media, 2004), h. 104

ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem dan dasar pemerintahan.<sup>15</sup> Secara umum partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut dukungan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan umum atau programnya.<sup>16</sup>

Menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>17</sup>

Menurut Sigmund Neumann dalam bukunya *Modern Political Parties* yang dikutip oleh Miriam Budiardjo, Partai politik merupakan organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai pemerintahan dengan merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.<sup>18</sup> Menurut Giovanni Sartori dalam bukunya *Party and Party Systems: A Framework for Analysis* yang dikutip oleh Damsar, partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan

---

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), h. 831-886

<sup>16</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, cet.10*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 403

<sup>17</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, h. 158

<sup>18</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, cet.10*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.404

umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan para calon–calonnya untuk duduk dalam legislatif dan pemerintahan.<sup>19</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir dan memiliki tujuan atas dasar kesamaan kehendak untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan baik pada level legislatif maupun eksekutif di pemerintahan sehingga dapat membangun dan memecahkan masalah-masalah suatu bangsa dan negara. Jika partai politik dikaitkan dengan Islam, dalam konteks ini, Islam merupakan agama yang sudah mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Dengan demikian, di Indonesia khususnya terdapat partai politik yang berbasis Islam atau disebut partai Islam.

**Ketiga**, Partai Politik Islam yaitu dapat dipahami sebagai organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dengan merujuk kepada partai politik yang menjadikan Islam sebagai dasar ideologinya dan menjadi pembeda antara partai satu dengan partai yang lainnya. Menurut Sudirman Tebba, untuk menyebut suatu partai politik itu partai Islam dapat dilihat dari beberapa karakter yaitu pencantuman Islam sebagai asas partai, penggunaan simbol-simbol yang identik atau secara dekat diasosiasikan dengan Islam, dan memiliki basis sosial utama dari kalangan Islam tertentu. Partai Islam juga ditandai oleh adanya personalia kepemimpinan partai yang didominasi oleh orang-orang yang berlatar belakang Islam yang kuat (santri).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 246

<sup>20</sup>Sudirman Tebba, *Islam Menuju Era Reformasi* (Yogya: PT. Tiara Wacana Yogya, 2001), h. 18

Jadi, partai politik Islam merupakan sekelompok orang yang berlatar belakang Islam yang memiliki tujuan yang sama berdasarkan ajaran-ajaran Islam dan sebagai wadah penyalur aspirasi seluruh masyarakat baik melalui pemilu atau tidak saat pemilu.

**Keempat**, Pemilihan Umum (Pemilu). Menurut UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pemilihan Umum disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>21</sup> Menurut Andrew Heywood dalam bukunya *Politics Is Exciting Because People Disagree* yang dikutip oleh Ikhsan Darmawan. Pemilihan umum merupakan mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercaya atau proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.<sup>22</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemilu merupakan suatu proses dalam sistem demokrasi untuk memilih para wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga pemerintahan.

---

<sup>21</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, h.185

<sup>22</sup>Ikhsan Darmawan, *Mengenal Ilmu Politik* (Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2015), h. 144



## F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan hal penting dari proposal penelitian ini, karena berfungsi untuk menjelaskan posisi masalah yang akan diteliti di antara penelitian yang pernah dilakukan penelitian lain agar tidak terjadi duplikasi (plagiat).<sup>23</sup> Oleh karena itu, peneliti melihat ada beberapa skripsi yang membahas mengenai partai Islam (Partai Keadilan Sejahtera) pada pemilu Legislatif, diantaranya adalah :

Skripsi yang ditulis oleh Pramudityo, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010 dengan judul “*Analisis Penurunan Suara Partai Persatuan Pembangunan Dan Kenaikan Suara Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2009 (Study Kasus Provinsi D. I. Yogyakarta )*”. Skripsi ini membahas tentang Yogyakarta adalah daerah yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Fakta ini, seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh partai-partai Islam dalam memperoleh suara mayoritas umat Islam di daerah ini. Dalam konteks ini, sebagai partai lama PPP tidak cukup mampu mengungguli perolehan suara PKS yang tergolong sebagai partai baru pada Pemilu 2009 di DIY. Teori yang digunakan dalam skripsi ini yaitu teori partai politik, partai politik Islam, pemasaran politik, manajemen kampanye, dan pemimpin.<sup>24</sup>

Disertasi yang ditulis oleh Arief Munandar, Program Studi Sosiologi, FISIP Universitas Indonesia, 2011 dengan judul “*Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera dalam Arena Politik Indonesia*

---

<sup>23</sup>Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*, (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora Iain Raden Fatah, 2013), h. 19

<sup>24</sup>Pramudityo, “Analisis Penurunan Suara Partai Persatuan Pembangunan Dan Kenaikan Suara Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2009 (Study Kasus Provinsi D. I. Yogyakarta ),” *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010)

*Pasca Pemilu 2004*”. Disertasi ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang mengidentifikasi pola pengelompokan/faksionalisasi yang ada di PKS, sekaligus menggambarkan bagaimana kelompok-kelompok/faksi-faksi tersebut bekerja dalam dinamika internal PKS, khususnya pasca Pemilu 2004. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar PKS melakukan demokratisasi, deoligarkisasi, dan desakralisasi organisasi untuk meningkatkan posisi objektifnya di arena politik Indonesia.

Penelitian yang ditulis oleh Nurman, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, 2005 dengan judul “*Strategi Partai Keadilan Sejahtera Kota Padang Dalam Memenangkan Pemilu Legislatif 2004*”. Penelitian ini membahas tentang strategi PKS khususnya terkait dengan strategi *segmentasi* yang berupa masyarakat perkotaan, pesisir pantai, daerah pertanian, kalangan muda terdidik, kaum perempuan. Dari segmentasi tersebut, partai PKS memilih kelompok muda terdidik sebagai *targeting* dalam pemasaran partainya. Dalam *positioning* PKS memosisikan dirinya sebagai partai kader, partai dakwah, dan reformis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu partai politik dan strategi politik.<sup>25</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Akhirul Aminulloh, Jurnal Ilmu Komunikasi, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang, 2010 dengan judul “*Komunikasi Politik Dakwah Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu Legislatif 2009*”. Jurnal ini membahas tentang PKS memenangkan pemilihan, PKS menggunakan strategi komunikasi politik dengan pendekatan komunikasi interpersonal, komunikasi publik,

---

<sup>25</sup>Nurman, “Strategi Partai Keadilan Sejahtera Kota Padang Dalam Memenangkan Pemilu Legislatif 2004”, *Penelitian*, (Padang: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, 2005)

dan komunikasi massa. Peran strategi komunikasi politik yang diterapkan sedikit berdampak signifikan terhadap suara partai. Hal ini dipengaruhi berbagai faktor, seperti jumlah politik uang yang dilakukan oleh pihak lain dan kebijakan populis pemerintah seperti pengurangan bahan bakar minyak dan bantuan langsung tunai. Jurnal ini menggunakan teori komunikasi politik, partai politik, dan pemilu.<sup>26</sup>

Setelah melihat hasil penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik membuat pernyataan posisi penelitiannya di antara penelitian-penelitian tersebut. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek dan lokasi penelitian. Objek penelitian ini di Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Palembang. Fokus penelitiannya yaitu mengenai Elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu Legislatif kota Palembang tahun 2014 yang membahas tentang penyebab menurunnya perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014. Teori yang digunakan adalah teori strategi politik.

### **G. Kerangka Teori**

Bagian ini merupakan unsur yang paling penting di dalam penelitian, karena pada bagian ini peneliti akan menjelaskan fenomena sosial yang sedang diamati dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan penelitiannya. Oleh karena itu, untuk membahas permasalahan mengenai Elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu Legislatif kota Palembang Tahun 2014, maka peneliti menggunakan teori Strategi Politik.

---

<sup>26</sup>Akhirul Aminulloh, "Komunikasi Politik Dakwah Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu legislatif 2009", *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol.8, No.1( Januari-April 2010), h. 26

Pengertian strategi pada umumnya berasal dari bidang militer, dan kata itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos* yang berarti komandan militer atau kepemimpinan atas pasukan.<sup>27</sup> Menurut kamus besar bahasa Indonesia, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.<sup>28</sup> Strategi juga dapat diartikan sebagai ilmu tentang teknik atau taktik, cara atau kiat muslihat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.

Menurut Karl von Clausewitz (1780-1831), strategi merupakan suatu seni yang menggunakan sarana pertempuran untuk mencapai tujuan perang. Sementara Marthin-Anderson (1968) merumuskan strategi adalah seni yang melibatkan kemampuan inteligensi atau pikiran untuk membawa semua sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang maksimal dan efisien.<sup>29</sup> Sedangkan politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu.<sup>30</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi politik adalah ilmu tentang teknik, taktik, cara, kiat yang dikelola oleh politisi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber kekuasaan, serta merumuskan dan melaksanakan keputusan politik sesuai yang diinginkan.

---

<sup>27</sup>Peter Schroder, *Strategi Politik*, (Jakarta: Friedich Naumann Stiftung Fuer Die Freiheit , 2008), h. 1

<sup>28</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), h. 1092

<sup>29</sup>Hafied Cangara, *Komunikasi Politik : Konsep, Teori, dan Strategi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 292

<sup>30</sup>Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia Widisuasarana, 1992), h. 10

Strategi politik sangat penting dan erat kaitannya dengan partai politik, karena tanpa adanya strategi politik perubahan jangka panjang sama sekali tidak akan dapat diwujudkan. Strategi yang dilakukan partai politik pada pemilu merupakan cara mempengaruhi dan merekrut individu-individu dalam masyarakat. Tujuan dari strategi itu sendiri yang paling utama adalah kemenangan. Dimana partai politik memfokuskan kemenangan dengan memperoleh suara terbanyak pada pemilu dan berhasil memenangkan setiap calon-calon yang diajukan partai.

Menurut Peter Schroder dalam bukunya yang berjudul Strategi Politik, bahwa strategi politik merupakan strategi atau taktik yang digunakan untuk mewujudkan suatu cita-cita politik. Contohnya adalah pemberlakuan peraturan baru, pembentukan suatu struktur baru dalam administrasi pemerintahan, atau dijalankan program deregulasi, privatisasi atau desentralisasi. Untuk itu, strategi politik sangat penting dalam perencanaan strategi baik penyusunan maupun pelaksanaan strategi sangat mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi itu pada akhirnya.<sup>31</sup>

Partai Keadilan Sejahtera sendiri, memiliki strategi khusus yang dinamai dengan *Grand Strategy* Dakwah, yang terdiri dari sebagai berikut :

1. Gerakan Kultural (strategi mobilisasi horizontal/*ta'biah al afaqiyah*).

Secara umum gerakan dapat diartikan sebagai tindakan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang disertai program terencana dan ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan

---

<sup>31</sup>Peter Schroder, *Strategi Politik*, (Jakarta: Friedich Naumann Stiftung Fuer Die Freiheit , 2008), h. 5-6

pola-pola dan lembaga-lembaga masyarakat yang ada.<sup>32</sup> Sedangkan Kultural berasal dari kata *culture*, yang berarti budaya. Budaya adalah karakteristik dan pengetahuan dari sekelompok orang tertentu, baik dari segi bahasa, agama, kebiasaan sosial, dan sebagainya. Istilah Perancis, Kultural (*colere*) dapat berarti tumbuh, budidaya, dan yang berkaitan dengan aktifitas pertumbuhan.<sup>33</sup>

Dalam konteks politik, gerakan kultural (budaya) adalah pola sikap, keyakinan dan perasaan tertentu yang mendasari, mengarahkan dan memberi arti kepada tingkah laku dan proses politik dalam sistem politik yang mencakup cita-cita politik.<sup>34</sup> Gerakan dakwah kultural adalah aktivitas dakwah yang menekankan pendekatan islam kultural. Gerakan dakwah kultural ini merupakan tindakan dakwah mengartikulasikan aspirasi rakyat terhadap kekuasaan.<sup>35</sup>

Dalam strategi dakwah, mobilisasi horizontal adalah penyebaran kader dakwah ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat untuk menyiapkan masyarakat agar mereka menerima manhaj Islam serta produk kebijakan yang Islami. Jadi, *Gerakan kultural* (strategi mobilisasi horizontal) adalah penyebaran kader ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat untuk menggerakkan peran serta masyarakat dalam mentransformasi diri sendiri. Dalam gerakan ini, baik kader secara individual maupun melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan, yayasan/ormas, dan berbagai lembaga/organisasi

---

<sup>32</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), h. 356

<sup>33</sup>Riza Pahlevi, *Kajian Dakwah Kultural*. (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2015), h. 33

<sup>34</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), h. 169

<sup>35</sup>Samsul Munir, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta : Amzah, 2009), h. 165

lainnya, melaksanakan pelayanan, penyuluhan dan perbaikan masyarakat secara *bottom up*.<sup>36</sup>

Kader Partai Keadilan Sejahtera akan bergerak bersama masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, kependudukan, kewanitaan, kemiskinan, dan sebagainya. Oleh karena itu, dibutuhkan dan harus ditumbuhkan kader-kader yang profesional dalam berbagai bidang kehidupan untuk dapat bergerak bersama masyarakat. Strategi yang terbangun merupakan bentuk kepercayaan atau mandat yang diberikan masyarakat kepada Partai Dakwah untuk selalu berjuang membela kepentingan masyarakat.<sup>37</sup>

## 2. Gerakan Struktural (strategi mobilitas vertikal/ *ta'biah al amudiyah*).

Gerakan struktural adalah gerakan dakwah yang berada pada kekuasaan. Gerakan dakwah struktural merupakan aktivitas Islam yang berusaha mewujudkan negara bangsa yang berdasarkan Islam.<sup>38</sup>

Dalam strategi dakwah, mobilisasi vertikal adalah penyebaran kader dakwah ke berbagai lembaga yang menjadi *mashadirul qarar* (pusat-pusat kebijakan), agar mereka dapat menterjemahkan konsep dan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan-kebijakan publik. Jadi, *Gerakan struktural* (strategi mobilitas vertikal/ *ta'biah al amudiyah*) adalah penyebaran kader ke dalam lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif dan sektor-sektor lain dalam kerangka melayani,

---

<sup>36</sup>Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Partai Keadilan Sejahtera, 2008), h. 37

<sup>37</sup>Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, h. 38

<sup>38</sup>Samsul Munir, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta : Amzah, 2009), h. 162-163

membangun dan memimpin bangsa, melalui mekanisme konstitusional sebagai partai politik yang ikut pemilu dan pembinaan profesionalisme kader. Tujuannya adalah untuk berkontribusi dalam membangun sistem, membuat kebijakan publik, regulasi dan perundangan yang secara struktural dan *top down* digunakan sebagai pedoman dalam rangka transformasi masyarakat. Gerakan ini sekaligus berpartisipasi dalam implementasi dan pengawasan pembangunan bangsa.<sup>39</sup>

Adapun mekanisme Partai Keadilan Sejahtera dalam menjangkau massa, suara atau merekrut kader-kader baru sehingga dapat memperluas jaringan di lingkungan masyarakat baik pada saat momentum pemilu atau tidak saat pemilu. Cara tersebut dilakukan melalui dua pola yaitu :

*Pertama*, rekrutmen individual (*al-da'wah al fardhiyyah*) yang merupakan pendekatan atau komunikasi secara langsung antara seorang kader dengan calon kader yang akan direkrut dan diajak berpartisipasi mengikuti serangkaian forum keagamaan yang diorganisir oleh Partai Keadilan Sejahtera, seperti *usrah* (keluarga) atau *liqo* (pertemuan mingguan) atau *halaqah* (kelompok studi terbatas), *rihlah* (rekreasi), *mukhayyam* (perkemahan), *daurah* (pelatihan intelektual dan workshop Islami), *nadwah* (seminar), dan lain-lain.<sup>40</sup>

*Kedua*, rekrutmen institusional/rekrutmen jama'i (*al da'wah al-'amma*) yang dilakukan secara kolektif baik secara formal (jalur kepartaian) yang bisa melibatkan struktur formal Partai Keadilan Sejahtera maupun informal (jalur tarbiyah)

---

<sup>39</sup>Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, h. 39

<sup>40</sup>Muhammad Adrian Perdana, "Kinerja Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tingkat Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Rumbai Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014", *Jurnal JOM FISIP* Vol. 3 No. 2 (Oktober 2016), h. 4



organisasi-organisasi sayap yang berafiliasi dengan Partai Keadilan Sejahtera dan bekerja sama dengan institusi-institusi keagamaan, seperti masjid, institusi pendidikan seperti sekolah dan universitas, dan kegiatan non formal misalnya majelis ta'lim, kegiatan ramadhan, bakti sosial, santunan, dan lain-lain.<sup>41</sup>

## H. Metode Penelitian

Metodelogi Penelitian adalah hasil pengkajian terhadap berbagai metode dan menjadi bahan pembentukan seperangkat pengetahuan yang digunakan untuk program dan kegiatan penelitian.<sup>42</sup> Metode penelitian juga dapat diartikan suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.<sup>43</sup>

Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menjelaskan tentang masalah yang akan diteliti kemudian diterjemahkan berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian. Metode kualitatif pada prinsipnya ingin mendeskripsikan atau menggambarkan serta memahami suatu fenomena dan kejadian (peristiwa) interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari dan menemukan makna (*meaning*) dalam konteks yang sesungguhnya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu peneliti menganalisa data-data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field research*) baik hasil wawancara maupun dokumentasi dan selanjutnya

---

<sup>41</sup>Sitti Rahmi AR, dkk., Strategi Komunikasi Politik Dalam Sistem Recruitmen Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wilayah Sulawesi Tenggara”, *e-Jurnal Publica PPS AP-UHO Vol .I No.1* (Januari 2016), h. 20-21

<sup>42</sup>Taliziduhu Ndraha, *Metodelogi Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 22-24

<sup>43</sup>Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*, (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora Iain Raden Fatah, 2013), h. 21

dijabarkan secara deskripsi.<sup>44</sup> Data penelitian ini didasarkan pada data verbal dan tidak menggunakan angka-angka kuantitatif untuk ditarik sebuah kesimpulan penelitian. Tujuannya adalah untuk mendeskriptifkan atau menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>45</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case studies*). Dimana pendekatan studi kasus merupakan suatu tipe penelitian yang mengkaji secara mendalam mengenai suatu unit seperti individu, kelompok, organisasi, peristiwa dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami dan mengerti secara efektif bagaimana objek itu beroperasi atau berfungsi dalam keadaan atau latar sosial yang sebenarnya.<sup>46</sup> Kemudian memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas serta menghasilkan data untuk selanjutnya di analisis sehingga menghasilkan kesimpulan.

---

<sup>44</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 338

<sup>45</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), h.72

<sup>46</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 339

## 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Jl. Mayor Santoso No. 2 Kamboja dan Sekretariat Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera Jl. Letnan Murod Km.5 Palembang, Sumatera Selatan. Alasan dipilihnya lokasi ini, karena ditempat inilah objek penelitian berada, sehingga memudahkan penulis untuk berinteraksi langsung dengan sumber-sumber data yang terkait dengan penelitian.

## 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari :

- a. Data Primer merupakan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Data primer merupakan data asli atau data yang tergolong baru dan mempunyai sifat up to date. Untuk memperoleh data primer ini, peneliti melakukan wawancara terhadap informan. Informan adalah orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan.
- b. Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya data yang diperoleh dari hasil telaah dokumen dan laporan-laporan yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian. Data ini baik berupa literature, jurnal, koran, majalah dan internet yang dianggap relevan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi (*Non-participation Observer*) yaitu suatu bentuk observasi di mana pengamat atau peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok atau dapat juga dikatakan pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamatinya.<sup>47</sup>
- b. Wawancara merupakan suatu proses interaksi secara tatap muka (*face to face*) dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan oleh peneliti. Wawancara (*interview*) dilakukan secara lebih terbuka dan mendalam.<sup>48</sup> Maksud dari *interview* ini adalah dengan mengumpulkan data melalui wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan ketua, wakil sekretaris, anggota, serta ketua tim advokasi/tim sukses pemilu Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera kota Palembang.
- c. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku, baik berbentuk tulisan, gambar, maupun foto<sup>49</sup> atau dokumen yang berkaitan dengan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilu Legislatif kota Palembang tahun 2014. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara ataupun observasi dalam penelitian kualitatif. Sehingga data tersebut dapat membantu dalam memecahkan suatu

---

<sup>47</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 384

<sup>48</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, h. 372

<sup>49</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, h. 391

permasalahan di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data yang telah terdokumentasikan dari data primer dan data sekunder yang telah disebutkan di atas sebagai sarana untuk mendapatkan data yang valid.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisir data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>50</sup>

Analisis data dilakukan secara mendalam untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti. Teknik analisis data tersebut menggunakan model Miles dan Huberman (1984) yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.<sup>51</sup>

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data) adalah data yang diperoleh dari lapangan direduksi yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema atau polanya, reduksi data dicari terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

---

<sup>50</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: alfabeta, 2010), h.

<sup>51</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 246-252

- b. *Data Display* (Penyajian Data) adalah penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, hubungan antara kategori, dengan teks yang bersifat naratif, grafik, matrik, network (jaringan kerja), chart dan sebagainya. Dalam mendisplay disusun secara urutan sehingga strukturnya dapat difahami dan memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.
- c. *Conclusion drawing/verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi) adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada dan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan ini, maka penulis menjelaskan dalam sistematika penulisan secara garis besar yang terdiri dari empat bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN. Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi konseptual, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA PALEMBANG. Bab ini membahas tentang profil Palembang dan profil Partai Keadilan Sejahtera yang meliputi sejarah, visi-misi, lambang, keanggotaan, dan struktur kepengurusan partai.

BAB III : ELEKTABILITAS PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PADA PEMILU LEGISLATIF KOTA PALEMBANG TAHUN 2014. Dalam bab ini penulis akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014. Data ini diperoleh melalui penelitian langsung (wawancara dan dokumentasi) dan studi pustaka. Kemudian menganalisis data tersebut dengan menggunakan teori strategi politik.

BAB IV : PENUTUP. Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA PALEMBANG**

#### **A. Profil Kota Palembang**

##### 1. Keadaan Geografi

Kota Palembang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan, terletak pada posisi antara 2052'-305' LS dan 104037'-104052' BT dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut. Luas wilayah Kota Palembang sebesar 40,061 km<sup>2</sup> atau sekitar 2,65% dari total luas daratan Provinsi Sumatera Selatan.<sup>52</sup>

Secara administrasi Kota Palembang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Banyuasin (Desa Pangkalan Benteng, Desa Gasing dan Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin).
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Banyuasin (Balai Makmur Kecamatan Banyuasin).
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Banyuasin (Desa Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Talang Kelapa).
- d. Sebelah Selatan : Kabupaten Ogan Ilir (Desa Bakung Kecamatan Indralaya) dan Kabupaten Muara Enim (Kecamatan Gelumbang).<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palembang Tahun 2014, (Palembang: Pemerintah Kota Palembang), h. 4

<sup>53</sup>Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palembang Tahun 2014, h. 5-6



## 2. Keadaan Demografi

### a. Penduduk

Jumlah Penduduk Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang periode 31 Desember 2014 sebanyak 1.736.551 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 882.216 jiwa dan perempuan sebanyak 854.335 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk di Tahun 2014 sebesar 4,3%.<sup>54</sup>

### b. Agama

Penduduk kota Palembang mayoritas memeluk agama islam. Melihat data Badan Pusat Statistik kota Palembang tahun 2014 yang beragama Islam berjumlah 1.585.176 jiwa dan beragama lain 151.375 jiwa. Islam (93,08%), Protestan (1,97%), Katolik (1,16%), Hindu (0,05%), Budha (3,41%), Kong Hu Cu (0,04%), dan lain-lain (0,28%).<sup>55</sup>

## 3. Kondisi Politik Kota Palembang

Pengetahuan politik di kota Palembang cukup berkembang pesat dengan dukungan sarana transportasi dan komunikasi serta teknologi yang canggih saat ini, sehingga masyarakat kota Palembang sendiri tidak canggung lagi dengan fenomena-fenomena yang berkembang, baik itu fenomena politik religion, nasional, bahkan internasional. Perkembangan partai politik di kota Palembang sudah mengikuti pemilu di tingkat nasional dan terdapat 12 partai politik yang ikut pemilu legislatif khususnya di kota Palembang.

---

<sup>54</sup>Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palembang Tahun 2014, (Palembang: Pemerintah Kota Palembang), h. 9

<sup>55</sup>Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Palembang tahun 2014, diakses pada 24 Januari 2017, pukul: 11.50 WIB

## B. Profil Partai Keadilan Sejahtera

### 1. Sejarah Lahirnya Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera lahir dari gerakan *Tarbiyah*. Gerakan *Tarbiyah* sendiri awalnya lebih berfokus sebagai gerakan dakwah yang muncul di awal 1980-an di era Orde Baru. Gerakan ini dibawa oleh para alumni pemuda Indonesia yang belajar di Perguruan Tinggi Agama Islam di Timur Tengah dan merupakan hasil dari interaksi mereka dengan ideologi Ikhwanul Muslimin di Mesir yang didirikan oleh Hasan Al-Banna.<sup>56</sup>

Tokoh-tokoh pelopor gerakan Ikhwanul Muslimin di Indonesia yaitu Hilmi Aminuddin, Salim Segaf Al-Jufri, Abdullah Said Baharmus, dan Acep Abdul Syukur. Gerakan *tarbiyah* sendiri mengambil basis gerakannya di masjid-masjid Universitas di Indonesia. Tokoh yang memelopori gerakan *tarbiyah* di kampus dan merupakan tokoh dari DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia) yaitu Ir. Imamuddin Abdul Rahim yang memprakarsai pola pengkaderan model Ikhwanul Muslimin yang dikenal dengan *usrah/halaqah/liqo'at*. Gerakan ini berawal dari Masjid Salman ITB (Institut Teknologi Bandung) yang kemudian menyebar ke universitas lainnya.<sup>57</sup>

Pada era orde baru, Gerakan *Tarbiyah* bisa difahami sebagai alternatif dari berbagai gerakan Islam saat itu. Perlu diingat bahwa penguasa orde baru saat itu melakukan represi (hambatan) terhadap aktivitas umat Islam dalam bidang politik.

---

<sup>56</sup>Febrian Taufiq Sholeh, "Manhaj *Tarbiyah* dalam Pendidikan Politik Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS)", *Jurnal Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang* Vol.18 No. 1 (Juni 2015), h.61

<sup>57</sup>Rangga Eka Saputra, "Dinamika Internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS)", *skripsi* (Jakarta: FISIP, UIN Syarif Hidayatullah, 2014), h. 38

Dibubarkannya Masyumi tahun 1970 merupakan bukti bahwa rezim orde baru tidak mengizinkan Islam secara politik tampil ke publik yang berpotensi menjadi lawan pemerintah. Kemudian diterapkannya asas tunggal Pancasila sebagai landasan dari semua organisasi yang ada saat itu, yang mengakibatkan sebagian dari umat Islam mengalami penindasan dan tekanan politik yang kuat.<sup>58</sup>

Jatuhnya rezim orde baru di bawah pimpinan Soeharto dan beralih ke era reformasi, dengan menguatnya tuntutan rakyat yang menghendaki perubahan disegala bidang kehidupan terutama kehidupan politik yang mensyaratkan kebebasan rakyat untuk mendapatkan hak politiknya yang selama ini telah terkerdikan oleh kekuasaan otoriter pemerintahan orde baru. Maka, membuka peluang bagi Gerakan Tarbiyah untuk memperjuangkan dan mengekspresikan idealisme dan cita-cita gerakan mereka keruang publik. Hal ini dibuktikan dengan munculnya partai baru yaitu Partai Keadilan (PK).

Partai Keadilan (PK) merupakan sebuah partai politik berasaskan Islam di Indonesia.<sup>59</sup> Partai Keadilan (PK) didirikan pada 20 juli 1998 dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il. Pada 20 Oktober 1999 Partai Keadilan menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il (saat itu presiden partai) sebagai calon menteri. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan

---

<sup>58</sup>Febrian Taufiq Sholeh, "Manhaj Tarbiyah dalam Pendidikan Politik Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS)", *Jurnal Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang* Vol.18 No. 1 (Juni 2015), h.60

<sup>59</sup>Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera Bab I Pasal 2, h.2

oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000. Pada 3 Agustus 2000 Delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al-Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945.<sup>60</sup>

Dengan dinyatakan lolos verifikasi, Partai Keadilan (PK) pertama kali ikut dalam pemilu tahun 1999 dan meraih 1,36% suara, dengan menduduki peringkat ke 7 dari 48 partai peserta pemilu. Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan partai politik pada pemilu selanjutnya (*electoral threshold*) yaitu 2%, maka Partai Keadilan harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali pada pemilu berikutnya.<sup>61</sup> Dengan berbagai proses dan tahapan pada akhirnya partai ini bermetamorfosis menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pada hari Sabtu, 20 April 2002 (9 Jumadil ‘Ula 1423 H) di Jakarta,<sup>62</sup> Partai Keadilan Sejahtera dideklarasikan dihadapan puluhan ribu kader dan simpatisan yang sebagian besar adalah kader-kader Partai Keadilan dan munculnya partai ini memberikan warna bagi pergerakan Islam politik di Indonesia. Partai ini didirikan oleh sekelompok anak bangsa yang memiliki cita-cita luhur untuk menegakkan keadilan dan mensejahterakan masyarakat. Partai ini merupakan partai satu-satunya yang menyatakan dirinya sebagai “Partai Dakwah” sebagai penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai ummat dan bangsa.

---

<sup>60</sup>Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam : Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 221

<sup>61</sup>Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam : Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, h. 222

<sup>62</sup>Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera Bab I Pasal 1, h.2

Perubahan ini ternyata membawa sukses besar bagi PKS yang meraih simpati publik atas usaha dan kerja keras pendahulunya, PKS berhasil membangun citra positif di mata publik dengan mengalirnya dukungan luas dari publik terhadap PKS. Pemilu 2004 menjadi lompatan *electoral* bagi PKS yang menempatkannya tidak lagi sebagai partai gurem tetapi kini telah bergeser menjadi partai tengah yang kekuatannya layak untuk diperhitungkan. Pada pemilu 2004 PKS berhasil menempatkan 45 orang kadernya sebagai wakil rakyat di DPR dengan perolehan 7.34% suara. Pada pemilu 2009, PKS berhasil memperoleh 7,9% suara dengan meraih 57 kursi di DPR.<sup>63</sup> Dan pemilu 2014, PKS memperoleh 6,79% suara dengan meraih 40 kursi di DPR.

Pada Pemilu 2004, Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang sedang menjabat) kemudian terpilih sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009 dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26 – 29 Mei 2005 di Jakarta, Tifatul Sembiring terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2005-2010. Seperti Nurmahmudi Isma'il dan Hidayat Nur Wahid disaat Tifatul Sembiring dipercaya oleh Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Indonesia ke 6 sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Maka estafet kepemimpinan pun berpindah ke Luthfi Hasan Ishaq sebagai pjs Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro PKS II pada 16 –

---

<sup>63</sup>Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam : Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 223-224

20 Juni 2010 di Jakarta, Luthfi Hasan Ishaq terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2010-2015.<sup>64</sup>

Pendukung utama Partai Keadilan Sejahtera sebagian besar dari kalangan aktivis dakwah yang selama ini berkecimpung dalam dunia dakwah kampus dan sekolah dengan keunikannya tersendiri berupa kombinasi kaum muda, islam, terdidik sehingga menjadi suatu kemewahan bagi partai dakwah ini. Sayap politik Partai Keadilan Sejahtera yaitu KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) sebagai sayap muda partai ini. Gerakan Tarbiyah menjadi pengajarannya. Dengan Sayyid Qutb dan Yusuf Qordhowi yang menjadi panutannya. Partai Keadilan Sejahtera juga menjadikan Lembaga Dakwah Kampus sebagai sumber rekrutmen kader.<sup>65</sup>

## 2. Deskripsi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Palembang

Partai Keadilan Sejahtera adalah salah satu partai Islam yang masih eksis di Indonesia khususnya di kota Palembang sampai saat ini. Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera di kota Palembang sendiri, sama halnya dengan PKS secara umum yang merupakan partai lanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang lahir pada era reformasi tahun 1998. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK

---

<sup>64</sup>Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam : Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 222

<sup>65</sup>Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam : Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, h. 226

menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Partai ini adalah salah satu partai yang menggunakan asas Islam sebagai asas partainya dan partai yang menyatakan dirinya sebagai partai dakwah serta dikenal juga sebagai partai kader yang mempunyai militansi dan loyalitas kader yang kuat.

Untuk pengurus PKS di tingkat daerah kabupaten/kota disebut DPD (Dewan Pengurus Daerah). Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera kota Palembang berlokasi di Jalan Letnan Murod Kecamatan Ilir Timur I Km.5 Palembang, Sumatera Selatan. Terbentuknya Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera kota Palembang yaitu sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi umat Islam khususnya dan seluruh masyarakat di kota Palembang. Adapun Ketua Umum DPD PKS kota Palembang saat ini adalah M. Ridwan Saiman, SH, MH.<sup>66</sup>

### 3. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera

**Visi** Partai Keadilan Sejahtera adalah “*Terwujudnya Masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat*”. Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong-royong menjaga kedaulatan Negara. Pengertian genuin dari masyarakat madani itu perlu dipadukan dengan konteks masyarakat Indonesia di masa kini yang merealisasikan Ukhuwwah Islamiyyah (ikatan keislaman), Ukhuwwah (kemanusiaan), dalam bingkai NKRI.

---

<sup>66</sup>M. Ridwan Saiman (Ketua Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera), *Wawancara*, 6 Maret 2017

Adil adalah kondisi dimana entitas dan kualitas kehidupan baik pembangunan politik, ekonomi, hukum, dan sosial-budaya ditempatkan secara proporsional dalam ukuran yang pas dan seimbang, tidak melewati batas. Itulah sikap moderat, suatu keseimbangan yang terhindar dari jebakan dua kutub ekstrem: mengurangi dan melebihi (ifraath dan tafrith).

Sejahtera secara standar berarti aman dan makmur. Aman adalah situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa takut, secara psikis sejahtera, sedangkan makmur adalah situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa lapar, secara fisik sejahtera.

Bermartabat menuntut bangsa Indonesia untuk menempatkan dirinya sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang mampu menampilkan dirinya, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun budaya secara elegan sehingga memunculkan penghormatan dan kekaguman dari bangsa lain. Martabat muncul dari akhlak dan budi pekerti yang baik, mentalitas, etos kerja dan akhirnya bermuara pada produktivitas dan kreativitas. Kreativitas bangsa yang tinggi dapat mewujudkan dalam karya-karya adiluhung dalam berbagai bidang yang tak ternilai. Dari sana muncul rasa bangga pada diri sendiri dan penghormatan dari bangsa lain. Martabat memunculkan rasa percaya diri yang memungkinkan kita berdiri sama tegak, dan tidak didikte oleh bangsa lain.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Partai Keadilan Sejahtera, 2008), h. 1



**Misi** yang diemban Partai Keadilan Sejahtera adalah :

- a. Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas.

Melanjutkan reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional, untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien. Penegakan hukum yang diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif. Mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan industri pertahanan nasional.

Mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembagalembaga kenegaraan di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Menegaskan kembali sikap bebas dan aktif dalam mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap martabat

kemanusiaan. Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya.<sup>68</sup>

- b. Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, melalui strategi pemerataan pendapatan, pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan pembangunan berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan produktifitas sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan; peningkatan daya saing industri nasional dgn pendalaman struktur & upgrading kemampuan teknologi; dan pembangunan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis resources & knowledge. Semua itu dilaksanakan di atas landasan (filosofi) ekonomi egaliter yang akan menjamin kesetaraan atau valuasi yang sederajat antara (pemilik) modal dan (pelaku) usaha, dan menjamin pembatasan tindakan spekulasi, monopoli, dan segala bentuk kriminalitas ekonomi yang dilakukan oleh penguasa modal dan sumber-sumber ekonomi lain untuk menjamin terciptanya kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha.<sup>69</sup>
- c. Menuju pendidikan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu untuk menumbuhkan SDM yang berdaya-saing tinggi serta guru yang professional dan sejahtera. Menuju sehat paripurna untuk semua, dengan visi sehat badan, mental-spiritual, dan

---

<sup>68</sup>Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Partai Keadilan Sejahtera, 2008), h. 2

<sup>69</sup>Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, h. 3

sosial sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT untuk membangun bangsa dan negara; dengan mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas. Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan relijius sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh, berdisiplin kuat, beretos kerja kokoh, serta berdaya inovasi dan berkeaktivitas tinggi. Terciptanya masyarakat sejahtera, melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat mewartahi dan membantu proses pembangunan yang kontinue.<sup>70</sup>

#### 4. Lambang Partai Keadilan Sejahtera



Tafsir lambang :

- a. Kotak persegi panjang melambangkan kesetaraan, keteraturan dan keserasian.
- b. Ka'bah melambangkan pusat peradaban dunia Islam.
- c. Bulan sabit melambangkan kemenangan Islam, dimensi waktu, keindahan, kebahagiaan, pencerahan dan kesinambungan sejarah.

---

<sup>70</sup>Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Partai Keadilan Sejahtera, 2008), h. 4

- d. Untaian 17 butir padi tegak lurus yang artinya Keadilan, Ukhuwah, Istiqomah, berani, dan ketegasan yang mewujudkan kesejahteraan.
- e. Warna putih melambangkan bersih, kesucian dan mulia.
- f. Hitam melambangkan aspiratif, kepastian, dan akomodatif.
- g. Kuning emas melambangkan kecemerlangan, kegembiraan dan kejayaan.<sup>71</sup>

Makna lambang Partai Keadilan Sejahtera secara keseluruhan yaitu: “menegakkan nilai-nilai keadilan berlandaskan pada kebenaran, persaudaraan dan persatuan menuju kesejahteraan dan kejayaan ummat dan bangsa”.

#### 5. Piagam Deklarasi Partai Keadilan Sejahtera

Bangsa Indonesia telah menjalani sebuah sejarah panjang yang sangat menentukan dalam waktu lebih dari lima dekade ini dengan sebuah perjuangan yang berat dan kritis. Setelah lepas dari penjajahan Belanda dan Jepang selama tiga setengah abad, Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Kebangkitan ini berjalan hingga tahun 1959 ketika upaya untuk membangun bangsa yang demokratis dan sejahtera mengalami kebuntuan dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandai awal diktatorisme di Indonesia. Orde Baru muncul pada tahun 1966 tetapi ternyata hanya merupakan sebuah perpanjangan tangan kekuasaan militer yang benih-benihnya sudah mulai bersemi pada masa Orde Lama.

---

<sup>71</sup>Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera Bab I Pasal 1, h. 18

Pada tanggal 21 Mei 1998 bangsa Indonesia mengukir kembali harapannya untuk hidup dalam suasana yang mampu memberi harapan ke depan dengan digulirkannya Reformasi Nasional yang didorong oleh perjuangan mahasiswa dan rakyat. Reformasi Nasional pada hakekatnya adalah sebuah kelanjutan dari upaya mencapai kemerdekaan, keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dari perjuangan panjang yang telah ditempuh selama berabad-abad.

Demokratisasi menjadi tulang punggung perjuangan tersebut yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam keseluruhan aspeknya. Bertolak dari kesadaran tersebut, dibentuklah sebuah partai politik yang akan menjadi wahana dakwah untuk mewujudkan cita-cita universal dan menyalurkan aspirasi politik kaum muslimin khususnya beserta seluruh lapisan masyarakat Indonesia umumnya. Partai tersebut bernama Partai Keadilan Sejahtera. Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan inayah-Nya kepada kita, mengikatkan hati diantara para pengikut agama-Nya dan menolong perjuangan mereka dimana pun mereka berada. Amin.<sup>72</sup>

Jakarta, 20 April 2002

Atas Nama Pendiri Partai Keadilan Sejahtera

(Drs. Almuzzmil Yusuf)

Ketua Umum

(Drs. Haryo Setyoko)

Skertaris Jenderal

---

<sup>72</sup><http://sumsel.pks.id/profil/piagam-deklarasi/>, diakses pada 9 Februari 2017, pukul : 14.00 WIB

#### 6. Kegiatan DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang

Partai Keadilan Sejahtera memiliki kegiatan rutin setiap 2 kali dalam 1 minggu yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Adapun berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh kader partai PKS, diantaranya melakukan pengajian di majelis ta'lim maupun aktifis kampus, kemudian melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pembinaan masyarakat yang berbentuk kuliner. Karena kader-kader perempuan di partai PKS banyak yang memiliki kemampuan di bidang usaha seperti usaha pempek, tempe, susu kedelai dan lain-lain. Partai Keadilan Sejahtera tidak hanya semata-mata mengajarkan politik saja melainkan diajarkan untuk membangun perekonomian keluarga. Pada tanggal 23 Maret 2017 di Hotel Aston Palembang, Partai Keadilan Sejahtera mengadakan perkumpulan para pengusaha kader-kader PKS se Indonesia. Mereka dikumpulkan berdasarkan kemampuan di bidangnya masing-masing. Para kader yang sudah mempunyai usaha, mereka berusaha untuk membantu kader-kader lain yang ingin membuka peluang bisnis.<sup>73</sup>

#### 7. Jenjang Keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera adalah partai kader, dimana inti dari kekuatan partai ini berasal dari para kader-kadernya. Sesuai dengan AD-ART PKS Bab IV pasal 9 yaitu, setiap warga Negara Indonesia dapat menjadi anggota partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan republik Indonesia yang berlaku. Sistem

---

<sup>73</sup>M. Ridwan Saiman (Ketua Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera), *Wawancara*, 6 Maret 2017

kaderisasi pada PKS berjenjang sesuai dengan tingkat kualitas dan loyalitas kadernya, adapun tingkatannya adalah :

- a. Anggota kader pendukung/terbina adalah mereka yang terlibat aktif mendukung setiap kegiatan kepartaian, yang terdiri :
  - 1) Kader Pemula, yaitu mereka yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota partai dan terdaftar dalam keanggotaan partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS setelah lulus mengikuti Training Orientasi Partai.
  - 2) Kader Muda, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan telah lulus pada pelatihan kepartaian tingkat dasar pertama.
- b. Anggota kader inti adalah anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan kepartaian.
  - 1) Kader Madya, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh DPD dan telah lulus pada pelatihan kepartaian tingkat dasar kedua.
  - 2) Kader Dewasa, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan telah lulus pada pelatihan kepartaian tingkat lanjut.
  - 3) Kader Ahli, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan telah lulus pada pelatihan kepartaian tingkat tinggi.

- 4) Kader Purna, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh DPP dan telah lulus pada pelatihan Kepartaian tingkat ahli.
- c. Kader Kehormatan, yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.<sup>74</sup>

Untuk ditetapkan sebagai calon tokoh yang akan mengisi jabatan politik maupun jabatan struktural partai, seorang kader harus melewati proses pelatihan dan pengembangan kader secara formal. Adapun jenis-jenis pelatihan kepartaian dan pengembangan kader di Partai Keadilan Sejahtera yaitu :

*Training Orientasi Partai (TOP) 1* yaitu para calon anggota partai diberikan pemahaman awal mengenai struktur kepartaian, sejarah serta eksistensi sepanjang perjalanan PKS. Setelah mengikuti TOP 1 ini, anggota partai secara resmi menyangandang status sebagai *anggota pemula terdaftar*, yang juga dapat segera memiliki kartu anggota partai. Dalam tahap selanjutnya, seorang yang telah lulus dalam TOP 1 ini akan dibina dalam forum yang lebih intim lagi, yakni melalui Taklim Rutin Partai (TRP) yang formatnya merupakan pengajian rutin, serta pendalaman materi-materi keIslaman yang kelak dipimpin oleh seorang *murabbi* (guru).

*Training Orientasi Partai (TOP) 2* yaitu seorang anggota pemula terdaftar yang telah cukup mumpuni dan layak bagi *murabbi* akan direkomendasikan untuk mengikuti jenjang pengkaderan selanjutnya. Peserta yang telah melalui jenjang

---

<sup>74</sup>Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera Bab IV Pasal 9, h. 3-4



pengkaderan TOP 2 ini berhak menyandang status sebagai *anggota pemula terbina* yang memiliki kewajiban untuk mengikuti beberapa serangkaian kegiatan tambahan partai, yakni Taklim Rutin Kader (TRK), Pelatihan-Pelatihan Kepartaian (PPK), serta Kegiatan Internal Partai (KIA).

*Training Dasar (TD) 1, dan TD 2.* Prasyarat untuk dapat menjalankan TD 1, seorang anggota pemula harus telah mendapatkan sebuah keterangan berupa Surat Kelulusan Anggota Pemula/Kartu Tanda Anggota Pemula (SKAP/KTAP). Bagi anggota pemula yang dinyatakan lulus dalam TD 1, maka statusnya berubah menjadi seorang *anggota muda*. Kegiatan anggota muda lainnya, selain TRK, PPK, dan KIA, yakni mengikuti Kajian Ilmu Sosial Politik 1 (KISP 1). Setelah dinyatakan cukup kompeten oleh *murabbi* untuk menjalani jenjang pengkaderan berikutnya, yakni TD 2. Maka seorang anggota muda akan kembali direkomendasikan sang *murabbi* untuk menjalani TD 2. Lulusan dari TD 2 ini akan menyandang predikat *anggota madya*.

*Training Lanjutan (TL) 1* yaitu seorang anggota madya yang telah lulus dalam TL 1 berhak mendapatkan status baru, yakni sebagai *anggota dewasa*. Setelah dinyatakan lulus dan menyandang gelar anggota dewasa, maka alur pengkaderan selanjutnya yakni menjalani Training Lanjutan (TL) 2. Seorang yang tengah, dan telah dinyatakan lulus dari TL 2 ini akan memperoleh gelar sebagai *anggota ahli*.

Selanjutnya alur pengkaderan tertinggi di PKS, adalah Training Manajemen dan Kepemimpinan Sosial (TMKS). TMKS dapat diikuti oleh seorang anggota ahli yang hendak menaikan jenjang keanggotaannya di PKS menjadi seorang anggota purna. Selain anggota purna yang merupakan jenjang pengkaderan tertinggi di PKS, ada juga status anggota kehormatan yang dapat diperoleh tanpa melalui proses kaderisasi. Anggota kehormatan ini dapat disematkan oleh pengurus partai kepada seorang kader yang dirasa telah memiliki sumbangsih besar, serta figur ketokohnya yang dianggap dapat dijadikan panutan dalam tubuh internal partai.<sup>75</sup>

Melalui proses pengkaderan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kader yang memiliki karakter, mental, pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dilandasi oleh iman dan taqwa yang diwujudkan dalam perilaku dengan dasar moralitas agama. Secara spesifik pengkaderan PKS bertujuan untuk memberikan pemahaman Islam kepada anggotanya ; rneningkatkan kualitas jati diri, intelektualitas, profesionalisme, kesungguhan, kemampuan antisipasi ke masa depan dan kepekaan sosial serta kepemimpinan yang berwibawa ; memperkokoh komitmen PKS terhadap negara, wawasan kebangsaan yang dilandasi iman dan taqwa ; mempertebal mental ke-juangan dan mewujudkan reformasi total menuju masyarakat Indonesia baru ; meningkatkan semangat berkorban, rasa tanggungjawab dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat secara keseluruhan ; dan membangun kader secara berkesinambungan.

---

<sup>75</sup>Linggar Kharisma Suseno, "Pola Afiliasi Informal Organisasi Gerakan Mahasiswa Dengan Partai Politik", *artikel* Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas FISIP, Universitas Diponegoro, h. 12-15

8. Struktur Organisasi Partai Keadilan Sejahtera
  - a. Struktur organisasi partai di tingkat pusat, yaitu Majelis Syura, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, Dewan Syariat Pusat.
  - b. Struktur organisasi partai di tingkat provinsi, yaitu Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Syariat Wilayah.
  - c. Struktur organisasi partai di tingkat kabupaten/kota yaitu Dewan Pengurus Daerah (DPD)
  - d. Struktur organisasi partai di tingkat kecamatan yaitu Dewan Pengurus Cabang (DPC)
  - e. Struktur organisasi partai di tingkat kelurahan/desa yaitu Dewan Pengurus Ranting (DPRa)
  - f. Selain struktur organisasi di atas, partai membentuk unit pembinaan dan pengkaderan anggota.<sup>76</sup>
9. Struktur Organisasi Partai Keadilan Sejahtera di Kota Palembang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang, jumlah seluruh kader PKS Kota Palembang sebanyak 2413 orang yang terdiri dari 707 laki-laki dan 1706 perempuan. Jumlah seluruh pengurus di Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang periode 2015-2020 sebanyak 121 pengurus, diantaranya anggota pengurus Majelis Pertimbangan Daerah yang berjumlah 6 orang, pengurus Dewan Syariah Daerah berjumlah 7

---

<sup>76</sup>Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera Bab VI Pasal 13, h. 5

orang, dan Dewan Pengurus Daerah berjumlah 109 orang dengan 7 biro dan 12 bidang di Partai Keadilan Sejahtera.<sup>77</sup> 16 DPC sudah terbentuk dengan baik sementara struktur DPRa belum terbentuk.<sup>78</sup>

**Tabel. 1**  
**Majelis Pertimbangan Daerah (MPD)**

NO	NAMA	AMANAHAH (JABATAN)
1	Subagio Rachmad Sentosa, SH	Ketua
2	H. M. Anwar Al Syadat, S.Si	Sekretaris
3	A. Hamzah Ramadhan	Komisi Organisasi Dan Kewilayahan
4	A.M Ikhsan, S.Ag, M.Ag	Komisi Pendidikan Dan Kebudayaan
5	Azzam Hardi	Komisi Kebijakan Publik
6	H. Hariyanto, SH, M.Hum	Komisi Kajian Strategis

Sumber: SK-DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang Periode 2015-2020

**Tabel. 2**  
**Dewan Syariah Daerah (DSD)**

NO	NAMA	AMANAHAH (JABATAN)
1	Musliman, S.Ag	Ketua
2	Indra Jaya, S.Ag	Sekretaris
3	Yahya Noprizal, Lc, Mpl	Lajnah Hisbah
4	Januar Doniansa, Lc	Lajnah Bayan Dan Fatwa
5	Amin Rahman, Lc	Lajnah Tadrib
6	H. Andi Sanjaya, Lc	Lajnah Keumatan
7	Sobarna, Lc	Lajnah Dirosat Dan Buhuts

Sumber: SK-DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang Periode 2015-2020

**Tabel. 3**  
**Dewan Pengurus Daerah (DPD)<sup>79</sup>**

NO	NAMA	AMANAHAH (JABATAN)
1	M. Ridwan Saiman, SH, MH	Ketua Umum
2	Hj. Yulfa Cindo Sari, A.Md	Wakil Ketua Umum

<sup>77</sup>M. Ridwan Saiman (Ketua Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera), *Wawancara*, 6 Maret 2017

<sup>78</sup>Laporan Kerja DPD PKS Kota Palembang periode 2010-2014

<sup>79</sup>Data diperoleh dari kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang, 6 Maret 2017

3	Jumono, ST	Sekretaris Umum
4	Darussalam, SH	Wakil Sekretaris Umum
5	Wais Al Qurni, ST	Biro Organisasi, Kinerja Dan Administrasi
6	Willy Cauza, ST	Biro It, Wilayah Data Dan Layanan Informasi
7	Leo Antrayopi, S.Pd	Biro Personalia Dan Kerumahtanggaan
8	Yuliadi, SP	Biro Protokol Dan Team Support Ketua Umum
9	Eka Erfanie, S.Si	Bendahara Umum
10	Hasbi, SE	Wakil Bendahara Umum
11	A. Ipit Hakim, SE	Biro Akuntansi Dan Keuangan
12	Ahmad Al Fatih, SE	Biro Pengelolaan Aset
13	Lilik Kurniawan, A.Md	Biro Sosial Dan Kesejahteraan Anggota
14	Amril Sudiono, ST	Ketua <i>Bidang Kaderisasi</i>
15	Yopi Irawan, SE	Sekretaris Bidang Kaderisasi
16	Wisnu Ardiyanto, S.TP	Anggota Bidang Kaderisasi
17	Irfan Budi Kustanto, S.Psi	Anggota Bidang Kaderisasi
18	Haidar Kamil, SE	Anggota Bidang Kaderisasi
19	Yudha	Anggota Bidang Kaderisasi
20	A. Halla	Anggota Bidang Kaderisasi
21	Julihardi, S.T	Ketua <i>Bidang Pemberdayaan Sdm &amp; Lembaga Profesi</i>
22	Muhammad Jalal	Sekretaris Bidang Pemberdayaan Sdm & Lembaga Profesi
23	drg. Dani Aerosta	Anggota Bidang Pemberdayaan Sdm & Lembaga Profesi
24	Abu Nada, ST	Anggota Bidang Pemberdayaan Sdm & Lembaga Profesi
25	dr. Dian Renuati	Anggota Bidang Pemberdayaan Sdm & Lembaga Profesi
26	Muhammad Jasa, S.Pd	Ketua <i>Bidang Kepemudaan</i>
27	Amran Marhamid, S.Pd.I	Sekretaris Bidang Kepemudaan
28	Ahmad Riyadi, ST	Bagian Kepeloporan Mahasiswa
29	Junaidi, S.Kep, Ners	Bagian Kepeloporan Mahasiswa
30	Fathan, S.Si	Bagian Pembinaan Tunas Bangsa

31	Mgs. Ronald Rizki	Bagian Pembinaan Tunas Bangsa
32	Reni Andriyani	Bagian Pembinaan Tunas Bangsa
33	Rosalina	Bagian Pembinaan Tunas Bangsa
34	Syawal	Bagian Pemuda Religi
35	A. Affan Zaidan, S.Kom	Bagian Pemuda Kreatif Dan Seni Budaya
36	Andriko, ST	Bagian Pemuda Kreatif Dan Seni Budaya
37	Ahmad Kamil	Bagian Pemuda Kreatif Dan Seni Budaya
38	Nani Syahriani, S.Si	Bagian Pemuda Kreatif Dan Seni Budaya
39	Ahmad Wafa, SP	Ketua <i>Bidang Kepanduan &amp; Olahraga</i>
40	Pangki Pramono	Sekretaris Bidang Kepanduan & Olahraga
41	Ifik Ismudjati	Anggota Bidang Kepanduan & Olahraga
42	Ahmad Sukri, S.Pd	Anggota Bidang Kepanduan & Olahraga
43	Sulis	Anggota Bidang Kepanduan & Olahraga
44	Dedi Kurniawan	Anggota Bidang Kepanduan & Olahraga
45	Eva Susanti	Anggota Bidang Kepanduan & Olahraga
46	Indra Gunawan	Anggota Bidang Kepanduan & Olahraga
47	Dwi Yanni Suswati, ST	Ketua <i>Bidang Perempuan &amp; Ketahanan Keluarga</i>
48	Lestari Hidayati, S.Pd	Sekretaris 1 Bidang Perempuan & Ketahanan Keluarga
49	Hani'atus Solikhah, M.Pd	Sekretaris 2 Bidang Perempuan & Ketahanan Keluarga
50	Fitri Damayanti, SE	Bagian Perempuan
51	Tinah Rusmiati, S.Pd	Bagian Perempuan
52	Asuswati	Bagian Perempuan
53	Lilik Kusdiantari, SP	Bagian Ketahanan Keluarga
54	Tanzimah, M.Pd	Bagian Ketahanan Keluarga
55	Beti Meileni, S.Pd	Bagian Ketahanan Keluarga
56	Yuyun Wirdasari, S.Si	Bagian Ketahanan Keluarga
57	Sita Holipah, S.P	Bagian Kajian Perempuan, Keluarga Dan Anak
58	Fitri Rahmi, Lc	Bagian Kajian Perempuan, Keluarga Dan Anak

59	Ellda, S.Pd	Bagian Kajian Perempuan, Keluarga Dan Anak
60	Hidayani, S.Pd	Bagian Hubungan Lembaga Perempuan
61	Fatmawati, A.Md	Bagian Hubungan Lembaga Perempuan
62	Mery Hartati, A.Md	Bagian Hubungan Lembaga Perempuan
63	Irpan Sanjaya, ST	Ketua <i>Bidang Pemenangan Pemilu Dan Pemilukada</i>
64	Awiruddin, S.Pd	Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Is Pemilukada
65	Sulton Amna, ST, MT	Anggota Bidang Pemenangan Pemilu Bid Pemilukada
66	Faisal, S.Si	Anggota Bidang Pemenangan Pemilu Bid Pemilukada
67	Yanwar Rusman, ST	Anggota Bidang Pemenangan Pemilu Bid Pemilukada
68	Enny Hidajati, SS, MM	Anggota Bidang Pemenangan Pemilu Bid Pemilukada
69	Misrakandi, S.Pd, M.Si	Anggota Bidang Pemenangan Pemilu Bid Pemilukada
70	A. Zafa	Anggota Bidang Pemenangan Pemilu Bid Pemilukada
71	Iskandar	Anggota Bidang Pemenangan Pemilu Bid Pemilukada
72	Irwan Syahputra, SP	Ketua <i>Bidang Hubungan Masyarakat</i>
73	Willy Causa, ST	Sekretaris Bidang Hubungan Masyarakat
74	Salman Alfarisi	Anggota Bidang Hubungan Masyarakat
75	Bobby Sofyan, SH., M.Kn	Ketua <i>Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan</i>
76	Sayuti Rambang, SH	Sekretaris Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan
77	Else Suhaimi, SH	Anggota Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan
78	Admansyah	Anggota Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan
79	Alip Dian Pratama	Anggota Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan
80	Aang Fitriyansyah	Anggota Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan
81	H. M. Taufik Saiman, S.Ag	Ketua <i>Bidang Pembangunan Keumatan Dan Dakwah</i>
82	H. M. Rasyid Redho Pratama, Lc, MESY	Sekretaris Bidang Pembangunan Keumatan Dan Dakwah
83	Supriyadi, SS	Anggota Bidang Pembangunan Keumatan Dakwah
84	Kusworo Nursiddiq, Lc	Anggota Bidang Pembangunan Keumatan Dakwah
85	Eliya	Anggota Bidang Pembangunan Keumatan Dakwah
86	Salamunnah, S.Th.I	Anggota Bidang Pembangunan Keumatan Dakwah

87	Ilham Noval	Anggota Bidang Pembangunan Keumatan Dakwah
88	Mohammad Iqbal, SE	Ketua <i>Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>
89	Dadang Patrajaya	Sekretaris Bidang Sesejahteraan Rakyat
90	Budi Santoso	Anggota Bidang Sesejahteraan Rakyat
91	Sulthoni	Anggota Bidang Sesejahteraan Rakyat
92	Busro Iskandar	Anggota Bidang Sesejahteraan Rakyat
93	Sulikah	Anggota Bidang Sesejahteraan Rakyat
94	Supriyadi, S.Pd	Anggota Bidang Sesejahteraan Rakyat
95	Dimin Trihandini	Anggota Bidang Sesejahteraan Rakyat
96	H. Dian Eko Prasetyio, S.Kom	Ketua <i>Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha Dan Ekonomi Kader</i>
97	Deni Triyono, ST	Sekretaris Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha Dan Ekonomi Kader
98	Anton Junaidi	Bagian Data Dan Informasi Jaringan Usaha Kader
99	Reza Novaron, ST	Bagian Data Dan Informasi Jaringan Usaha Kader
100	Kartini	Baian Diklat
101	Rahmi Hidayati	Baian Diklat
102	Heri Santoso	Bagian Pemberdayaan Jaringan Usaha Dan Ekonomi
103	Muhammad Hibbani	Bagian Pemberdayaan Jaringan Usaha Dan Ekonomi
104	Hardiansyah, SP	Bagian Pemberdayaan Jaringan Usaha Dan Ekonomi
105	Ahmad Hafidz	Ketua <i>Bidang Pekerja, Petani Dan Nelayan</i>
106	Yusuf Romadi	Sekretaris Bidang Pekerja, Petani Dan Nelayan
107	D Putro	Anggota Bidang Pekerja, Petani Dan Nelayan
108	Abu Fauzan	Anggota Bidang Pekerja, Petani Dan Nelayan
109	Mulyadi, ST	Anggota Bidang Pekerja, Petani Dan Nelayan

Sumber: SK-DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang periode 2015-2020



**BAB III**  
**ELEKTABILITAS PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**  
**PADA PEMILU LEGISLATIF KOTA PALEMBANG TAHUN 2014**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian berupa data-data yang ditemukan secara langsung, baik melalui wawancara maupun dokumentasi atau catatan-catatan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut :

**A. Pemilu Legislatif Kota Palembang Tahun 2014**

Pada dasarnya, pemilu yang dilakukan di kota Palembang merupakan salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih para wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga pemerintahan dan salah satu bentuk yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban warga negara di bidang politik. Menurut Ikhsan Darmawan pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang maupun partai yang dipercaya atau proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.<sup>80</sup> Jadi, pemilu adalah suatu proses pemilihan wakil-wakil rakyat baik berupa caleg/partai politik yang dipilih oleh rakyat untuk duduk di lembaga pemerintahan.

Dalam ilmu politik, sistem pemilu pada prinsipnya dibagi menjadi dua yaitu sistem distrik yang merupakan satu daerah pemilihan memilih satu wakil (*single member constituency*). Dan sistem proporsional yang merupakan satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil (*multi member constituency*).<sup>81</sup> Pada perkembangannya, sistem pemilu di Indonesia khususnya di kota Palembang, menganut sistem pemilu proporsional dengan berbagai variasi. Untuk sistem pemilu 2014 berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>80</sup>Ikhsan Darmawan, *Mengenal Ilmu Politik* (Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2015), h. 144

<sup>81</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet.10 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2008), hlm. 461

(MK) No. 22-24/PUU-VI/2008 atas pengujian UU No. 10 tahun 2008 tentang pemilu anggota legislatif, sepakat memilih sistem proporsional terbuka (*proporsional open half list system*). Dimana rakyat/pemilih diberikan pilihan secara langsung kepada calon yang dipilih dan pemenang pemilu ditentukan oleh suara terbanyak bukan nomor urut.<sup>82</sup>

Hal ini merupakan esensi dalam sistem demokrasi sehingga dengan sistem ini rakyat akan merasa terwakili dan kedaulatannya tersalurkan. Di kota Palembang sendiri, pemilu merupakan proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali, baik untuk memilih anggota eksekutif maupun untuk memilih anggota legislatif. Anggota legislatif yang dipilih terdiri dari DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pada pemilu legislatif DPRD kota Palembang tahun 2014, KPU telah meloloskan 12 partai politik yang dianggap layak mengikuti pemilu. Seperti yang diungkapkan oleh Kasubag Hukum KPU kota Palembang, ada 12 partai politik yang bersaing untuk menguasai perolehan suara di kota Palembang, diantaranya terdiri dari 7 partai nasional dan 5 partai Islam. Jumlah partai yang bersaing pada pemilu legislatif tahun 2014 di kota Palembang tidak sebanyak pemilu sebelumnya yang berjumlah 38 partai termasuk PKS.<sup>83</sup> Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa dengan jumlah partai tersebut justru membuat persaingan partai politik semakin sengit dan mengingat Palembang adalah salah satu kota besar dengan jumlah penduduk sebanyak 1.736.551 jiwa.<sup>84</sup>

Tetapi tidak semua penduduk tersebut dapat mengikuti pemilu legislatif kota Palembang. Sesuai dengan ketentuan mengatur jalannya Pemilihan Umum, maka

---

<sup>82</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota Legislatif

<sup>83</sup>Chemi Martin Punggar (Kasubag Hukum KPU kota Palembang), *Wawancara*, 23 Februari 2017

<sup>84</sup>Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Palembang tahun 2014, diakses pada 24 Januari 2017, pukul: 11.50 WIB

masyarakat yang telah berhak menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum yaitu masyarakat yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Warga yang memilih adalah yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah didaftarkan oleh KPU Kota Palembang. Berikut tabel Daftar Pemilih Tetap Pemilu Legislatif pada daerah Kota Palembang tahun 2014.

**Tabel. 4**  
**Daftar Pemilih Tetap Pemilu Anggota Legislatif Kota Palembang Tahun 2014<sup>85</sup>**

NO URUT	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
	<b>DAPIL 1</b>	<b>17</b>	<b>676</b>	<b>112.582</b>	<b>115.061</b>	<b>227.643</b>
1	Sukarami	7	308	52.083	52.950	105.033
2	Kemuning	6	189	30.395	31.245	61.640
3	Alang-Alang Lebar	4	179	30.104	30.866	60.970
	<b>DAPIL 2</b>	<b>13</b>	<b>517</b>	<b>86.166</b>	<b>85.687</b>	<b>171.853</b>
4	Sako	4	189	31.335	31.726	63.061
5	Kalidoni	5	245	40.980	40.953	81.933
6	Sematang Borang	4	83	13.851	13.008	26.859
	<b>DAPIL 3</b>	<b>14</b>	<b>402</b>	<b>65.214</b>	<b>66.160</b>	<b>131.374</b>
7	Plaju	7	198	30.402	31.022	61.424
8	Seberang Ulu II	7	204	34.812	35.138	69.950
	<b>DAPIL 4</b>	<b>16</b>	<b>567</b>	<b>91.403</b>	<b>92.306</b>	<b>183.709</b>
9	Kertapati	6	204	30.724	31.013	61.737
10	Seberang Ulu I	10	363	60.679	61.293	121.972
	<b>DAPIL 5</b>	<b>24</b>	<b>672</b>	<b>110.568</b>	<b>113.428</b>	<b>223.996</b>
11	Iilir Barat I	6	289	48.661	50.178	98.839
12	Iilir Barat II	7	146	24.718	24.998	49.716
13	Bukit Kecil	6	101	15.765	16.812	32.577
14	Gandus	5	136	21.424	21.440	42.864
	<b>DAPIL 6</b>	<b>23</b>	<b>560</b>	<b>88.386</b>	<b>92.151</b>	<b>180.537</b>
15	Iilir Timur I	11	172	27.559	29.508	57.067
16	Iilir Timur II	12	388	60.827	62.643	123.470
	<b>Jumlah</b>	<b>107</b>	<b>3.394</b>	<b>554.319</b>	<b>564.793</b>	<b>1.119.112</b>

Sumber : KPU Kota Palembang

<sup>85</sup>Data diperoleh dari kantor KPU Kota Palembang, pada 23 Februari 2017

Berdasarkan tabel di atas, pada pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014 terdapat 6 dapil, 16 kecamatan, 107 desa/kelurahan, 3.394 TPS, dan Daftar Pemilih Tetap berjumlah 1.119.112 orang, yang terdiri dari 554.319 laki-laki dan 564.793 perempuan. Jumlah DPT terbanyak berdasarkan dapil yaitu berada di dapil 1 berjumlah 227.643 orang terdiri dari 112.582 laki-laki, 115.061 perempuan dan yang sedikit berada di dapil 3 berjumlah 131.374 orang terdiri dari 65.214 laki-laki, 66.160 perempuan. Berdasarkan kecamatan, yang paling banyak berada di kecamatan Ilir Timur II berjumlah 123.470 orang terdiri dari 60.827 laki-laki, 62.643 perempuan dan sedikit di Sematang Borang berjumlah 26.859 orang terdiri dari 13.851 laki-laki, 13.008 perempuan.

Jumlah desa/kelurahan terbanyak berdasarkan dapil yaitu berada di dapil 6 berjumlah 23 kelurahan dan sedikit di dapil 2 berjumlah 13 kelurahan. Berdasarkan kecamatan yang paling banyak di kecamatan Ilir Timur II berjumlah 12 kelurahan dan sedikit di kecamatan Alang-Alang Lebar, Sako, Sematang Boring masing-masing berjumlah 4 kelurahan. Jumlah TPS terbanyak berdasarkan dapil yaitu dapil 1 berjumlah 676 TPS dan sedikit di dapil 3 berjumlah 402 TPS. Berdasarkan kecamatan yang paling banyak berada di kecamatan Ilir Timur II berjumlah 388 TPS dan sedikit 83 TPS. Dengan demikian, masyarakat yang telah terdaftar di DPT dapat ikut serta dalam memilih calon atau partai politik yang dipercayai.

Partai politik adalah kelompok politik yang ikut serta dalam pemilu dan mampu menempatkan para calon-calonnya untuk duduk di lembaga pemerintahan.<sup>86</sup> Di Indonesia khususnya di kota Palembang sendiri, ada partai politik yang disebut partai nasionalis dan

---

<sup>86</sup>Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 246

partai Islam. Pada pemilu 2014, partai yang berideologi nasionalis terdiri dari PDI-P, Demokrat, Gerindra, Golkar, Nasdem, Hanura, PKPI dan partai berideologi Islam terdiri dari PPP, PKS, PBB serta partai yang berbasis massa Islam yaitu PKB dan PAN. Partai-partai ini merupakan kontestan yang akan mengisi jabatan-jabatan di pemerintahan melalui pemilu. Adapun hasil perolehan partai politik pada pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014 yaitu sebagai berikut :

*1. Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Legislatif kota Palembang tahun 2014*

Hasil perolehan suara partai politik pada pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014 merupakan acuan bagaimana mengetahui basis partai politik yang berada di kota Palembang selama periode tersebut dan seberapa besar perolehan suara partai Islam khususnya Partai Keadilan Sejahtera sebagai fokus dari penelitian ini.

**Tabel. 5**  
**Perolehan Suara Partai Politik Pemilu Legislatif Kota Palembang Tahun 2014<sup>87</sup>**

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH						JUMLAH SUARA SAH	%
		Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6		
1	Nasdem	11.639	9.807	4.333	14.392	14.337	9.851	64.359	8,93%
2	PKB	10.721	5.577	10.070	11.591	9.512	10.376	57.847	8,03%
<b>3</b>	<b>PKS</b>	<b>9.009</b>	<b>7.321</b>	<b>7.376</b>	<b>4.802</b>	<b>9.458</b>	<b>4.989</b>	<b>42.965</b>	<b>5,96%</b>
4	PDI-P	27.058	20.830	8.247	16.098	27.784	20.183	120.200	16,68%
5	Golkar	14.200	7.602	8.252	11.937	13.497	10.296	65.784	9,13%
6	Gerindra	15.395	12.417	8.242	10.992	13.870	17.770	79.187	10,99%
7	Demokrat	17.784	15.377	8.432	13.951	25.376	10.060	91.990	12,76%
8	PAN	8.348	6.790	8.102	14.126	10.330	5.490	53.186	7,38%
9	PPP	5.234	6.343	7.673	11.433	6.415	7.698	44.796	6,21%
10	Hanura	10.493	6.349	9.002	7.614	5.889	7.247	46.594	6,47%
11	PBB	7.488	7.826	10.776	6.274	4.510	3.931	40.805	5,66%
12	PKPI	1.685	3.237	1.095	3.363	1.357	2.254	12.992	1,80%
	<b>Jumlah</b>	<b>139.556</b>	<b>110.476</b>	<b>91.500</b>	<b>126.583</b>	<b>142.345</b>	<b>110.145</b>	<b>720.705</b>	100%

Sumber : KPU Kota Palembang

<sup>87</sup>Data diperoleh dari kantor KPU Kota Palembang, pada 23 Februari 2017

Berdasarkan hasil perolehan suara sah partai politik di atas, jika diurutkan dari besarnya perolehan suara yang dicapai oleh masing-masing partai yaitu PDI-P (120.200) suara, Partai Demokrat (91.990) suara, Partai Gerindra (79.187) suara, Partai Golkar (65.784) suara, Partai Nasdem (64.359) suara, PKB (57.847) suara, PAN (53.186) suara, Partai Hanura (46.594) suara, PPP (44.796) suara, **PKS** (42.965) suara, PBB (40.805) suara, PKPI (12.992) suara. Untuk PKS sendiri, berdasarkan dapil perolehan suara PKS terbanyak terdapat di dapil 5 (9.458) suara dan yang paling sedikit terdapat di dapil 4 (4.802) suara.

Jika dilihat dalam konteks hasil perolehan partai politik pada pemilu Legislatif DPRD Kota Palembang tahun 2014, partai politik berideologi nasionalis jauh lebih dominan dari pada partai politik berideologi Islam. Seperti yang dikemukakan oleh Kasubag Hukum KPU kota Palembang, setiap pemilu yang diadakan di kota Palembang basis partai nasional selalu mendulang suara lebih unggul dibandingkan partai Islam. Untuk PKS sendiri, pada pemilu legislatif 2014 menduduki posisi ke 10 dari 12 partai pesaing. Berbeda dengan pemilu di tahun 2009, ada 38 partai pesaing dan PKS menduduki posisi ke 4 dari 12 partai yang lolos duduk di DPRD kota Palembang.<sup>88</sup>

Adapun hasil perolehan suara partai yang lolos duduk di DPRD kota Palembang pada pemilu 2009 yaitu Partai Demokrat 116.179 (18,72%) suara, PDI-P 78.970 (12,72%) suara, Partai Golkar 74.128 (11,94%) suara, **PKS** 45.980 (7,40%) suara, Partai Gerindra 33.370 (5,37%) suara, Partai Hanura 30.808 (4,96%) suara, PPP 23.677 (3,81%)

---

<sup>88</sup>Chemi Martin Punggar (Kasubag Hukum KPU kota Palembang), *Wawancara*, 23 Februari 2017

suara, PAN 21.391 (3,44%) suara, PKB 18.341 (2,95%) suara, PBR 16.039 (2,58%) suara, PPRN 13.765 (2,21%) suara, Partai Barnas 12.123 (1,95%) suara, dst.<sup>89</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemilu legislatif 2014 partai PKS tidak mendapatkan suara yang maksimal dan mengalami kemerosotan yang cukup drastis. Seperti yang diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya kota Palembang adalah beragama Islam, namun kerap kali partai Islam belum menjadi dominan dalam setiap pemilu yang diadakan. Hal itu memberi dampak aspirasi dari masyarakat yang notabene mayoritas beragama Islam kurang tersalurkan dan kebijakan-kebijakan serta produk hukum yang dihasilkan akan jauh dari nilai-nilai keIslaman. Begitu juga anggota partai Islam yang mewakili untuk duduk di lembaga legislatif pun masih sedikit.

## *2. Perolehan Kursi Partai Politik Pada Pemilu Legislatif Kota Palembang tahun 2014*

Lembaga legislatif adalah lembaga perwakilan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah baik di tingkat pusat (DPR) maupun di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota (DPRD). Lembaga ini terdiri atas anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu). Untuk memilih anggota legislatif tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

---

<sup>89</sup>Data diperoleh dari kantor KPU Kota Palembang, 23 Februari 2017

**Tabel. 6**  
**Perolehan Kursi Partai Politik Pemilu Legislatif Kota Palembang Tahun 2014<sup>90</sup>**

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI						JUMLAH KURSI	%
		Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6		
1	Nasdem	1	1	-	1	1	1	5	10%
2	PKB	1	-	1	1	1	1	5	10%
3	<b>PKS</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>6%</b>
4	PDI-P	2	2	1	1	2	1	9	18%
5	Golkar	1	1	1	1	1	1	5	10%
6	Gerindra	1	1	-	1	1	1	5	10%
7	Demokrat	1	1	1	1	2	1	7	14%
8	PAN	1	-	-	1	1	-	3	6%
9	PPP	-	-	-	1	-	1	2	4%
10	Hanura	1	-	1	-	-	1	3	6%
11	PBB	-	1	1	-	-	-	2	4%
12	PKPI	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber : KPU Kota Palembang

Berdasarkan hasil perolehan kursi partai politik di atas, jika diurutkan sesuai banyaknya perolehan kursi yang dicapai masing-masing partai yaitu PDI-P (9 kursi), Partai Demokrat (7 kursi), Partai Gerindra (5 kursi), Partai Golkar (5 kursi), Partai Nasdem (5 kursi), PKB (5 kursi), PAN (3 kursi), Partai Hanura (3 kursi), **PKS** (3 kursi), PPP (2 kursi), PBB (2 kursi), PKPI (-). Untuk perolehan kursi dari partai PKS yang terpilih menjadi anggota DPRD kota Palembang tahun 2014 ada 3 orang dari 50 calon yang diajukan dan menduduki posisi ke 9 dari 12 partai yang memperoleh kursi.

Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Sekretaris DPD PKS kota Palembang, pada pemilu legislatif 2014 PKS mengajukan 50 calon anggota dewan yang terdiri dari 33 laki-laki dan 17 perempuan. Partai menargetkan 10 calon anggota untuk dapat duduk di DPRD kota Palembang, tetapi yang terpilih ada 3 orang dan semuanya dari kader PKS.

<sup>90</sup>Data diperoleh dari kantor KPU Kota Palembang, 23 Februari 2017



Lain halnya pada pemilu 2009, yang terpilih ada 5 orang dan semuanya juga dari kader PKS.<sup>91</sup> Adapun hasil perolehan kursi partai yang lolos duduk di DPRD kota Palembang pada pemilu 2009 yaitu Partai Demokrat 11 kursi, PDI-P 7 kursi, Partai Golkar 7 kursi, **PKS** 5 kursi, Partai Gerindra 5 kursi, Partai Hanura 5 kursi, PPP 3 kursi, PAN 2 kursi, PKB 2 kursi, PBR 1 kursi, PPRN 1 kursi, Partai Barnas 1 kursi.<sup>92</sup>

Perlu diketahui bahwa PKS adalah salah satu partai politik yang berideologi Islam dan satu-satunya partai kader murni yang ada di Indonesia. Dimana kadernya yang duduk di kursi DPR maupun DPRD merupakan kader asli binaan PKS yang telah melalui proses panjang dalam jenjang kaderisasi PKS. Adapun nama anggota PKS yang terpilih duduk di DPRD kota Palembang tahun 2014, yaitu sebagai berikut :

**Tabel. 7**  
**Nama Anggota Partai Keadilan Sejahtera yang terpilih di DPRD Kota Palembang Tahun 2014<sup>93</sup>**

NO	DAPII	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	JABATAN
1	I (Sukarami, Kemuning, Alang-Alang Lebar)	8	H.M.Anwar Al Syadat, S.Si	1.595	Anggota Komisi 3
2	II (Sako, Kalidoni, Sematang Borang)	1	Subagio R Santoso, SH	1.408	Anggota Komisi 4
3	V (Iilir Barat I, Iilir Barat II, Bukti Kecil, Gandus)	1	Adi Apriliansyah, SE	2.370	Anggota Komisi 2

*Sumber : KPU Kota Palembang*

Dengan demikian, dari hasil pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014 yang telah dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa elektabilitas suara Partai Keadilan Sejahtera dapat dikatakan lebih rendah/menurun. Maka dari itu, penulis akan memaparkan apa yang menyebabkan menurunnya/rendahnya perolehan suara PKS pada pemilu 2014.

<sup>91</sup>Darussalam (Wakil Sekretaris Umum DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 23 Februari 2017

<sup>92</sup>Data diperoleh dari kantor KPU Kota Palembang, 23 Februari 2017

<sup>93</sup>Data diperoleh dari kantor KPU Kota Palembang, 23 Februari 2017

## **B. Penyebab Menurunnya Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu Legislatif Kota Palembang Tahun 2014**

Dalam penelitian ini hal yang menjadi krusial disebabkan oleh beberapa faktor yaitu dapat dilihat dari sisi internal dan eksternal partai.

### **1. Faktor Internal**

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam partai itu sendiri.

#### **a. Strategi Partai Keadilan Sejahtera**

Dalam konteks ini, setiap partai politik pasti memiliki strategi karena strategi politik merupakan cara yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang dalam rangka mewujudkan cita-cita politik. Untuk itu, PKS memiliki strategi tersendiri dalam menjaring massa, suara atau merekrut kader-kader barunya baik dilakukan saat pemilu atau tidak saat pemilu.

Strategi ini dilakukan melalui dua cara yaitu pertama, penyebaran kader ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat baik melalui kader secara individu maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan dan yayasan/ormas lainnya. Kedua, penyebaran kader ke dalam lembaga pemerintahan dan lainnya.<sup>94</sup> Seperti yang diungkapkan oleh Ketua DPD PKS kota Palembang :

*“Sebagai partai dakwah, kader-kader PKS selalu melakukan pengrekrutan kader dan sosialisasi ke masyarakat, baik melalui gerakan kultural seperti melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan di majelis taklim, pengajian-pengajian, dan sebagainya. Begitu juga dengan gerakan struktural yang sifatnya formal (jalur kepartaian). Alhamdulillah kegiatan merekrut kader ini pada pemilu kemarin berjalan dengan baik.”<sup>95</sup>*

---

<sup>94</sup>Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Partai Keadilan Sejahtera, 2008), h. 37-39

<sup>95</sup>M. Ridwan Saiman (Ketua DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 6 Maret 2017

Senada dengan yang dikatakan oleh Tim Advokasi DPD PKS kota Palembang :

*“Strategi yang dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat, PKS melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk pelatihan-pelatihan, pertemuan mingguan, maupun kegiatan keagamaan melalui majelis taklim, tablik akbar, kajian-kajian dan juga mengadakan bakti sosial bahkan kegiatan seperti ini di PKS tidak hanya dilakukan pada saat pemilu, karena bagi PKS hal itu merupakan konsekuensi sebagai partai dakwah.”<sup>96</sup>*

Melalui kedua ungkapan di atas, dapat dianalisa bahwa strategi dakwah merupakan suatu proses komunikasi dan sosialisasi bagi PKS untuk mengajak dan menyampaikan sesuatu yang baik kepada masyarakat baik dilakukan saat pemilu atau tidak pemilu. Dakwah ini bisa dilakukan oleh struktur partai maupun kader-kader PKS secara individu, baik melalui kegiatan formal seperti pengkaderan terhadap anggotanya maupun kegiatan informal melalui forum-forum keagamaan seperti *liqo* (pertemuan mingguan) atau *halaqah* (kelompok studi terbatas), *daurah* (pelatihan intelektual), *nadwah* (seminar), majelis ta’lim, dan lain-lain.

Selain itu, pada pemilu 2014 PKS juga melakukan strategi politik dalam bentuk pelayanan masyarakat. Seperti yang diutarakan oleh Ketua DPD PKS kota Palembang :

*“Strategi Politik PKS lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat, membangun komunikasi dan sosialisasi dengan masyarakat, serta kita juga siap menerima dan membuktikan diri sebagai partai yang siap bekerja untuk rakyat dan mendengar apa masukan-masukan dari masyarakat. Pada pemilu yang lalu, kita juga menggunakan jargon cinta, kerja, dan harmoni sebagai strategi partai.”<sup>97</sup>*

---

<sup>96</sup>Aulia Rahman (Tim Advokasi DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 12 April 2017

<sup>97</sup>M. Ridwan Saiman (Ketua DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 6 Maret 2017

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa strategi politik yang digunakan PKS pada saat pemilu tidak hanya berdakwah tetapi juga melakukan strategi politik yang langsung berpihak kepada rakyat dan menggunakan jargon cinta, kerja, dan harmoni sebagai simbol strategi partai pada pemilu yang lalu.

Dengan mengandalkan strategi politik ini, tujuannya untuk menarik simpati dan menambah jumlah pemilihnya dari pemilih yang ada. Adapun program-program yang dicanangkan dari program pelayanan masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh Ketua DPD kota Palembang :

*“Programnya adalah dalam bentuk pelayanan dengan berbagai jenis kegiatan baik berupa pelayanan sosial seperti kesehatan, baksos dan melakukan pasar murah. Kemudian pelayanan pendidikan yang bisa dirasakan masyarakat dengan dicanangkan 20% dari APBN untuk pendidikan dan alhamdulillah itu berhasil sampai tingkat kab/kota, kemudian pelayanan dalam segi keagamaan.”<sup>98</sup>*

Senada dengan yang dikatakan oleh Caleg dapil 2 pemilu 2014 sekaligus Ketua Bidang Perempuan DPD PKS kota Palembang :

*“Program-program yang kita canangkan pada saat pemilu kemarin, seperti melakukan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat berupa pengecekan kolesterol, gula darah dan sebagainya, kemudian pemeriksaan mata dengan memberikan kaca mata gratis kepada masyarakat, melakukan sembako murah, oh yaa.. kita juga bekerjasama dengan produk susu online.”<sup>99</sup>*

Mengenai pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa pada pemilu 2014, strategi PKS untuk menambah jumlah pemilihnya, mereka membuat program dalam bentuk pelayanan masyarakat diantaranya ada pelayanan sosial yang dilakukan kader-kader PKS kepada masyarakat baik berupa pemeriksaan kesehatan,

---

<sup>98</sup>M. Ridwan Saiman (Ketua DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 6 Maret 2017

<sup>99</sup>Dwi Yanni Suswati (Ketua Bidang Perempuan DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 15 April 2017

melakukan pasar murah, melakukan bakti sosial, dan penggalangan dana bagi masyarakat yang terkena bencana. Hal ini merupakan bukti bagi PKS bahwa mereka adalah partai yang pro rakyat dan peduli kepada rakyat. Begitu juga dengan pelayanan pendidikan, dimana sebagian dana dari APBN dikeluarkan untuk pendidikan dan itu berhasil. Dalam sisi keagamaan, sebagai partai yang aktif dalam dunia dakwah, PKS secara langsung memberikan pendidikan politik dan pemahaman keagamaan kepada masyarakat baik melalui dakwah-dakwahnya maupun kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Dalam konteks kampanye politik, PKS melakukan berbagai macam alternatif untuk mempengaruhi pemilih melalui pemasaran politik. Pemasaran politik merupakan strategi yang sangat penting dalam penyebarluasan informasi tentang kandidat, partai, dan program yang dilakukan oleh aktor politik melalui saluran-saluran komunikasi tertentu yang ditujukan kepada segmen (sasaran) dengan tujuan mengubah wawasan, pengetahuan, sikap, dan perilaku para calon pemilih sesuai dengan keinginan pemberi informasi.<sup>100</sup> Seperti yang dijelaskan oleh Tim Advokasi DPD PKS kota Palembang :

*“PKS melakukan berbagai cara yang bisa dilakukan oleh struktur partai maupun kader-kadernya seperti melakukan kegiatan kampanye direct selling dari rumah ke rumah, pemilih ke pemilih, dan kegiatan kampanye besar dengan pengerahan kader ke berbagai wilayah untuk menawarkan program-program partai seperti memperkenalkan visi, misi, platform dan sebagainya sekaligus memperkenalkan para caleg. Kemudian PKS juga menggunakan sarana media cetak, media online, reklame, spanduk dan lain-lain, kegiatan ini sudah dilakukan dengan optimal.”<sup>101</sup>*

---

<sup>100</sup>Hafied Cangara, *Komunikasi Politik : Konsep, Teori, dan Strategi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 277

<sup>101</sup>Aulia Rahman (Tim Advokasi DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 12 April 2017

Ketua DPD PKS kota Palembang juga mengungkapkan :

*“Pemasaran politik yang kita lakukan banyak mengerahkan kader ke berbagai wilayah walaupun ada beberapa di iklankan tapi tidak banyak karena pendanaan kita yang minim jadi lebih mengerahkan kader/memanfaatkan kader, kita juga menggunakan sarana media cetak dan media online (twitter, fb, dll).”<sup>102</sup>*

Mengenai tanggapan di atas, bahwa pemasaran dalam kampanye politik, PKS melakukan kegiatan *direct selling* (door to door) yang merupakan suatu kegiatan dimana PKS berkomunikasi dan menawarkan programnya dari pintu ke pintu/antar pribadi. Kemudian pengerahan kader-kadernya ke berbagai kalangan masyarakat dan menggunakan sarana komunikasi seperti media cetak maupun media online (website: palembang.pks.id, fb: pks.palembang.3, twitter: PKS\_Palembang). Hal-hal semacam ini dilakukan PKS untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa PKS ini benar-benar partai yang dapat menjadi wadah aspirasi bagi masyarakat dan menjadi partai yang benar-benar bekerja untuk rakyat.

#### b. Kekuatan Partai Keadilan Sejahtera

Pada saat pemilu, pastinya setiap partai politik termasuk PKS diharuskan untuk bekerja semaksimal mungkin dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang mereka miliki. Adapun yang menjadi kekuatan PKS, yaitu sebagai berikut :

##### 1. *Militansi dan Loyalitas Kader*

Militansi adalah ketangguhan seseorang kader dalam memperjuangkan partainya. Sedangkan loyalitas kader adalah rasa kesetiaan yang dimiliki kader

---

<sup>102</sup>M. Ridwan Saiman (Ketua DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 6 Maret 2017

terhadap partainya. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua DPD PKS kota Palembang :

*“Kekuatan PKS kota Palembang pada saat pemilu yaitu PKS memiliki solidaritas kader yang sangat tinggi karena PKS mempunyai keunikan tersendiri dalam sistem kaderisasi dan pembinaan yang dilakukan tiap pekan terhadap kader-kadernya.”*<sup>103</sup>

Kemudian dijelaskan juga oleh Tim Advokasi DPD PKS kota Palembang :

*“Yang menjadi kekuatan PKS pada setiap pemilunya yang pertama yaitu ada pada kader khususnya di Sumsel anggota kader yang terbanyak ada di kota Palembang. Kedua, ada pada struktur partai dan ketiga, ada pada ketokohan para caleg.”*<sup>104</sup>

Dengan demikian, PKS yang merupakan satu-satunya partai kader di Indonesia khususnya di kota Palembang, yang akan menjadi kekuatan inti PKS dalam menghadapi setiap pemilu yaitu loyalitas dan militansi kader PKS yang tidak perlu di ragukan lagi. Semua kader bergerak untuk memperjuangkan partainya, karena perlu diketahui PKS ini merupakan salah satu partai yang tidak pernah berhenti bergerak, kader-kadernya selalu melakukan kegiatan tiap pekan. Kemudian, militansi dan loyalitas yang diperlihatkan oleh kader PKS tidak terlepas dari sistem kaderisasi partai yang sistematis dan terstruktur. Setiap jenjang kader PKS dalam pengkaderan inilah yang akan membentuk pribadi kader PKS menjadi loyal dan militan terhadap perjuangan partai.

Sebagai partai dakwah, PKS memiliki sistem pengkaderan berbasis tarbiyah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ketua DPD PKS kota Palembang :

---

<sup>103</sup>M. Ridwan Saiman (Ketua DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 6 Maret 2017

<sup>104</sup>Aulia Rahman (Tim Advokasi DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 12 April 2017

*“Sistem Pengkaderan PKS itu, ada dalam bentuk kegiatan tarbiyah, disinilah mereka itu dikader, diberdayakan/dibina dan di beri pemahaman tentang ilmu-ilmu agama. Di PKS tidak hanya kader yang dibina tetapi juga ada pembinaan keluarga.”<sup>105</sup>*

Mengenai pernyataan di atas, bahwa inti dari pengkaderan PKS ada pada sistem tarbiyah. Dimana tarbiyah (pendidikan) merupakan upaya untuk membangun sosok pribadi muslim yang memahami dan menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh dan integral. Kemudian membentuk pribadi yang bekerja mendakwahkan Islam dan pribadi yang memiliki kiprah nyata dalam bermasyarakat serta pribadi yang mampu turut berperan dalam mengelola negara.

Dalam tarbiyah inilah kader-kader dibina dan dibentuk menjadi sosok kader yang militan dan loyal kepada partai. Langkah awal yang dilakukan PKS dalam sistem kaderisasinya adalah pembinaan pribadi kader PKS dalam artian pembinaan yang mampu memberikan keterampilan-keterampilan pribadi kader maupun interaksi antara kader. Pembinaan ini sangat penting dalam proses dakwah PKS, sebab PKS memandang bahwa proses dakwah parlemen hanya bisa dilakukan dengan pribadi yang bersih dan shaleh.

Jika jiwa pribadi bersih dan shaleh maka secara otomatis dakwah yang dilakukan akan berjalan dengan lancar. Kemudian, pembinaan keluarga yang mana dengan membentuk pribadi yang bersih dan shaleh menjadikan kunci dalam membentuk keluarga yang shaleh dan dari keluarga shaleh inilah yang akan membentuk masyarakat yang Islami.

---

<sup>105</sup>M. Ridwan Saiman (Ketua DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 6 Maret 2017



Pembinaan semacam ini sangat penting bagi kader-kader PKS, karena seperti yang dikatakan ketua DPD PKS kota Palembang bahwa bagi PKS apabila kader yang tidak ikut pembinaan, alamat mereka akan menyimpang dari khittah perjuangan partai. Yang menjadi pilar-pilar dan dasar perjuangan partai itu sendiri adalah ideologi Islam, karena bagi PKS dengan menjadikan Islam sebagai aqidah, asas dan basis moral, untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam dan kemaslahatan umat.<sup>106</sup>

## 2. Struktur Partai

Maksud dari struktur partai adalah kepengurusan partai. Hasil wawancara dengan Tim Advokasi DPD PKS kota Palembang :

*“Kekuatan PKS yang kedua yaitu ada pada struktur partai kalau dilihat dari tingkat kota disebut (DPD), kecamatan (DPC) sampai kelurahan (DPRa). Setidaknya-tidaknya semua struktur ini ada kepengurusan. PKS inilah partai yang tidak pernah berhenti bergerak, selalu ada kegiatan dan tidak pernah sepi. Keegiatannya setiap hari setiap minggu ada saja kegiatan yang dikerjakan oleh struktur partai baik itu kegiatan massif ataupun kegiatan kelompok-kelompok dalam struktur partai (baik atas nama parpol maupun atas nama sayap-sayap politik PKS), Selain kader, struktur juga merupakan kekuatan utama dalam kemenangan partai PKS.”<sup>107</sup>*

Senada dengan yang dikatakan Caleg dapil 2 pemilu 2014 sekaligus Ketua Bidang Perempuan DPD PKS kota Palembang :

*“PKS ini mempunyai kekhasan tersendiri ya, yang membedakan PKS dengan partai lain itu ya struktur partai dan kader-kader PKS yang selalu saling bantu membantu dalam hal apapun. Termasuk ketika kampanye pemilu, PKS secara bersama-sama mensosialisasikan program-programnya dan mengenalkan caleg-calegnya kepada masyarakat.”<sup>108</sup>*

---

<sup>106</sup>M. Ridwan Saiman (Ketua DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 6 Maret 2017

<sup>107</sup>Aulia Rahman (Tim Advokasi DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 12 April 2017

<sup>108</sup>Dwi Yanni Suswati (Ketua Bidang Perempuan DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 15 April 2017

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa struktur partai juga merupakan kekuatan bagi PKS dalam pemilu. Struktur inilah yang akan bergerak dan berjuang untuk melakukan konsolidasi dari bawah yaitu dari tingkat kecamatan dan kelurahan-kelurahan. Peran struktur ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata, sebab struktur inilah yang menjadi poros perjuangan PKS dalam pemilu.

Semakin kompak dan solid struktur PKS, maka akan semakin besar kekuatan PKS. Dalam hal ini kekompakan para pengurus PKS telah mereka buktikan dengan seringnya melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka sosialisasi dan melakukan acara-acara yang dibuat oleh PKS maupun sayap-sayap PKS baik itu dilakukan pada saat pemilu atau tidak.

### 3. Sayap-Sayap Politik

Sayap-sayap politik dalam artian pendukung eksternal partai. Seperti yang dikatakan oleh Tim Advokasi DPD PKS kota Palembang :

*“Kekuatan eksternal PKS itu ada pada sayap-sayap politik PKS yaitu sebagai partai dakwah yang melebarkan sayap-sayap politiknya ke organisasi maupun lembaga-lembaga dakwah kampus, sekolah, dan majelis. Pada pemilu 2014 kemarin, kita juga berkoalisi dengan salah satu pasangan calon walikota Palembang dari partai PDI-P saat itu.”<sup>109</sup>*

Pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa pendukung eksternal PKS ada pada sayap-sayap politiknya yaitu organisasi, lembaga-lembaga dakwah kampus, sekolah, dan majelis. Hal ini di perkuat dalam buku Zuli Qodir yang menyatakan bahwa pendukung utama PKS sebagian besar dari kalangan aktivis dakwah yang selama ini berkecimpung dalam dunia dakwah kampus dan sekolah yang terdiri dari

---

<sup>109</sup>Aulia Rahman (Tim Advokasi DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 12 April 2017

kombinasi kaum muda Islam terdidik. Sayap-sayap politik PKS diantaranya KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) dan LDK (Lembaga Dakwah Kampus).<sup>110</sup> Inilah yang menjadi kekuatan-kekuatan eksternal Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilu.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ternyata penulis menemukan faktor dominan yang menyebabkan menurunnya perolehan suara PKS pada pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014 yaitu :

*1) Citra Partai yang Negatif*

Pada hakikatnya citra adalah konstruksi atas representasi dan persepsi khalayak terhadap individu, kelompok, atau lembaga yang terkait dengan kiprahnya dalam masyarakat.<sup>111</sup> Citra partai juga dapat diartikan sebagai gambaran partai di lingkungan masyarakat baik itu bersifat positif maupun negatif. Citra dapat menjadi salah satu sumber penentu menang atau tidaknya partai dalam pertarungan politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Umum DPD PKS kota Palembang :

*“Penyebab menurunnya perolehan suara PKS itu pada pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014 yaitu citra partai PKS pada saat itu kurang baik. Pada awal tahun 2013 setahun sebelum pemilu dilaksanakan, terjadinya tsunami politik dimana kasus yang menimpa presiden PKS yaitu LHI yang dianggap telah melakukan korupsi suap impor daging sapi dan pencucian uang sehingga hal ini berdampak kebawah. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, black campaign terhadap PKS agak kurang.”<sup>112</sup>*

---

<sup>110</sup>Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam : Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 226

<sup>111</sup>Anwar Arifin, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: Pustaka Indonesia, 2006), h. 1-2

<sup>112</sup>M. Ridwan Saiman (Ketua DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 6 Maret 2017

Sama halnya seperti yang di ungkapkan Wakil Ketua DPD PKS kota Palembang :

*“Faktor internal yang menyebabkan turunnya perolehan suara PKS yaitu satu tahun sebelum pemilu ada suatu kejadian besar yang menasional. Pada waktu itu LHI tertangkap tangan menerima suap, padahal operasi tangkap tangan itu LHI tidak sedang berada di hotel tetapi dia sedang berada di kantor DPP PKS dan sedang melakukan rapat. Yaa.. Presiden PKS ditangkap tentu berdampak ke bawah, ke masyarakat dengan PKS korupsi kasus sapi.”<sup>113</sup>*

Mengenai penjelasan di atas, peneliti menganalisa bahwa kasus yang terjadi pada PKS di tingkat nasional berdampak ke tingkat local sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi elektabilitas perolehan suara partai pada pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014. Sebagai partai politik yang menjunjung tinggi ideologi Islam dan berlatarbelang kader-kader yang kental akan Islaminya, maka kasus-kasus semacam ini tentu berdampak buruk bagi citra PKS di mata publik. Apalagi ketika masyarakat banyak melihat kasus tersebut yang sempat menjadi *headline* di media-media, dampaknya tentu membuat masyarakat trauma bahkan terjadi krisis kepercayaan terhadap partai Islam. Oleh sebab itu, untuk memenangkan pemilu dan menarik simpati masyarakat itu sendiri, dibutuhkan citra yang positif baik dari partai maupun caleg yang diajukan.

Selanjutnya yang dikemukakan oleh Tim Advokasi DPD PKS kota Palembang :

*“PKS melakukan survey dengan membuat program direct selling. Dimana semua kader PKS dimobilisasi/digerakkan mengikuti kegiatan tersebut. Oleh DPD PKS kota Palembang, semua kader dikumpulkan dalam satu tempat di Sako kemudian diberi arahan, lalu semua kader disebar dengan melakukan door to door,*

---

<sup>113</sup>Yulfa Cindo Sari (Wakil Ketua DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 14 April 2017

*termasuk saya juga ikut. Akhirnya dari survey itu didapatkan faktanya tidak seperti apa yang dibayangkan, yang pada awalnya hanya masalah korupsi, ternyata faktor dominan di masyarakat khususnya para wanita kota Palembang itu mengenai masalah perkawinan, masalah wanita (poligami). Pemilih menentukan pilihannya bukan karena masalah korupsi saja, tetapi justru lebih besar dominan faktor poligami. Jadi, yang dirasakan kader-kader PKS waktu itu berat sekali.”<sup>114</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, ditemukan juga data survey yang menunjukkan dari 12 partai terdapat 22% responden yang menyatakan PKS merupakan partai yang bersih dari korupsi.<sup>115</sup> Selain itu di temukan faktor lain mengenai permasalahan poligami yang mengakibatkan pandangan masyarakat terhadap PKS menjadi berubah dan sedikit berpengaruh terhadap kinerja partai/kader pada saat itu.

## *2) Keterlambatan Partai dalam merumuskan Strategi Pemenangan*

Perumusan strategi merupakan proses memutuskan tujuan organisasi atau partai itu sendiri. Dengan kata lain, suatu strategi untuk mencapai keseluruhan tujuan-tujuan partai yang telah ditentukan. Seperti yang diungkapkan oleh Tim Advokasi DPD PKS kota Palembang :

*“Pada pemilu legislatif yang lalu, Yaa.. kita melihat juga adanya keterlambatan PKS dalam merumuskan strategi pemenangan. Dimana, strategi pemenangan selesai dirumuskan sudah dekat dengan waktu pelaksanaan pemilu. Jadi yang mestinya kita melakukan penokohan caleg dua tahun sebelum pemilu, pada pemilu kemarin hanya satu tahun karena kita yakin pada pemilu 2009 kita sudah masuk di empat besar peluang suaranya akan meningkat di tahun 2014 dan ternyata tidak... Yaa itu juga menjadi penyebab turunnya suara partai.”<sup>116</sup>*

---

<sup>114</sup>Aulia Rahman (Tim Advokasi DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 12 April 2017

<sup>115</sup>Laporan Kerja DPD PKS Kota Palembang periode 2010-2014

<sup>116</sup>Aulia Rahman (Tim Advokasi DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 12 April 2017

Pernyataan di atas dapat dianalisa bahwa pada pemilu 2014 Partai Keadilan Sejahtera terlambat dalam memperkenalkan para caleg-calegnya. Sebagai partai kader, partai ini memilih caleg-calegnya dari kalangan kader mereka sendiri. Pada pemilu sebelumnya partai ini melakukan penokohan caleg dua tahun sebelum pemilu, namun pada pemilu 2014 yang lalu PKS merumuskan strategi dalam waktu yang cukup singkat. Dalam artian partai PKS tidak maksimal dalam perencanaan ataupun perumusan strateginya karena dalam penyusunan maupun pelaksanaan strategi sangat mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi itu pada akhirnya. Jadi, untuk meningkatkan elektabilitas suara partai dan kemenangan dalam pemilu diperlukan strategi yang matang dan cermat sehingga tujuan yang diinginkan tercapai dengan baik.

### 3) Adanya Kelemahan-Kelemahan Partai/Caleg

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua DPD PKS kota Palembang:

*“...Selain itu adanya kelemahan-kelemahan PKS seperti belum kokohnya basis sosial/jaringan yang dimiliki partai/caleg dan sebagian caleg yang kurang memahami strategi pada saat pemilu.”<sup>117</sup>*

Kemudian, ungkapkan dari Wakil Sekretaris DPD PKS kota Palembang :

*“Yaa.. faktor lain turunnya capaian suara PKS pada pemilu legislatif kurangnya figur tokoh di dalam tubuh partai sedikit banyak sering menjadi penyebab akselerasi maneuver kegiatan partai dan sosialisasi belum dirasakan optimal di tengah masyarakat/masyarakat masih belum akrab dengan PKS. Yaa.. terlihat dari hasil survey kita, hanya 11% responden yang menyatakan kedekatannya terhadap PKS”<sup>118</sup>*

---

<sup>117</sup>Yulfa Cindo Sari (Wakil Ketua DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 14 April 2017

<sup>118</sup>Darussalam (Wakil Sekretaris DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 23 Februari 2017

Berdasarkan hasil survey internal PKS kota Palembang, responden yang menyatakan kedekatannya dengan PKS yaitu 11% yang menyatakan ya, 68% yang menyatakan tidak, dan 21% yang menyatakan tidak tahu. Responden yang menyatakan peduli dengan keberadaan PKS yaitu 45% responden yang menyatakan iya, 23% yang menyatakan tidak, dan 32% yang menyatakan tidak tahu. Responden menyukai PKS yaitu 45% yang menyatakan iya, 24% yang menyatakan tidak, dan 31% yang menyatakan tidak tahu.<sup>119</sup>

Dengan pernyataan di atas, penulis menganalisa bahwa kurangnya figur tokoh/kader di dalam partai yang sedikit menjadi kendala struktur partai dalam melakukan kegiatan-kegiatan dan sebagian para caleg PKS juga kurang dikenal di masyarakat, kurang memiliki jaringan, dan kurang memahami strategi dalam artian kurang optimalnya kemampuan para kader/caleg dalam mencapai target di lapangan, sehingga berdampak kepada perolehan suara partai. Dari data yang ada, peneliti juga melihat hasil perolehan suara percaleg pada pemilu 2014 bahwa masih banyak para caleg yang mendapatkan suara dibawah 1000 berarti para caleg tidak mendapatkan suara yang maksimal.

Maka dari itu, PKS perlu penataan dan pengoptimalisasian potensi kader untuk bisa diberdayakan dalam menunjang pencapaian target-target partai. Karena untuk memenangkan suatu pertarungan politik dan meningkatkan elektabilitas partai dibutuhkan kualitas pemahaman para kader maupun caleg dalam menjalankan strateginya, sehingga apa yang diinginkan dapat tercapai.

---

<sup>119</sup>Laporan Kerja DPD PKS Kota Palembang periode 2010-2014

#### 4) *Persaingan Internal Partai*

Maksudnya adalah persaingan yang terjadi di dalam partai itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua DPD PKS kota Palembang :

*“Pada pemilu 2014 kemarin itu pemilu yang paling panas diantara caleg bukan hanya diantara partai tapi para caleg sama-sama satu partai itu ribut, maka terjadilah persaingan yang tidak sehat diantara para caleg sesama partai sehingga sedikit timbul pergeseran dan sedikit mempengaruhi perolehan suara.”<sup>120</sup>*

Sama halnya yang dikatakan oleh Caleg dapil 2 pemilu 2014 sekaligus Ketua Bidang Perempuan DPD PKS kota Palembang :

*“Pada pemilu 2014 yang lalu, persaingan yang terjadi antar caleg di internal partai sangat dirasakan begitu kuat. Apalagi pada saat kampanye, PKS punya sistem aturan dalam kampanye misalnya dalam pembagian wilayah, percaleg sudah mempunyai fokus wilayah masing-masing untuk kampanye tetapi ada kader caleg yang suka masuk/menyelinap ke wilayah caleg yang sama partai tanpa konfirmasi lagi kepada caleg yang punya wilayah sehingga menimbulkan konflik dan pergeseran diantara para caleg PKS yang bersaing. Hal ini juga sedikit berdampak kepada perolehan suara partai.”<sup>121</sup>*

Berdasarkan wawancara di atas, peneliti juga melihat adanya persaingan antar caleg dari internal PKS dalam artian pertarungan antar caleg dari PKS bersaing keras untuk mendapatkan simpati masyarakat termasuk merebut kawasan kampanye/dapil sesama caleg PKS. Hal ini sedikit menimbulkan pergeseran diantara kader-kader PKS yang bersaing. Di dunia politik, persaingan semacam ini memang tidak dapat dielakkan baik itu persaingan antar partai politik maupun kandidat.

---

<sup>120</sup>Yulfa Cindo Sari (Wakil Ketua DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 14 April 2017

<sup>121</sup>Dwi Yanni Suswati (Ketua Bidang Perempuan DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 15 April 2017



Hal ini diperkuat dari pendapat Firmanzah, persaingan politik merupakan kodrat alamiah yang harus ditempuh untuk mencapai kekuasaan. Karena pada akhirnya yang akan berkuasa hanya satu individu atau kelompok, jadi wajar-wajar saja masing-masing pihak berlomba-lomba untuk menjadi juara. Tetapi perlu diketahui persaingan untuk berkuasa ini harus diatur dengan mekanisme yang telah disepakati bersama. Tanpa adanya peraturan yang jelas, persaingan politik bisa menjadi kacau.<sup>122</sup>

#### 5) Pendanaan

Pendanaan merupakan permasalahan dalam sisi modal/finansial. Seperti yang diungkapkan Ketua DPD PKS kota Palembang :

*“...pada saat pemilu setiap partai pasti membutuhkan modal yang banyak, Kalo masalah dana kita bisa cari sama-sama. Untuk dana, kita ada kas partai sumbernya bisa dari sumbangan/infaq para kader-kader (sebagian dari kader kita ini dari kalangan pengusaha, pegawai dan sebagainya) kemudian dana dari anggota dewan yang telah duduk di DPRD fraksi PKS, biasanya setiap anggota dewan itu menyetorkan 1,5jt perbulan kepada partai jadi kalo kursi kita berkurang, itu mempengaruhi kas partai kita. PKS ini bisa dikatakan partai yang paling sedikit uangnya. Jadi soal pendanaan bisa dibilang sedikit banyak berpengaruh pada penurunan suara PKS.”<sup>123</sup>*

Hal ini juga dapat dilihat dari hasil laporan kerja partai PKS kota Palembang periode 2010-2014 bahwa finansial dan daya dukung dalam usaha pemenangan belum maksimal dikarenakan belum optimalnya *fund rising* dari sumber-sumber yang aman secara syar’i, hukum, dan politik.<sup>124</sup>

---

<sup>122</sup>Firmanzah, *Mengelola Partai Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 131

<sup>123</sup>M. Ridwan Saiman (Ketua DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 6 Maret 2017

<sup>124</sup>Laporan Kerja DPD PKS kota Palembang periode 2010-2014

Berbicara kontribusi partai terhadap para caleg pada pemilu legislatif 2014, Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu caleg dapil 5 sekaligus ketua DPRa 34 Ilir PKS kota Palembang bahwa :

*“Kontribusi yang diberikan partai kepada para caleg berupa dana 10jt percaleg untuk seribu suara dan selebihnya untuk berjihad di jalan Allah menggunakan dana pribadi. Biasanya mencari dana itu di kalangan kadernya kita sendiri, paling misalnya ada kader yang bekerja di perusahaan ya paling minta bantu sama mereka. Jadi, untuk memenangkan dalam pemilu dibutuhkan modal yang sangat besar. Kalo ditanya saya habis modal berapa untuk pemilu kemarin, saya hanya menggunakan dana dari pemberian partai saja. Kalo dibandingkan dengan mereka yang sudah menjadi anggota dewan saat ini, tidak menutup kemungkinan modal yang dikeluarkan tidak sedikit.”<sup>125</sup>*

Melalui ungkapan di atas, dapat dianalisa bahwa kurangnya dana/finansial juga merupakan faktor yang menyebabkan turunnya suara PKS. Karena yang kita ketahui untuk ikut pemilu dibutuhkan dana yang tidak sedikit sedangkan PKS kota Palembang sendiri dapat dikatakan partai yang minim akan dana. Pendanaan PKS bersumber dari infaq/sumbangan para kader-kader, anggota dewan, maupun pengusaha dan sebagainya.

## **2. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar partai.

### **a. Perilaku Pemilih**

Perilaku pemilih adalah tindakan seseorang dalam memberikan suara atau memilih pemimpin pada saat pemilu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua DPD PKS kota Palembang yang menyatakan bahwa:

---

<sup>125</sup>Caleg Dapil 5 PKS kota Palembang, *Wawancara*, 22 November 2017

*“Faktor eksternalnya, masyarakat pemilih masih sangat pragmatis dalam arti suara mereka masih sangat mudah untuk dibeli. Partai kalau datang ingin menawarkan sesuatu pada masyarakat, masyarakat itu sudah terpola bahwa anda mau memberi kami apa?, dan pertanyaan memberi itu bukan sebuah ide atau gagasan yang mereka inginkan, tapi yang mereka minta kebanyakan adalah dalam bentuk material seperti uang dan lain-lain. Selain itu, sebagian masyarakat yang tidak peduli dengan proses pemilu sehingga masyarakat tidak memilih/golput.”<sup>126</sup>*

Senada dengan yang diungkapkan oleh Caleg dapil 2 pemilu 2014 sekaligus Ketua Bidang Perempuan DPD PKS kota Palembang:

*“Masyarakat kita ini belum melek politik, masih diiming-iming dengan uang bukan melihat kualitas personal tetapi melihat siapa yang banyak memberi mereka uang. Sebenarnya politik itu tidak kotor hanya saja oknum-oknumnya yang membuat menjadi kotor. Hal ini lah yang menjadi salah satu sebab perolehan suara PKS menurun.”<sup>127</sup>*

Menurut pernyataan informan di atas, penulis dapat menganalisa bahwa faktor eksternal yang menyebabkan penurunan perolehan suara PKS pada pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014 yaitu semakin kuatnya pragmatisme masyarakat yang mana masyarakat dalam memilih pemimpin atau caleg bukan melihat dari kinerja maupun program yang dicanangkan serta kualitas partai itu sendiri tetapi sebagian masyarakat lebih memilih partai yang banyak memberikan uang kepada mereka sehingga hal semacam ini dapat menimbulkan politik uang.

#### b. Politik Uang (*Money Politic*)

Tidak dipungkiri, adanya *money politic* selalu mewarnai dalam proses pemilu yang terjadi di Indonesia tanpa terkecuali di kota Palembang. Berdasarkan wawancara dengan Tim Advokasi DPD PKS kota Palembang :

---

<sup>126</sup>Yulfa Cindo Sari (Wakil Ketua DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 14 April 2017

<sup>127</sup>Dwi Yanni Suswati (Ketua Bidang Perempuan DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 15 April 2017

*“Faktor keterpilihan itu tidak hanya bergantung pada partai maupun para kader/caleg, tetapi sedikit banyak bergantung juga pada politik uang. Salah satu indikasi politik uang itu cukup dominan ditahun 2014. Misalnya PKS sangat sering melakukan kegiatan kampanye baik dalam bentuk pelayanan sosial/bakti sosial maupun advokasi termasuk juga pemberdayaan/pembinaan masyarakat, disatu sisi justru partai lain tidak pernah muncul melakukan hal seperti itu bahkan partai/caleg tidak pernah kampanye tapi justru menang.”<sup>128</sup>*

Sama halnya yang diungkapkan oleh caleg dapil 5 sekaligus ketua DPRa 34

Ilir PKS kota Palembang yaitu :

*“Pada saat pemilu kemarin kita sudah berjuang tapi kenyataan di lapangannya lain, kan 2014 kemarin terkenal dengan pemilu pesta rakyat. Jadi pemilu 2014 kemarin money politicnya sangat tinggi dibandingkan pemilu sebelumnya. Contohnya saja pengalaman saya pada pencalegkan kemarin, ada satu keluarga saya, dia lebih memilih dan berpaling ke partai lain dibandingkan saya sebagai keluarganya, itu karena dia dikasih duit (serangan fajar) yang dilakukan partai lain terhadap mereka.”<sup>129</sup>*

Hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa faktor keterpilihan suatu partai sedikit banyak juga bergantung pada politik uang. PKS sebagai partai Islam yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keIslaman dalam berpolitik sangat menghindari hal-hal curang seperti ini. Dimana partai lainnya berlomba-lomba memberikan imbalan kepada masyarakat agar memperoleh suara, PKS justru tidak melakukannya dan lebih memilih melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ternyata kerja-kerja sosial politik tidak selalu berbanding lurus dengan elektabilitas partai. Hal ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi penurunan suara PKS di kota Palembang.

---

<sup>128</sup>Aulia Rahman (Tim Advokasi DPD PKS kota Palembang)

<sup>129</sup>Caleg Dapil 5 PKS kota Palembang, *Wawancara*, 22 November 2017

Padahal di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah ditegaskan bahwa larangan melakukan politik uang dalam kampanye terutama pada pasal 86 ayat 1 huruf j, Pasal 89, dan pasal 301.<sup>130</sup>

### c. Media Massa

Media massa merupakan sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas baik melalui media elektronik maupun media cetak. Seperti yang diungkapkan Ketua DPD PKS kota Palembang :

*“...kalau di kota besar ini media sungguh luar biasa, pemberitaan terhadap PKS dampaknya terasa ada tsunami politik dan berpengaruh pada penurunan suara dan kursi yang mengakibatkan perolehan kas partai berkurang.”<sup>131</sup>*

Selanjutnya wawancara dengan caleg dapil 5 sekaligus ketua DPRa 34 Ilir PKS kota Palembang yaitu :

*“Kasus yang menimpa presiden PKS pada waktu itu, kita sebagai kader sempat goyah ini kasus beneran atau tidak, ternyata itu dibuat-buat saja untuk memecah belahkan partai tapi itu tidak berpengaruh bagi partai kita. Jadi siapa di dibelakangnya iya partai yang berkuasa saat itu, mereka sudah mengaku dan kita tau siapa oknumnya tapi ini rahasia ada dari pemerintahnya, ada juga dari pihak swastanya. Kemudian pemberitaan-pemberitaan di media televisi (tv-one, metro-tv, mnc-tv, rcti dan sebagainya) itu kan punya mereka gak ada punya PKS, jadi black campaign terhadap PKS itu sangat rentan.”<sup>132</sup>*

Melalui kedua ungkapan di atas, bahwa pengaruh media massa sangat luar biasa. Ketika kasus-kasus yang menimpa PKS saat itu mendominasi wacana perbincangan publik dan merupakan pukulan keras bagi PKS. Tidak menutup

---

<sup>130</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 86, 89, 301 tentang Sanksi atas Pelanggaran Larangan Kampanye

<sup>131</sup>M. Ridwan Saiman (Ketua DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 6 Maret 2017

<sup>132</sup>Caleg Dapil 5 PKS kota Palembang, *Wawancara*, 22 November 2017

kemungkinan hal tersebut dipicu oleh pemberitaan di media-media secara massif sehingga berdampak kepada persepsi masyarakat pemilih. Melihat juga black campaign terhadap PKS saat itu cukup besar akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap PKS sebagai partai Islam menurun.

Kampanye negatif dalam pemasaran politik merupakan hal paling menonjol dalam kasus-kasus persaingan di pasar politik Indonesia. Kasus yang terjadi di awal tahun 2013 mengenai suap impor daging sapi yang melibatkan Ahmad Fathonah dan Luthfi Hasan Ishaq jika ditelaah, ini adalah sebuah warna kampanye negatif atau *black campaign* paling menonjol dalam wacana pemasaran politik menjelang pemilu Indonesia tahun 2014.

Contohnya, siaran Tv one sebagai corong partai Golkar memberikan porsi penayangan kasus ini dengan supermasif, maka hampir boleh dikatakan tidak ada berita politik yang dapat menggeserkan bahkan menyetarai kemenonjolannya di antara segala berita politik yang ditayangkan terus menerus oleh Tv one. Tidak hanya itu, Metro Tv yang pemiliknya dari partai Nasdem pun memberitakan demikian, mereka merupakan partai pesaing PKS. Implikasinya sangat mudah diperkirakan dan ternyata dalam tempo tidak leboh dari satu bulan, opini calon pemilih tergiring pada kebenaran konstruksi hasil *black campaign* tersebut. Tak pelak masyarakat awam berubah pandangan terhadap PKS.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemberitaan media massa tentang suatu isu secara massif mampu memperkuat persepsi khalayak terhadap realita sosial. Walaupun pada kenyataannya realita sosial itu tidak sama dengan realita

media massa dalam artian realita sosial acapkali direkonstruksi oleh media massa. Namun, khalayak masih cenderung mempercayai realita yang telah direkonstruksi oleh media massa tersebut. Dengan demikian, media cukup berpengaruh terhadap citra PKS dan elektabilitas PKS pada pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014.

Selain itu pemberitaan di media online seperti tribunnews edisi Minggu, 3 Februari 2013 yang menyajikan berita tentang “Stop Pelesetkan Kepanjangan PKS Partai Kami menjadi (Partai Korupsi Sapi)”.<sup>133</sup> Majalah Tempo edisi Maret 2011 tentang “Main daging pentolan PKS”. Edisi Mei 2011 tentang “Sekali Lagi Daging Berjanggut”. Edisi 4-10 Februari 2013 tentang “Suap Sapi Berjanggut”.<sup>134</sup> Edisi 11-17 Februari 2013 tentang Hangus Sejumlah petinggi PKS terpengang perkara suap daging impor.”<sup>135</sup>

### C. Upaya PKS di Masa Depan

Upaya yang dilakukan PKS untuk kedepannya yaitu seperti hasil wawancara dengan Ketua DPD PKS kota Palembang :

*“Menyadarkan masyarakat untuk meleak politik yang masih suka politik uang dan mungkin sebagian partai ada yang menggunakan hal seperti itu tetapi tidak semua partai yang melakukannya.”*<sup>136</sup>

Wawancara di atas, dapat dianalisa bahwa yang dilakukan PKS untuk kedepan adalah menyadarkan masyarakat dengan memberikan pendidikan politik agar masyarakat berfikir rasional. Sebenarnya, perilaku politik masyarakat yang ada di kota Palembang sendiri sudah cukup cenderung rasional, tetapi tidak dapat di pungkiri bahwa masih

<sup>133</sup><https://tribunnews.com/pemilu/stop-pelesetkan-kepanjangan-partai-kami>, diakses pada 23 November 2017

<sup>134</sup>Majalah Tempo Berita Mingguan, 10 Februari 2013, hlm. 34

<sup>135</sup>Majalah Tempo Berita Mingguan, 17 Februari 2013, hlm. 36

<sup>136</sup>M. Ridwan Saiman (Ketua DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 6 Maret 2017

banyak juga sebagian masyarakat yang masih bersifat pragmatis. Tidak semua masyarakat menggunakan hak pilihnya secara rasional dengan melihat program-program yang ditawarkan partai kepada masyarakat melainkan lebih memilih dari sisi materinya yaitu seberapa besar partai memberikan mereka uang maupun sembako dan lain-lain.

Oleh karena itu, PKS melakukan upaya untuk mendidik masyarakat agar tidak lagi berorientasi pada materi, sebab salah satu fungsi partai politik adalah memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat agar praktek politik uang dapat dihilangkan. Tidak hanya itu, partai politik atau aktor politik yang berperan di dalamnya juga harus diperbaiki sehingga pendidikan politiknya tersalurkan ke masyarakat. Apabila pendidikan politik sudah berjalan dengan baik maka lambat laun politik uang itu akan bergeser dan masyarakat akan menjadi lebih rasional dalam memilih dengan melihat ide dan gagasan yang dicanangkan oleh partai.

Kemudian, pernyataan dari Tim Advokasi DPD PKS kota Palembang :

*“Upaya yang dilakukan PKS kedepan adalah PKS melakukan kembali pencalegan dini, dalam waktu dekat PKS sudah bisa buat daftar bakal calon (DBC). Ditahun 2016 kemaren, PKS sudah mengadakan pemilu internal, masing-masing kader inti mengusulkan nama-nama kader ataupun orang diluar kader yg bisa dicalegkan. Semua kader inti mengirimkan nama yang sudah direkap oleh panitia yang bertugas kemudian tinggal dideklarasikan saja pengumuman DBC. Harapannya setelah bakal caleg ini dikukuhkan mereka bisa langsung bergerak dan merumuskan kemenangan.”<sup>137</sup>*

Menurut pernyataan di atas, dapat diketahui PKS juga berupaya untuk melakukan pemilihan caleg lebih dini kemudian penokohan caleg di masyarakat. Sebagai partai kader, PKS mempunyai mekanisme tersendiri dalam pemilihan caleg diantaranya melalui pemilu internal. Dimana dalam proses penjaringan ini, kader-kader/tim masing-masing

---

<sup>137</sup>Aulia Rahman (Tim Advokasi DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 12 April 2017



mengusulkan nama-nama kader dan nanti ada tim yang akan menjaringnya. Kemudian hasil dari penjaringan ini, akan diumumkan nama-nama yang layak dijadikan caleg.

Perlu diketahui, para CAD dari PKS tidak ada yang mengusulkan dari diri sendiri, semuanya diusung atau ditunjuk oleh partai. Berbeda halnya melalui pemilu eksternal yaitu yang bukan dari kader PKS, mereka mencalonkan diri sendiri ke PKS lalu diseleksi. Nama-nama kader PKS yang terpilih jadi CAD, tidak serta merta hanya dipilih melainkan mempunyai kriteria dan membentuk kriteria itu butuh proses yang panjang, diantaranya seperti yang dipaparkan oleh ketua umum DPD PKS kota Palembang :

*“Kriteria dalam memilih caleg dilihat dari jenjang kader, jaringan atau relasi yang dimiliki, basis konsistennya (maksudnya seperti ini karena kita partai islam apakah kader ini mempunyai binaan-binaan di majelis taklim atau forum keagamaan lainnya, biasanya para CAD ada seperti itu) dan besarnya dukungan dari keluarga.”<sup>138</sup>*

Ketika CAD diumumkan, selanjutnya penokohan para caleg dengan mensosialisasikannya secara dini minimal 2 tahun sebelum pemilu sehingga para caleg-caleg dari PKS lebih dikenal masyarakat. Selain itu, PKS juga berupaya mencermati Undang-Undang pemilu yang akan datang, mencari dana, menyiapkan saksi-saksi PKS, dan silaturahmi dengan publik. Jadi, inilah upaya-upaya yang dilakukan PKS sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dan sekaligus meningkatkan elektabilitas dan eksistensi PKS di rana panggung politik.

---

<sup>138</sup>M. Ridwan Saiman (Ketua DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 6 Maret 2017

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor dominan yang menyebabkan penurunan suara Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014 yaitu dilihat dari faktor internal dan eksternal partai.

**Faktor Internal** partai yaitu *Pertama*, citra partai PKS yang kurang baik di masyarakat seperti adanya kasus korupsi, pencucian uang dan masalah poligami yang terjadi di dalam tubuh PKS. *Kedua*, keterlambatan partai dalam merumuskan strategi kemenangan. *Ketiga*, adanya kelemahan-kelemahan partai/caleg PKS seperti sebagian caleg yang diajukan kurang dikenal masyarakat, belum kokohnya basis sosial/jaringan yang dimiliki, kurangnya figur tokoh di dalam partai, kurangnya pemahaman para caleg dalam menerapkan strategi dan tidak maksimalnya kinerja kader dalam kemenangan pemilu. *Keempat*, persaingan antar caleg yang terjadi di internal PKS yang mengakibatkan terjadinya konflik pergeseran diantara para kader, dan *Kelima*, faktor pendanaan.

**Faktor Eksternal** partai yaitu *Pertama*, perilaku masyarakat kota Palembang masih banyak yang bersifat pragmatis. *Kedua*, semakin luasnya praktek politik uang yang terjadi di masyarakat. *Ketiga*, pengaruh media massa yang sangat kuat sehingga berdampak kepada persepsi masyarakat pemilih.

## **B. Saran**

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang diajukan peneliti untuk dapat di jadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi partai politik khususnya Partai Keadilan Sejahtera kota Palembang yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai partai Islam, untuk mengembalikan eksistensi dan meningkatkan elektabilitas partai di kota Palembang, PKS diharapkan memperbaiki dan menjaga citra partai politik Islam di masyarakat dengan cara meningkatkan kinerja partai dan membuktikan kepada masyarakat bahwa PKS benar-benar partai yang bersih serta melakukan konsolidasi partai secara terus menerus sehingga mesin partai tetap bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya.
2. Sebagai partai kader, PKS kota Palembang harus meningkatkan kualitas pemahaman para anggota/kadernya baik dalam pembelajaran politik maupun meningkatkan kemampuan dalam bersosialisasi dan berkomunikasi di berbagai kalangan masyarakat kota Palembang.
3. Sebaiknya PKS juga harus memberikan pendidikan politik secara maksimal kepada masyarakat maupun kepada partai politik/aktor politik kota Palembang, agar kultur masyarakat yang pragmatis dan praktek money politik yang terjadi selama ini dapat dihilangkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Pratama. *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*. Surabaya: Prima Media, 2004.
- Akhirul Aminulloh. “Komunikasi Politik Dakwah Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu legislatif 2009”. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol.8, No.1, Januari-April 2010, diakses pada 22 Januari 2017 dari [http://repository.upnyk.ac.id/750/1/Strategi Komunikasi Politik Partai Pada Pemilu Legislatif 2009.pdf](http://repository.upnyk.ac.id/750/1/Strategi_Komunikasi_Politik_Partai_Pada_Pemilu_Legislatif_2009.pdf)
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera.
- Anwar Arifin. *Komunikasi Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Arif Munandar. “Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004”, *Disertasi*. Depok: Sosiologi, FISIP Universitas Indonesia, 2011.
- Aulia Rahman (Tim Advokasi DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 12 April 2017.
- Azyumardi Azra. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, & Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000.
- Chemi Martin Punggar (Kasubag Hukum KPU kota Palembang), *Wawancara*, 23 Februari 2017.
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Darussalam (Wakil Sekretaris Umum DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 23 Februari 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dwi Yanni Suswati (Ketua Bidang Perempuan DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 15 April 2017.
- Febrian Taufiq Sholeh. “Manhaj Tarbiyah dalam Pendidikan Politik Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS)”, *Jurnal Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang*, Vol.18, No. 1, Juni 2015, diakses pada 22 Februari 2017 dari <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/viewFile/2840/3492>
- Firmanzah. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Hafied Cangara. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

<https://palembangkota.bps.go.id>, diakses pada 24 Januari 2017, pukul: 11.50 WIB

<http://sumsel.pks.id>, diakses pada 9 Februari 2017, pukul: 11.30 WIB

Ikhsan Darmawan. *Mengenal Ilmu Politik*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2015.

Ina Kencana Syafii dan Azrah. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Inspektorat Kota Palembang. *Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palembang Tahun 2014*. Palembang: Pemerintah Kota Palembang, 2014.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang.

Laporan Kerja DPD PKS Kota Palembang Periode 2010-2014.

Linggar Kharisma Suseno. "Pola Afiliasi Informal Organisasi Gerakan Mahasiswa Dengan Partai Politik", artikel Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas FISIP, Universitas Diponegoro, diakses pada 24 Februari 2017 dari [http://www.academia.edu/23257519/Pola\\_Afiliasi\\_Informal\\_Organisasi\\_Gerakan\\_Mahasiswa\\_Dengan\\_Partai\\_Politik\\_Studi\\_Kasus\\_Sistem\\_Kaderisasi\\_Kesatuan\\_Aksi\\_Mahasiswa\\_Muslim\\_Indonesia\\_Dengan\\_Partai\\_Keadilan\\_Sejahtera](http://www.academia.edu/23257519/Pola_Afiliasi_Informal_Organisasi_Gerakan_Mahasiswa_Dengan_Partai_Politik_Studi_Kasus_Sistem_Kaderisasi_Kesatuan_Aksi_Mahasiswa_Muslim_Indonesia_Dengan_Partai_Keadilan_Sejahtera)

Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. *Memperjuangkan Masyarakat Madani*. Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera, 2008.

Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet.10. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Muhammad Adrian Perdana, "Kinerja Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tingkat Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Rumbai Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014", *Jurnal JOM FISIP* Vol. 3, No. 2, Oktober 2016, diakses pada 21 Februari 2017 dari <https://media.neliti.com/media/publications/33205-ID-kinerja-kader-partai-keadilan-sejahtera-pks-tingkat-dewan-perwakilan-cabang-dpc.pdf>

Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.

M. Ridwan Saiman (Ketua Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera), *Wawancara*, 6 Maret 2017.

- Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Nurman. “Strategi Partai Keadilan Sejahtera Kota Padang Dalam Memenangkan Pemilu Legislatif 2004”, *Penelitian*. Padang: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, 2005.
- Peter Schroder. *Strategi Politik*. Jakarta: Friedich Naumann Stiftung Fuer Die Freiheit, 2008.
- Pramudityo. “Analisis Penurunan Suara Partai Persatuan Pembangunan Dan Kenaikan Suara Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2009 (Study Kasus Provinsi D. I. Yogyakarta ),” *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota Legislatif.
- Ramlan Subakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widisuasarana, 1992.
- Rangga Eka Saputra, “Dinamika Internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS)”, *Skripsi*. Jakarta: FISIP, UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Riza Pahlevi. *Kajian Dakwah Kultural*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015.
- Samsul Munir. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Sitti Rahmi AR, dkk. “*Strategi Komunikasi Politik Dalam Sistem Recruitmen Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wilayah Sulawesi Tenggara*”, e-Jurnal Publica PPS AP-UHO Vol .I, No.1, Januari 2016, diakses pada 13 Maret 2017 dari <http://ojs.uho.ac.id/index.php/publika/article/download/1401/992>
- Sudirman Tebba. *Islam Menuju Era Reformasi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Surat Keterangan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang Periode 2015-2019.
- Taliziduhu Ndraha. *Metodelogi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Tim Penulis. *The Indonesian Institute Center For Public Policy Research*. Jakarta: The Indonesian Institute, 2009.

- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*. Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora Iain Raden Fatah, 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Pasal 39 Tentang Syarat Keikutsertaan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 86, 89, 301 tentang Sanksi atas Pelanggaran Larangan Kampanye.
- Yulfa Cindo Sari (Wakil Ketua DPD PKS kota Palembang), *Wawancara*, 14 April 2017.
- Zuly Qodir. *Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

**DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI**

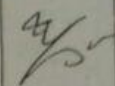
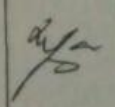
Nama : Anggi Dwi Saputri

Nim : 1544300004

Jurusan : Politik Islam

Judul Skripsi : Kekuatan Politik Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu Legislatif Kota Palembang Tahun 2014

Dosen Pembimbing I : Dr. Nyimas Umi Kalsum, M.Hum

No	Hari/Tanggal	Saran	Keterangan	Paraf
1.	JUMAT / 20.1.17	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lih. cara pembuatan Alinea.</li> <li>- Sumber Berman / informasi terkait Partai Keadilan - PKS Kroscek Ulangan</li> <li>- Hindari kutipan dr Web.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- survei Markas PKS</li> <li>- Buat Daftar Pertanyaan</li> <li>Wawancara</li> </ul>	
2.	SELASA / 14.2.2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buat daftar Pertanyaan scr sistematis :</li> <li>- kemudian diwawahi dgn melihat kemegahan partai tsb.</li> <li>- perhatikan Penulisan kata ts berawalan dan bembungan.</li> <li>- Kerangka <sup>teori</sup> &amp; berikan kesimpulan dr teori ts &amp; penerap</li> </ul>		



3.	21. 2. 2017	ACC BAB 3 LANGUTKAN BAB BUKU KPA		$\frac{2}{5}$
4.	19. 3. 2017	Logo partai Berwarna Bab III diberi judul Kata 2 yg di Bold harus jelas tidak sama bag. dr sub. bab di Bold- kan.	Perbaikan	$\frac{2}{2}$
5	2. 6. 2017	Acc Bab III & IV Bertuliskan Intisari Daftar Pustaka).		$\frac{2}{5}$
6	15. 6. 2017	Lengkap isi uruh dr skripsi		$\frac{2}{5}$
7.	26. 6. 2017	Acc dan siap u ujian Munasabah		$\frac{2}{5}$

**DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI**

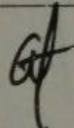
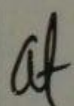



Nama : Anggi Dwi Saputri

Nim : 1544300004

Jurusan : Politik Islam

Judul Skripsi : Kekuatan Politik Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu Legislatif Kota Palembang Tahun 2014

Dosen Pembimbing II : Amaliatulwalidain, M.A

No	Hari/Tanggal	Saran	Keterangan	Paraf
1	14 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Judul difokuskan pada satu partai Islam saja dan jangan disingkat "kekuatan politik Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu Legislatif Kota Palembang Tahun 2014"</li> <li>- footnote</li> <li>- rumusan masalah satu saja</li> <li>- kerangka teori ditambah dan lebih diperjelas (partai kader dan partai massa)</li> </ul>	/	
2	4 Januari 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Latar belakang tambah informasi</li> <li>- kerangka teori berubah, cari teori strategi (strategi ofensif dan strategi defensif)</li> <li>- Rumusan masalah diubah</li> </ul>	/	
3.	13 Januari 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ tambah kerangka teori</li> <li>→ Sistematika Bab.</li> </ul>	/	
4.	21 Februari 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tentang strategi PKS</li> </ul>		
5.	15 Maret 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Straksi</u> <u>BI DABTI</u> <u>pinboh</u></li> <li>- <u>gaji &amp; waktu</u></li> </ul>		

6.	27 Maret 2017	Penambahan teori Acc BAB I - II		at
7	4 Mei 2017	Revisi BAB III dan lanjut Bab 4  - Analisis sesuai teori yang digunakan - Faktor penyebabnya dijelaskan lebih rinci		at at
8	17 Mei 2017	Tambah analisis strategi - Judul diganti dengan - Elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014		at at
9	24 Mei 2017	Bab III dan IV Acc Siap untuk disidangkan		at at

## DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL

Nama : Anggi Dwi Saputri

Nim : 1544300004

Judul Skripsi : Kekuatan Politik Partai Islam Pada Pemilu Legislatif Kota Palembang

Tahun 2014

No.	Nama	Jurusan	Tanda tangan
1	Aman Saputra	Polis	
2	Doni Wollando	"	
3	Asriana Wicaksana	"	
4	Robela Maysondi	"	
5	Hikma darma	"	
6	M. ABIL ATE SYAH	"	
7	Mega Purnama Sari	Politik Islam	
8	Libay Indayani	"	
9	Mayang Sari	"	
10	Jamiaty	"	
11	Mel Wismu	"	
12	Abis Khal Hairullah	"	
13	Ricky Yudisri	"	
14	NUR OKTAWA	"	
15	Irsam Fumandika	"	
16	Mitan trisandhi	"	
17	Lena Juwal	"	
18	Rohmaniyah	Perpustakaan	
19	Bujang Crenni	"	
20	Mika Wanyuni	"	
21	JAZAR BOLIHIN	Perpustakaan	



## TRANSKRIP WAWANCARA

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Wawancara ini ditujukan untuk mencari data dalam rangka penelitian penyusunan skripsi yang berjudul "*Elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu Legislatif Kota Palembang Tahun 2014*"

Besar harapan kami kepada bapak/ibu memberikan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Atas partisipasinya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

### **TRANSKRIP WAWANCARA**

1. Berapa jumlah peserta partai politik yang mengikuti pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014 ?
2. Bagaimana perkembangan hasil perolehan partai politik pada pemilu legislatif di kota Palembang tahun 2014? khusus PKS sendiri menduduki posisi ke berapa ?
3. Apa saja strategi politik yang dilakukan PKS untuk meningkatkan suara pada pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014 ? Apakah ada strategi khusus ?
4. Apa saja program-program yang ditawarkan PKS pada Pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014 ?
5. Bagaimana strategi pemasaran politik Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014 ?
6. Berapa dana yang dikeluarkan Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014 ? Sumbernya dari mana dan kontribusi apa yang diberikan partai kepada kader maupun caleg dan sebaliknya ?
7. Apa yang menjadi kekuatan Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014 ?
8. Berapa jumlah calon anggota dewan yang diajukan PKS pada Pemilu legislatif kota Palembang 2014 dan berapa target kursi yang ingin dicapai dengan hasil yang diterima pada pemilu legislatif tersebut ?
9. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan penurunan suara partai keadilan sejahtera pada pemilu legislatif kota Palembang ?
10. Apa saja upaya yang dilakukan PKS untuk meningkatkan suara pada pemilu yang akan datang ?

## TRANSKRIP WAWANCARA

### 1. Chemi Martin Punggar, SH, MH

1) *Pertanyaan* : Ada berapa jumlah peserta partai politik yang mengikuti pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014 ?

*Jawaban* : Pada pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014, jumlah parpol yang mengikuti pemilu legislatif ada 12 partai. Itu terdiri dari 7 partai nasionalis yaitu PDIP, Demokrat, Gerindra, Golkar, Nasdem, Hanura, PKPI dan 5 partai islam yaitu PPP, PKS, PBB, PKB, PAN. Berbeda di tahun 2009, jumlah parpol yang ikut pemilu legislatif jauh lebih banyak, ada 38 parpol.

2) *Pertanyaan* : Bagaimana perkembangan elektabilitas suara partai politik pada pemilu legislatif di kota Palembang tahun 2014? khususnya PKS sendiri menduduki posisi ke berapa ?

*Jawaban* : Seperti yang diketahui jika kita melihat hasil suara parpol setiap pemilunya, partai nasionalis selalu lebih unggul dibandingkan partai Islam. Elektabilitas terhadap partai nasional lebih tinggi dari partai Islam. Untuk PKS sendiri pada pemilu legislatif 2014 yang lalu, menduduki posisi ke 9 dari 12 partai pesaing. Lain halnya lagi ditahun 2009, PKS mendapatkan suara yang signifikan dan menduduki peringkat ke 4 dari 38 parpol pesaing.

### 3. M. Ridwan Saiman, SH, MH

1) *Pertanyaan* : Apa saja strategi politik yang dilakukan PKS untuk meningkatkan suara pada pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014 ? Apakah ada strategi khusus ?

*Jawaban* : Sebagai partai dakwah kader-kader PKS selalu melakukan perekrutan kader dan sosialisasi ke masyarakat dengan dua cara yaitu baik melalui gerakan kultural seperti melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan di majelis taklim, pengajian-pengajian, dan sebagainya. Begitu juga dengan gerakan



struktural yang sifatnya formal (jalur kepartaian). Alhamdulillah kegiatan merekrut kader ini berjalan dengan baik.

Strategi Politik PKS lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat, membangun komunikasi dan sosialisasi dengan masyarakat, serta kita juga siap menerima dan membuktikan diri sebagai partai yang siap bekerja untuk rakyat dan mendengar apa masukan-masukan dari masyarakat. Pada pemilu yang lalu, kita juga menggunakan jargon cinta, kerja, dan harmoni sebagai strategi partai.

- 2) *Pertanyaan* : Apa saja program-program yang ditawarkan PKS pada Pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014 ?

*Jawaban* : Programnya adalah dalam bentuk pelayanan dengan berbagai jenis kegiatan baik berupa pelayanan sosial seperti kesehatan, baksos dan melakukan pasar murah. Kemudian pelayanan pendidikan yang bisa dirasakan masyarakat dengan dicanangkan 20% dari APBN untuk pendidikan dan alhamdulillah itu berhasil sampai tingkat kab/kota, kemudian pelayanan dalam segi keagamaan.

- 3) *Pertanyaan* : Bagaimana strategi pemasaran politik Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014 ?

*Jawaban* : Pemasaran politik yang kita lakukan banyak mengerahkan kader ke berbagai wilayah walaupun ada beberapa di iklankan tapi tidak banyak karena pendanaan kita yang minim jadi lebih mengerahkan kader/memanfaatkan kader, kita juga menggunakan sarana media cetak dan media online (twitter, fb, dll).

- 4) *Pertanyaan* : Berapa dana yang dikeluarkan Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014 ? Sumbernya dari mana dan kontribusi apa yang diberikan partai kepada kader maupun caleg dan sebaliknya ?

*Jawaban* : Pada saat pemilu setiap partai pasti membutuhkan modal yang banyak, Kalo masalah dana kita bisa cari sama-sama. Untuk dana, kita ada kas partai sumbernya bisa dari sumbangan/infaq para kader-kader (sebagian dari kader kita ini dari kalangan pengusaha, pegawai dan sebagainya) kemudian dana dari anggota dewan yang telah duduk di DPRD fraksi PKS, biasanya setiap anggota dewan itu menyetorkan 1,5jt perbulan kepada partai jadi kalo kursi kita

berkurang, itu mempengaruhi kas partai kita. PKS ini bisa dikatakan partai yang paling sedikit uangnya. Jadi soal pendanaan bisa dibilang sedikit banyak berpengaruh pada penurunan suara PKS.

- 5) *Pertanyaan* : Apa yang menjadi kekuatan Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014 ?

*Jawaban* : Kekuatan PKS kota Palembang pada saat pemilu yaitu PKS memiliki solidaritas kader yang sangat tinggi karena PKS mempunyai keunikan tersendiri dalam sistem kaderisasi dan pembinaan yang dilakukan tiap pekan terhadap kader-kadernya. Sistem Pengkaderan PKS itu, ada dalam bentuk kegiatan tarbiyah, disinilah mereka itu dikader, diberdayakan/dibina dan di beri pemahaman tentang ilmu-ilmu agama. Di PKS tidak hanya kader yang dibina tetapi juga ada pembinaan keluarga.

- 6) *Pertanyaan* : Apakah faktor-faktor yang menyebabkan penurunan suara partai keadilan sejahtera pada pemilu legislatif kota Palembang ?

*Jawaban* : Penyebab menurunnya perolehan suara PKS itu pada pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014 yaitu citra partai PKS pada saat itu kurang baik. Pada awal tahun 2013 setahun sebelum pemilu dilaksanakan, terjadinya tsunami politik dimana kasus yang menimpa presiden PKS yaitu LHI yang dianggap telah melakukan korupsi suap impor daging sapi dan pencucian uang sehingga hal ini berdampak kebawah. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, black campaign terhadap PKS agak kurang. Kemudian faktor financial dimana pada saat pemilu setiap partai pasti membutuhkan modal yang banyak, Kalo masalah dana kita bisa cari sama-sama. PKS sendiri bisa dikatakan partai yang paling sedikit uangnya. Jadi soal pendanaan bisa dibilang sedikit banyak berpengaruh pada penurunan suara PKS. Pengaruh media massa, kalau di kota besar ini media sungguh luar biasa, pemberitaan terhadap PKS dampaknya terasa ada tsunami politik dan berpengaruh pada penurunan suara dan kursi yang mengakibatkan perolehan khas partai berkurang.

- 7) *Pertanyaan* : Apa saja strategi atau upaya yang dilakukan PKS untuk meningkatkan suara pada pemilu yang akan datang ?

*Jawaban* : Menyadarkan masyarakat untuk melek politik yang masih suka politik uang dan mungkin sebagian partai ada yang menggunakan hal seperti itu tetapi tidak semua partai yang melakukannya.

- 8) *Pertanyaan* : Bagaimana kriteria caleg PKS pada pemilu legislatif kota Palembang ?

*Jawaban* : Untuk kriteria dalam memilih caleg dilihat dari jenjang kader, jaringan atau relasi yang dimiliki, basis konsistennya (maksudnya seperti ini karena kita partai Islam apakah kader ini mempunyai binaan-binaan di majelis taklim atau forum keagamaan lainnya, biasanya para CAD ada seperti itu) dan besarnya dukungan dari keluarga.

#### **4. Aulia Rahman, SH, MH**

- 1) *Pertanyaan* : Apa saja strategi politik yang dilakukan PKS untuk meningkatkan suara pada pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014 ? Apakah ada strategi khusus ?

*Jawaban* : Strategi yang dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat, PKS melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk pelatihan-pelatihan, pertemuan mingguan, maupun kegiatan keagamaan melalui majelis taklim, tablik akbar, kajian-kajian dan juga mengadakan bakti sosial bahkan kegiatan seperti ini di PKS tidak hanya dilakukan pada saat pemilu, karena bagi PKS hal itu merupakan konsekuen sebagai partai dakwah.

- 2) *Pertanyaan* : Bagaimana strategi pemasaran politik Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014 ?

*Jawaban* : PKS melakukan berbagai cara yang bisa dilakukan oleh struktur partai maupun kader-kadernya seperti melakukan kegiatan kampanye direct selling dari rumah ke rumah, pemilih ke pemilih, dan kegiatan kampanye besar dengan pengerahan kader ke berbagai wilayah untuk menawarkan program-program

partai seperti memperkenalkan visi, misi, platform dan sebagainya sekaligus memperkenalkan para caleg. Kemudian PKS juga menggunakan sarana media cetak, media online, reklame, spanduk dan lain-lain, kegiatan ini sudah dilakukan dengan optimal.

- 3) *Pertanyaan* : Apa yang menjadi kekuatan Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014 ?

*Jawaban* : Yang menjadi kekuatan PKS pada setiap pemilunya yang pertama dilihat dari kekuatan Internal partai yaitu ada pada kader khususnya di Sumsel anggota kader yang terbanyak ada di kota Palembang. Kedua, ada pada struktur partai dan ketiga, ada pada ketokohan para caleg. Pada struktur partai kalau dilihat dari tingkat kota disebut (DPD), kecamatan (DPC) sampai kelurahan (DPRa). Setidak-tidaknya semua struktur ini ada kepengurusan. PKS inilah partai yang tidak pernah berhenti bergerak, selalu ada kegiatan dan tidak pernah sepi. Kegiatannya setiap hari setiap minggu ada saja kegiatan yang dikerjakan oleh struktur partai baik itu kegiatan massif ataupun kegiatan kelompok-kelompok dalam struktur partai (baik atas nama parpol maupun atas nama sayap-sayap politik PKS), Selain kader, struktur juga merupakan kekuatan utama dalam kemenangan partai PKS. selain itu, dilihat dari kekuatan eksternal PKS itu ada pada sayap-sayap politik PKS yaitu sebagai partai dakwah yang melebarkan sayap-sayap politiknya ke organisasi maupun lembaga-lembaga dakwah kampus, sekolah, dan majelis. Pada pemilu 2014 kemarin, kita juga berkoalisi dengan salah satu pasangan calon walikota Palembang dari partai PDI-P saat itu.

- 4) *Pertanyaan* : Apakah faktor-faktor yang menyebabkan penurunan suara partai keadilan sejahtera pada pemilu legislatif kota Palembang ?

*Jawaban* : PKS melakukan survey dengan membuat program direct selling. Dimana semua kader PKS dimobilisasi/digerakkan mengikuti kegiatan tersebut. Oleh DPD PKS kota Palembang, semua kader dikumpulkan dalam satu tempat di Sako kemudian diberi arahan, lalu semua kader disebar dengan melakukan door to door, termasuk saya juga ikut. Akhirnya dari survey itu didapatkan faktanya tidak

seperti apa yang dibayangkan, yang pada awalnya hanya masalah korupsi, ternyata faktor dominan di masyarakat khususnya para wanita kota Palembang itu mengenai masalah perkawinan, masalah wanita (poligami). Jadi pemilih menentukan pilihannya bukan karena masalah korupsi atau tidak, tetapi justru lebih besar dominan faktor poligami. Jadi, yang dirasakan kader-kader PKS waktu itu berat sekali. Pada pemilu legislatif yang lalu, Yaa.. kita melihat juga adanya keterlambatan PKS dalam merumuskan strategi pemenangan. Dimana, strategi pemenangan selesai dirumuskan sudah dekat dengan waktu pelaksanaan pemilu. Jadi yang mestinya kita melakukan penokohan caleg dua tahun sebelum pemilu, pada pemilu kemarin hanya satu tahun karena kita yakin pada pemilu 2009 kita sudah masuk di empat besar peluang suaranya akan meningkat di tahun 2014 dan ternyata tidak, Yaa itu juga menjadi penyebab turunnya suara partai. Penyebab lainnya yaitu faktor keterpilihan itu tidak hanya bergantung pada partai maupun para kader/caleg, tetapi sedikit banyak bergantung juga pada politik uang. Salah satu indikasi politik uang itu cukup dominan ditahun 2014. Misalnya PKS sangat sering melakukan kegiatan kampanye baik dalam bentuk pelayanan sosial/bakti sosial maupun advokasi termasuk juga pemberdayaan/pembinaan masyarakat, disatu sisi justru partai lain tidak pernah muncul melakukan hal seperti itu bahkan partai/caleg tidak pernah kampanye tapi justru menang.

- 9) *Pertanyaan* : Apa saja strategi atau upaya yang dilakukan PKS untuk meningkatkan suara pada pemilu yang akan datang ?

*Jawaban* : Upaya yang dilakukan PKS kedepan adalah evaluasi dari 2014, PKS sekarang melakukan pencalegan dini, dalam waktu dekat PKS sudah bisa buat daftar bakal calon (DBC). Ditahun 2016 kemaren, PKS sudah mengadakan pemilu internal, masing-masing kader inti mengusulkan nama-nama kader ataupun orang diluar kader yg bisa dicalegkan. Semua kader inti mengirimkan nama yang sudah direkap oleh panitia yang bertugas kemudian tinggal dideklarasikan saja pengumuman DBC. Harapannya setelah bakal caleg ini dikukuhkan mereka bisa langsung bergerak dan merumuskan pemenangan.

## 5. Yulfa Cindosari, A.Md

- 1) *Pertanyaan* : Apakah faktor-faktor yang menyebabkan penurunan suara partai keadilan sejahtera pada pemilu legislatif kota Palembang ?

*Jawaban* : Faktor internal yang menyebabkan turunnya perolehan suara PKS yaitu satu tahun sebelum pemilu ada suatu kejadian besar yang menasional. Pada waktu itu LHI tertangkap tangan menerima suap, padahal operasi tangkap tangan itu LHI tidak sedang berada di hotel tetapi dia sedang berada di kantor DPP PKS dan sedang melakukan rapat. Yaa.. Presiden PKS ditangkap tentu berdampak ke bawah, ke masyarakat dengan PKS korupsi kasus sapi. Pada pemilu 2014 kemarin itu pemilu yang paling panas diantara caleg bukan hanya diantara partai tapi para caleg sama-sama satu partai itu ribut, maka terjadilah persaingan yang tidak sehat diantara para caleg sesama partai sehingga sedikit timbul pergeseran dan sedikit mempengaruhi perolehan suara. Selain itu adanya kelemahan-kelemahan PKS seperti belum kokohnya basis sosial/jaringan yang dimiliki partai/caleg dan sebagian caleg yang kurang memahami strategi. Faktor eksternalnya, masyarakat pemilih masih sangat pragmatis dalam arti suara mereka masih sangat mudah untuk dibeli. Partai kalau datang ingin menawarkan sesuatu pada masyarakat, masyarakat itu sudah terpola bahwa anda mau memberi kami apa?, dan pertanyaan memberi itu bukan sebuah ide atau gagasan yang mereka inginkan, tapi yang mereka minta kebanyakan adalah dalam bentuk material seperti uang dan lain-lain. Selain itu, sebagian masyarakat yang tidak peduli dengan proses pemilu sehingga masyarakat tidak memilih/golput

- 2) *Pertanyaan* : Apa saja strategi atau upaya yang dilakukan PKS untuk meningkatkan suara pada pemilu yang akan datang ?

*Jawaban* : Kedepannya PKS melakukan proses penjaringan lebih awal untuk caleg kemudian mensosialisasikan tokoh-tokoh caleg dengan penokohan secara dini minimal 2 tahun sebelum pemilu supaya caleg-caleg PKS lebih dikenal masyarakat, mencermati UU yang dinamis/berubah-ubah, mencari dana,

penyiapan saksi (yang diacungi jempol KPU yaitu PKS mempunyai pom c1 data yang vailed), kemudian silaturahmi.

## 6. Darussalam, SH

- 1) *Pertanyaan* : Berapa jumlah calon anggota dewan yang diajukan PKS pada Pemilu legislatif kota Palembang 2014 dan berapa target kursi yang ingin dicapai dengan hasil yang diterima pada pemilu legislatif tersebut ?

*Jawaban* : pada pemilu legislatif 2014 PKS mengajukan 50 calon anggota dewan yang terdiri dari 33 laki-laki dan 17 perempuan. Partai menargetkan 10 calon anggota untuk dapat duduk di DPRD kota Palembang, tetapi yang terpilih ada 3 orang dan semuanya dari kader PKS. Lain halnya pada pemilu 2009, yang terpilih ada 5 orang dan semuanya juga dari kader PKS.

- 2) *Pertanyaan* : Apakah faktor-faktor yang menyebabkan penurunan suara partai keadilan sejahtera pada pemilu legislatif kota Palembang ?

*Jawaban* : Yaa.. faktor lain turunnya capaian suara PKS pada pemilu legislatif kurangnya figur tokoh di dalam tubuh partai sedikit banyak sering menjadi penyebab akselerasi maneuver kegiatan partai dan sosialisasi belum dirasakan optimal di tengah masyarakat/masyarakat masih belum akrab dengan PKS. Yaa.. terlihat dari hasil survey kita, hanya 11% responden yang menyatakan kedekatannya terhadap PKS.

## 7. Dwi Yanni Suswati, ST

- 1) *Pertanyaan* : Apa saja program-program yang ditawarkan PKS pada Pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014 ?

*Jawaban* : Program-program yang kita canangkan pada saat pemilu kemarin, seperti melakukan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat berupa pengecekan kolesterol, gula darah dan sebagainya, kemudian pemeriksaan mata dengan memberikan kaca mata gratis kepada masyarakat, melakukan sembako murah, oh yaa.. kita juga bekerjasama dengan produk susu anline.

- 2) *Pertanyaan* : Apa yang menjadi kekuatan Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014 ?

*Jawaban* : PKS ini mempunyai kekhasan tersendiri ya, yang membedakan PKS dengan partai lain itu ya struktur partai dan kader-kader PKS yang selalu saling bantu membantu dalam hal apapun. Termasuk ketika kampanye pemilu, PKS secara bersama-sama mensosialisasikan program-programnya dan mengenalkan caleg-calegnya kepada masyarakat.

- 3) *Pertanyaan* : Apakah faktor-faktor yang menyebabkan penurunan suara partai keadilan sejahtera pada pemilu legislatif kota Palembang ?

*Jawaban* : Pada pemilu 2014 yang lalu, persaingan yang terjadi antar caleg di internal partai sangat dirasakan begitu kuat. Apalagi pada saat kampanye, PKS punya sistem aturan dalam kampanye misalnya dalam pembagian wilayah, percaleg sudah mempunyai fokus wilayah masing-masing untuk kampanye tetapi ada kader caleg yang suka masuk/menyelinap ke wilayah caleg yang sama partai tanpa konfirmasi lagi kepada caleg yang punya wilayah sehingga menimbulkan konflik dan pergeseran diantara para caleg PKS yang bersaing. Hal ini juga sedikit berdampak kepada perolehan suara partai. Selain itu, masyarakat kita ini belum melek politik, masih diiming-iming dengan uang bukan melihat kualitas personal tetapi melihat siapa yang banyak memberi mereka uang. Sebenarnya politik itu tidak kotor hanya saja oknum-oknumnya yang membuat menjadi kotor. Hal ini lah yang menjadi salah satu sebab perolehan suara PKS menurun.

#### **8. Caleg Dapil 5 sekaligus Ketua DPRa 34 Ilir PKS Kota Palembang**

- 1) *Pertanyaan* : Berapa dana yang dikeluarkan Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu legislatif kota Palembang tahun 2014 ? Sumbernya dari mana dan kontribusi apa yang diberikan partai kepada kader maupun caleg dan sebaliknya ?

*Jawaban* : Kontribusi yang diberikan partai kepada para caleg berupa dana 10jt percaleg untuk seribu suara dan selebihnya untuk berjihad dijalan Allah menggunakan dana pribadi. Biasanya mencari dana itu di kalangan kadernya kita



sendiri, paling misalnya ada kader yang bekerja di perusahaan ya paling minta bantu sama mereka. Jadi, untuk memenangkan dalam pemilu dibutuhkan modal yang sangat besar. Kalo ditanya saya habis modal berapa untuk pemilu kemarin, saya hanya menggunakan dana dari pemberian partai saja. Kalo dibandingkan dengan mereka yang sudah menjadi anggota dewan saat ini, tidak menutup kemungkinan modal yang dikeluarkan tidak sedikit.

- 2) *Pertanyaan* : Apakah faktor-faktor yang menyebabkan penurunan suara partai keadilan sejahtera pada pemilu legislatif kota Palembang ?

*Jawaban* : Pada saat pemilu kemarin kita sudah berjuang tapi kenyataan di lapangannya lain, kan 2014 kemarin terkenal dengan pemilu pesta rakyat. Jadi pemilu 2014 kemarin money politiknya sangat tinggi dibandingkan pemilu sebelumnya. Contohnya saja pengalaman saya pada pencalegkan kemarin, ada satu keluarga saya, dia lebih memilih dan berpaling ke partai lain dibandingkan saya sebagai keluarganya, itu karena dia dikasih duit (serangan fajar) yang dilakukan partai lain terhadap mereka. Kemudian kasus yang menimpa presiden PKS pada waktu itu, kita sebagai kader sempat goyah ini kasus beneran atau tidak, ternyata itu dibuat-buat saja untuk memecah belahkan partai tapi itu tidak berpengaruh bagi partai kita. Jadi siapa di dibelakangnya iya partai yang berkuasa saat itu, mereka sudah mengaku dan kita tau siapa oknumnya tapi ini rahasia ada dari pemerintahnya, ada juga dari pihak swastanya. Kemudian pemberitaan-pemberitaan di media televisi (tv-one, metro-tv, mnc-tv, rcti dan sebagainya) itu kan punya mereka gak ada punya PKS, jadi black campaign terhadap PKS itu sangat rentan.

## BIODATA INFORMAN WAWANCARA

### 1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Palembang



Nama : Chemi Martin Punggar, SH, MH  
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 18 Mei 1988  
Umur : 29 Tahun  
Pendidikan : Magister Ilmu Hukum (S2)  
Jabatan : Kepala Bidang Sub Bagian Hukum KPU kota Palembang

## 2. Dewan Pengurus Daerah PKS Kota Palembang



Nama : Muhammad Ridwan Saiman, SH, MH  
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 16 Agustus 1977  
Umur : 40 Tahun  
Pendidikan : Magister Ilmu Hukum (S2)  
Jabatan : Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera  
kota Palembang

### 3. Dewan Pengurus Wilayah PKS Kota Palembang



Nama : Aulia Rahman, SH, MH

Tempat Tanggal Lahir : Srijaya, 16 agustus 1982

Umur : 35 Tahun

Pendidikan : Magister Ilmu Hukum (S2)

Jabatan : Ketua Bidang Politik Hukum / Tim Advokasi Dewan  
Pengurus Wilayah PKS Sumatera Selatan

#### 4. Dewan Pengurus Daerah PKS Kota Palembang



Nama : Yulfa Cindosari, A.Md  
Tempat Tanggal Lahir : Baturaja, 25 Juli 1974  
Umur : 43 Tahun  
Pendidikan : Sarjana Diplomat (D3)  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera kota Palembang

#### 5. Dewan Pengurus Daerah PKS Kota Palembang

Nama : Darussalam, SH  
Tempat Tanggal Lahir : Desa Tempirai-Kabupaten PALI, 02 April 1972  
Umur : 45 Tahun  
Pendidikan : Sarjana Ilmu Hukum (S1)  
Jabatan : Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Daerah PKS kota Palembang

## 6. Dewan Pengurus Daerah PKS Kota Palembang



Nama : Dwi Yanni Suswati, ST

Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 12 Januari 1976

Umur : 41 Tahun

Pendidikan : Sarjana Teknik (S1)

Jabatan : Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga  
Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera kota  
Palembang



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Prof. H. H. Zaimal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 353480 website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : B- 177 /Un.09/IV.2/PP.01/ 02 /2017  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Pimpinan DPD PKS  
Kota Palembang  
di tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Schubungan dengan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, maka dengan ini kami mohon kepada bapak/ibu kiranya dapat memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami sbb:

No	Nama/NIM	Jurusan/ Prodi	Tempat Penelitian	Judul Penelitian
1	Anggi Dwi Saputri 1544300004	Politik Islam	DPD PKS Kota Palembang	Kekuatan Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pada Pemilu Legislatif Kota Palembang Tahun 2014

Untuk melakukan pengambilan data penelitian

Lama pengambilan data/penelitian : 08 Februari s.d. 30 April 2017

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon bapak/ibu tidak berkeberatan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa kami, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan bapak/ibu, untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 08 Februari 2017



Dekan

Dr. Nor Huda, M.Ag, M.A  
NIP. 197011142000031002





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3.5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 353480 website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : B- 178 /Un.09/IV.2/PP.01/02/2017  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Pimpinan KPU  
Kota Palembang  
di tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sehubungan dengan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, maka dengan ini kami mohon kepada bapak/ibu kiranya dapat memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami sbb:

No	Nama/NIM	Jurusan/ Prodi	Tempat Penelitian	Judul Penelitian
1	Anggi Dwi Saputri 1544300004	Politik Islam	KPU Kota Palembang	Kekuatan Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pada Pemilu Legislatif Kota Palembang Tahun 2014

Untuk melakukan pengambilan data penelitian  
Lama pengambilan data/penelitian : 08 Februari s.d. 30 April 2017

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon bapak/ibu tidak berkeberatan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa kami, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan bapak/ibu, untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 08 Februari 2017



Dr. Nor Huda, M.Ag, M.A  
NIP. 197011142000031002

www.pk-sejahtera.org



Nomor : 17/K/AF-09- PKS/1438  
Lamp -  
Hal *Izin Penelitian*

Palembang, 19 Jumadil Awwal 1438 H  
16 Februari 2017 M

Kepada Ykh.  
*Dekan Fakultas Adab dan Humaniora*  
*UIN Raden Fatah Palembang*  
di -  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat dan salam kita panjatkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya yang setia sampai hari kiamat, Amma ba'du.

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: B-177/Un.09/IV 2/PP.01/02/2017 tanggal 03 Februari 2017. Perihal Mohon Izin Penelitian, Maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami memberikan izin untuk hal tersebut.

Demikianlah atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Umum,  
  
PKS  
Muhammad Ridwan, S.H., MH.



PANITIA PELAKSANA  
PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QURAN  
FAKULTAS ADAB DAN BUDAYA ISLAM IAIN RADEN FATAH  
TAHUN AKADEMIK. 2012-2013

# Sertifikat

*Diberikan kepada:*

**NAMA :** Anggi Dwi Saputri  
**NIM :** 1242 1004

Sebagai peserta didik Baca Tulis Al-Quran dan dinyatakan  
Lulus dengan nilai 65 (G)

Palembang, Oktober 2013  
Ketua,

Otoman, S.S., M. Hum.  
NIP. 19760516 200710 1 005



Menggetahui



Dr. H. J. Suyuthi P, M.A.  
NIP. 19560713 198503 1 001



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 353480 website : www.radenfatah.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS BTA DAN TAHFIDZ AL-QURAN**

Nomor : 60/LAB-FA/BTA&TQ/II/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Abdurasyid, M.Ag  
NIP : 19670222 1994031003  
Jabatan : Kepala Laboratorium Fakultas Adab dan Humaniora  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya Bahwa :

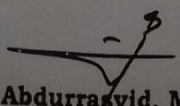
Nama : ANGGI DWI SAPUTRI  
NIM : 1544300005  
Jur/Konsentrasi : POLITIK ISLAM

Telah mengikuti bimbingan BTA dan menghafal surah serta ayat-ayat Pilihan sebagai berikut :

No	Nama Surah	Ayat
1.	Al-Kautsar	1-3
2.	Al-Humazah	1-9
3.	Al-Mu'minin	1-11
4.	Al-Mujadalah	9-11
5.	Al-Ghasyiah	1-26
6.	Al-Baqarah	225
7.	Al-Baqarah	284-286
8.	Adh-Dhuha	1-11
9.	Al-Bayyinah	1-8
10.	Asy-Syams	1-15
11	Al-Kahfi	107-110
12	An-Nur	35
13	Al-Fath	29
14	Al-Jumu'ah	9-11
15	Al-Hasyr	18-21

Dengan Predikat : **Baik**  
Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 13 Februari 2017  
Kepala Laboratorium

  
**Drs. Abdurasyid, M.Ag**  
 NIP 19670222194031 003



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3.5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 353480 website : www.radenfatah.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

No. B- /039 /Un.09/IV.02/PP.01/07/2017

Ketua Program Studi Politik Islam (PI) Fakultas Adab dan Humaniora Islam UIN Raden Fatah menerangkan bahwa:

**Nama** : Anggi Dwi Saputri  
**NIM** : 1544300004  
**Program Studi** : Politik Islam

Telah mengikuti Ujian Komprehensif dan dinyatakan **Lulus** dengan nilai kumulatif **78,8 (B)** dan selanjutnya dapat mengikuti Ujian Munaqasyah.

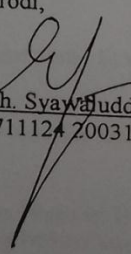
Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

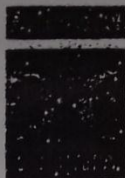
KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA  
Wakil Dekan I

Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum.  
NIP. 19710727 199703 2 005

Palembang, 13 Juli 2017  
Mengetahui,

Ketua Prodi,

  
Dr. Moch. Syawaluddin, M.A.  
NIP. 19711124 200312 1 001



**PKS**

**SURAT KEPUTUSAN  
DEWAN PENGURUS PUSAT  
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

Nomor: 096/SKEP/DPP-PKS/1437

tentang

**DEWAN PIMPINAN TINGKAT DAERAH  
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
KOTA PALEMBANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERIODE 2015 - 2020**

Surat Permohonan Bidang Wilayah Dakwah Sumatera Bagian Selatan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor 15/D/WLD2-PKS/1436 tanggal 13 Oktober 2015.

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 juncto Pasal 29 Panduan Partai Keadilan Sejahtera Nomor 271/SKEP/DPP-PKS/1436 tentang Musyawarah Wilayah dan Daerah Partai Keadilan Sejahtera.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah Partai Keadilan Sejahtera.
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera.
  2. Keputusan Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Nomor 4/ SKEP/MS-PKS/X/1436 tanggal 10 Agustus 2015.
  3. Panduan Partai Keadilan Sejahtera Nomor 271/SKEP/DPP-PKS/1436 tanggal 23 September 2015.
  4. Hasil Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera tanggal 23 September 2015.
  5. Hasil Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera tanggal 18 September 2015.
  6. Hasil Pemilihan Umum Internal Anggota Dewan Pimpinan Tingkat Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Periode 2015 - 2020.
  7. Berita Acara Rapat Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Selatan tanggal 10 Oktober 2015.

Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera  
MD Building, Jl. TB Simatupang No.82, Pasar Minggu, Jakarta 12520  
Telp. 021-78842116, Faks. 021-78844456

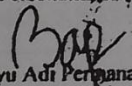
**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : DEWAN PIMPINAN TINGKAT DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2015 - 2020.
- Kesatu : Nama-nama Anggota Dewan Pimpinan Tingkat Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tersebut terlampir dalam Keputusan ini.
- Kedua : Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Selatan segera mengusulkan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah di wilayahnya kepada Bidang Wilayah Dakwah Sumatera Bagian Selatan untuk mendapatkan persetujuan.
- Keempat : Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Selatan menetapkan dan melantik Dewan Pimpinan Tingkat Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan hingga selesainya masa khidmah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan di Musyawarah Daerah tahun 2020.
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
DEWAN PENGURUS PUSAT  
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 8 Muharram 1437 H  
21 Oktober 2015 M

Biro Hukum, Personalia, dan Rumah Tangga

  
Bayu Adi Permana, SH

**DEWAN PENGURUS PUSAT  
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

td

**MOHAMAD SOHIBUL IMAN**  
Presiden

td

**MUHAMAD TAUFIK RIDLO**  
Sekretaris Jenderal

Salinan disampaikan kepada:

- Ketua Majelis Syura;
  - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat;
  - Ketua Dewan Syariah Pusat;
  - Ketua Bidang Wilayah Dakwah Sumatera Bagian Selatan;
  - Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
  - Ketua Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
  - Ketua Dewan Syariah Wilayah Provinsi Sumatera Selatan
- 1 Peninggal

Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera  
 Nomor : 096/SKEP/DPP-PKS/1437  
 Tanggal: 21 Oktober 2015

**ANGGOTA DEWAN PIMPINAN TINGKAT DAERAH  
 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
 KOTA PALEMBANG  
 PROVINSI SUMATERA SELATAN  
 PERIODE 2015 - 2020**

NO	NAMA	AMANAHAH
1	SUBAGIO RACMAD SENTOSA	KETUA MAJELIS PERTIMBANGAN DAERAH
2	M. ANWAR AL SYADAT	SEKRETARIS MAJELIS PERTIMBANGAN DAERAH
3	MUSLIMAN	KETUA DEWAN SYARIAH DAERAH
4	INDRA JAYA	SEKRETARIS DEWAN SYARIAH DAERAH
5	M. RIDWAN SAIMAN	KETUA UMUM DEWAN PENGURUS DAERAH
6	YULFA CINDOSARI	WAKIL KETUA UMUM DEWAN PENGURUS DAERAH
7	JUMONO	SEKRETARIS UMUM DEWAN PENGURUS DAERAH
8	EKA ERFANIE	BENDAHARA UMUM DEWAN PENGURUS DAERAH
9	AMRIL SUDIONO	KETUA BIDANG KADERISASI DEWAN PENGURUS DAERAH

**DEWAN PENGURUS PUSAT  
 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

ttd  
**MUHAMAD SOHIBUL IMAN**  
 Presiden

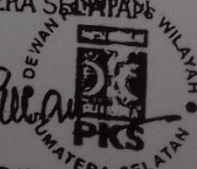
ttd  
**MUHAMAD TAUFIK RIDLO**  
 Sekretaris Jenderal

Salinan sesuai dengan aslinya  
 DEWAN PENGURUS PUSAT  
 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Di: Hukum, Personalia, dan Rumah Tangga

*Bayu*  
 Bayu Adi Permana, SH

DISAHKAN OLEH  
 DEWAN PENGURUS WILAYAH  
 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
 SUMATERA SELATAN

*Irwan Irawadi*  
  
**IRWAN IRAWADI, S.IP**  
 SEKRETARIS UMUM



MODEL EB-1  
Halaman 1

REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK  
DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014



KOTA : PALEMBANG  
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

No	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH					JUMLAH SUARA SAH PINDAHAN HASIL
		D. PIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5	
1	Partai NasDem	11.639	9.307	4.333	1.392		40.171
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	10.721	5.572	10.070	11.591		37.959
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	9.009	7.321	7.376	4.802		28.508
4	PDI PERJUANGAN	27.058	20.830	8.247	16.098		72.233
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	14.100	7.602	8.232	11.932		41.991
6	PARTAI GERINDRA	15.996	12.117	8.242	10.992		47.347
7	PARTAI DEMOKRAT	17.784	15.377	8.432	13.951		55.544
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	8.348	6.790	8.102	14.126		37.366
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5.231	6.343	7.673	11.433		30.583
10	PARTAI HATI HURAI BERTAT	10.493	5.349	9.002	7.511		32.355
14	PARTAI BULAN BINTANG	7.488	7.826	10.776	6.274		32.364
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1.695	1.237	1.095	3.503		9.381
	JUMLAH	139.556	110.976	91.600	126.583		448.215

ANALISA SELURUH SUARA SAH PARTAI POLITIK

720.705



PALEMBANG, 12/11/2014  
KOMISI PENILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

1. ABDUL KARIM NASUTION, M.Hum
2. RUQYANTO ZANGRIBUAN
3. FIRAMON SYAKIL M.M., M.Com
4. SYARIFUDDIN SE
5. DEVI YULIANTI, SH

KELOMPOK  
ANGGOTA  
ANGGOTA  
ANGGOTA  
ANGGOTA

MODEL ER-1  
Halaman 2

REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK  
DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014



KOTA : PALEMBANG  
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

No	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA SAH PINDAHAN dari Hal 1		PEROLEHAN SUARA SAH			JUMLAH SUARA SAH
		a	b	DAPILS	DAPIL 6	17	
1	Partai NasDem	50.171	14.337	9.851	-	-	64.359
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	37.959	7.512	10.376	-	-	57.547
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	28.565	5.489	4.989	-	-	47.365
4	PDI PERJUANGAN	72.233	27.784	30.183	-	-	120.200
5	PARTAI GOLONGAN MASYARAKAT	21.991	13.497	10.296	-	-	52.784
6	PARTAI GERINDRA	37.547	13.870	17.770	-	-	79.187
7	PARTAI DEMOKRAT	56.354	25.376	10.060	-	-	91.790
8	PARTAI AWAMAT NASIONAL	37.196	10.330	5.490	-	-	53.196
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	50.693	8.415	7.899	-	-	66.997
10	PARTAI HATI MURAH RASUL	33.559	5.889	7.237	-	-	46.685
14	PARTAI BULAN BINTANG	32.364	4.510	3.931	-	-	40.805
15	PARTAI KEBERHAKMATAN DAN PERSATUAN INDONESIA	9.351	1.337	2.254	-	-	12.942
	JUMLAH	668.215	182.345	110.145	-	-	720.705

JUMLAH SELURUH SUARA SAH PARTAI POLITIK 720.705

KOMISI PENDAHULUAN UMUM KOTA PALEMBANG, 22 MARI 2014



1. ABDUL KARIM NASUTION, M Hum
2. RUOPRANTO PANGARIPUAN
3. FIRZAMON SYAKTI, MAM, M Kom
4. SYAFRUDDIN, SE
5. DEWITULANTI, SH

- Setup
- Anggota
- Anggota
- Anggota
- Anggota

NODEL EP'S  
Halaman 1



REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK  
DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014

KOTA : PALEMBANG  
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

No	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI				Jumlah Kursi Pindaian Hh 1	
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	5	6
1	Partai NasDem	1	1	1	1	1	7
2	PARTAI KEBANGKITAJI BANGSA	1	1	1	1	1	1
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	1	1	1	1	2
4	PDI PERJUANGAN	2	2	1	1	1	6
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	1	1	1	1	2
6	PARTAI GERINDRA	1	1	1	1	1	3
7	PARTAI DEMOKRAT	1	1	1	1	1	4
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	1	1	1	1	2
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	1	1	1	1	1
10	PARTAI HATI NUBRAHI RAKYAT	1	1	1	1	1	2
14	PARTAI BUKAN BINTANG	1	1	1	1	1	2
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1	1	1	1	1	2
	Jumlah	10	8	6	6	8	32

PALEMBANG, 12 Mei 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG



1. ABDUL KARIM HASUTON, M.Hum
2. RUDYANTO PARGARIBJAN
3. FIRAMON SYAKTI, MM, M.Lam
4. SYARIFUDDIN, SE
5. DEVI YULIANTI, SH

Ketua  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota



REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK  
DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014

KOTA : PALEMBANG  
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

No	PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI PINDAHAN dari Hal 1	PEROLEHAN KURSI			JUMLAH KURSI
			DAPIL 5	DAPIL 6	DAPIL 6	
1	Partai Nida Dem	3	1	1	1	5
2	PARTAI KEMANGKOTAN BANGSA	1	1	1	1	3
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	1	1	1	4
4	PDI PERJUANGAN	5	2	1	1	4
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	1	1	1	5
6	PARTAI GERINDRA	3	1	1	1	5
7	PARTAI DEMOKRAT	3	2	1	1	6
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	1	1	1	4
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	1	1	1	3
10	PARTAI HATI NURANI BARYAT	2	1	1	1	4
11	PARTAI BULAN BINTANG	2	1	1	1	4
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	2	1	1	1	4
13	Jumlah	32	10	8	8	50

PALEMBANG, 12 Mei 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG



1. ABDUL KARIM MASUTION, M.Hum
2. RUDYANTO PANGARIBUAN
3. IRAMON SYATI, MM., M.Kom
4. SYARIFUDDIN, SE
5. DEVI YULIANI, SH

- Ketua
- Anggota
- Anggota
- Anggota
- Anggota

**DAFTAR NAMA DAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH CALEG DARI  
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PADA PEMILU LEGISLATIF KOTA  
PALEMBANG TAHUN 2014**

**Dapil 1 (Kec. Sukarami, Kemuning, & Alang-Alang Lebar)**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN L/P	STATUS	SUARA SAH
1	Evi Dahlia	P	Kader	1.139
2	Eka Erfanie, S.Si	L	Kader	621
3	Mukhamad Siswandi,S.Si	L	Kader	1.573
4	Drs. Yogi Syafril	L	Kader	345
5	Darussalam, SH	L	Kader	253
6	Endah Mutiningrum, A.Md	P	Kader	255
7	Titin Juniana, SP	P	Kader	331
8	M. Anwar Al Syadat, S.Si	L	Kader	1.596
9	Hasbi, SE	L	Kader	332
10	Budi Santoso	L	Kader	384
Jumlah				9.009

**Dapil 2 (Kec. Sako, Kalidoni, & Sematang Borang)**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN L/P	STATUS	SUARA SAH
1	Subagio Rachmad Sentosa, SH	L	Kader	1.408
2	Busro Iskandar	L	Kader	964
3	Komari Romadhoni, A.Md	P	Kader	331
4	Dian Eko Prasetyo, S.Kom	L	Kader	852
5	Dra. Sila Zahrawani	P	Kader	447
6	Kms. M. Ronal Rizky, S.Pd	L	Kader	372
7	Dwi Yanni Suswati, ST	P	Kader	496
8	Al Miftahul Khoiril A, S.Kom	L	Kader	442
Jumlah				7.321

**Dapil 3 (Kec. Seberang Ulu Ii & Plaju)**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN L/P	STATUS	SUARA SAH
1	Syahidil Akmal, ST	L	Kader	1.688
2	Hj. Roihatun Nafsiah, SE	P	Kader	914
3	H. Agus Tridasa	L	Kader	2.292
4	M. Iqbal, SE	L	Kader	349
5	Sultoni	L	Kader	298
6	Dian Eka Sari, SP	P	Kader	356
Jumlah				7.376

**Dapil 4 (Kec. Seberang Ulu I & Kertapati)**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN L/P	STATUS	SUARA SAH
1	M. Ridwan Saiman, SH, MH	L	Kader	819
2	H. Suhaely Ibrahim, Lc	L	Kader	566
3	Dra. Aspi Zaitun	P	Kader	361
4	Ahmad Kamil, S.Pd.I	L	Kader	870
5	Supriyadi, SS	L	Kader	520
6	Tinah Rusmiyati, S.Pd	P	Kader	122
7	Anton Jundi	L	Kader	102
8	Msy. Zainab	P	Kader	95
Jumlah				4.802

**Dapil 5 (Kec Ilir Barat II, Ilir Barat I, Bukit Kecil & Gandus)**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN L/P	STATUS	SUARA SSH
1	Adi Apriliansyah, SE	L	Kader	2.370
2	H. Sumarno Ahmad Jamil, Lc	L	Kader	1.021
3	Nani Syahrani, S.Si	P	Kader	572
4	Firmansa, SP	L	Kader	993
5	Nopliyadi, SE	L	Kader	109
6	Fitri Andayani, SE	P	Kader	531
7	M. Fadli, A.Md	L	Kader	296
8	Mukmin Kamal, SE. I	L	Kader	363
9	Tri Vera Gustina	P	Kader	131
10	M. Taufik Saiman, S.Ag	L	Kader	879
Jumlah				9.468

**Dapil 6 (Kec. Ilir Timur I & Ilir Timur II)**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN L/P	STATUS	SUARA SAH
1	H. Musliman, S.Ag	L	Kader	2.053
2	Irwansyah Putra, SP	L	Kader	176
3	Mahdalena, A.Md	P	Kader	194
4	Awiruddin, S.Pd	L	Kader	137
5	Eliyah	P	Kader	415
6	Junwandri	L	Kader	114
7	Dadang Patrajaya	L	Kader	226
8	RA. Farida, SE	P	Kader	127
Jumlah				4.989

Sumber: DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang

## DOKUMENTASI

Wawancara dengan Kasubid Hukum KPU Kota Palembang



Wawancara dengan Ketua DPD PKS Kota Palembang



Wawancara dengan Wakil Ketua DPD PKS Kota Palembang



Wawancara dengan Kabid Perempuan DPD PKS Kota Palembang

